

# LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018 *AUDITED*



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

## V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**A. PENJELASAN UMUM****A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuknya tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia, ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

Selaku institusi Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi *reorganisasi* dengan "terbentuknya" tiga organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional, suatu Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. "*Core function*"nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara, pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi

Keuangan Negara, serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengelolaan Data Informasi Keuangan Regional.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat teknis pada kantor pusat serta Kantor Wilayah DJPB dan KPPN pada kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun merupakan titik awal sinergi organisasi baru tersebut.

Landasan Kegiatan Operasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas bidang perbendaharaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan

anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen dengan visi *“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”/ “To be a world-class state treasury manager.”* Untuk mewujudkannya akan dilakukan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien dan optimal;
- Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
- Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, professional dan modern.

Susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;  
Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.
6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Selain itu terdapat organisasi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Jumlah entitas akuntansi adalah 216 satuan kerja yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 98 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, 81 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2, dan 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus. Selain satker vertikal tersebut pada DJPb terdapat juga 3 satker Kantor Pusat dan 2 Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga total satuan kerja DJPb adalah **221** satuan kerja. Rincian entitas tersebut tersaji dalam lampiran Laporan Keuangan. Tugas unit vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;  
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi,

bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 dan A2;  
Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah;  
Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan;  
Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi;  
Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga terdapat entitas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang koordinasi pelaporan keuangannya dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mempunyai tugas yaitu:

1. Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN):  
Mempunyai tugas menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui integrasi sistem manajemen keuangan negara, penerapan

akuntansi akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan kemudahan akses bagi pengguna. SPAN akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Satuan Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP):

Mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

3. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS):

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Satuan Kerja Pusat Investasi Pemerintah:

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lokasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkedudukan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta Pusat.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2017 satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan *Piloting* aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

(SAKTI) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau



sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Pengelolaan BMN
  - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

### Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

### Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pada tahun 2018 perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap mengalami perubahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Perubahan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) peralatan dan mesin pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - d. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) gedung dan bangunan pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - e. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Investasi  
Jangka  
Panjang*

### **Investasi Jangka Panjang**

- Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU.
- Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- Dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca.
- Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan penginvestasian diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan /Diinvestasikan menjadi Investasi Non Permanen Lainnya di Neraca.

*Aset Lainnya*

**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Cara Perolehan Aset Tak Berwujud:

- a. Pembelian;
- b. Pengembangan secara internal;
- c. Pertukaran;
- d. Kerjasama;
- e. Donasi/hibah;
- f. Warisan Budaya/Sejarah.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud:

- a. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas;
- b. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas.

Amortisasi Aset Tak Berwujud:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP berbasis Akrual dilaksanakan mulai

Tahun Anggaran 2016.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### Kewajiban

### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Kewajiban pada satuan kerja BPDP Kelapa Sawit diatur kebijakan sebagai berikut :
  - a. Utang atas permintaan kelebihan bayar pungutan oleh eksportir (lebih pungut) diakui apabila telah ada surat ketetapan lebih bayar dari BPD PKS atas permohonan pengembalian kelebihan bayar dari eksportir.
  - b. Utang atas penyaluran biodiesel diakui pada saat Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) menyampaikan tagihan kepada BPD PKS yang nilainya telah diverifikasi oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).



- c. Utang terhadap biaya riset diakui pada saat perjanjian riset ditandatangani oleh BPDPKS dan Lembaga riset sebesar pencairan Tahap I. Pengakuan utang atas biaya riset tahap II dan III diakui sebesar hasil monitoring tahap sebelumnya.
- d. Utang terhadap biaya surveyor dicatat apabila telah ada tagihan dari surveyor yang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) dan telah diverifikasi oleh PPK.

**Ekuitas****(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih**

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali**

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
AkruaI  
Pertama Kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2018	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan	Rp 11.554.826.676.450	Rp 11.554.826.676.450
<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 11.554.826.676.450</b>	<b>Rp 11.554.826.676.450</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	Rp 546.515.746.000	Rp 547.063.610.000
Belanja Barang	Rp 758.829.958.000	Rp 702.655.062.000
Belanja Modal	Rp 339.552.873.000	Rp 399.883.305.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 1.644.898.577.000</b>	<b>Rp 1.649.601.977.000</b>
<b>Belanja BLU</b>		
Belanja Barang-BLU	Rp 11.015.401.443.000	Rp 11.032.055.677.000
Belanja Modal-BLU	Rp 596.200.000	Rp 1.196.880.000
<b>Jumlah Belanja-BLU</b>	<b>Rp 11.015.997.643.000</b>	<b>Rp 11.033.252.557.000</b>
<b>Total Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 12.660.896.220.000</b>	<b>Rp 12.682.854.534.000</b>

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	31 Desember 2018	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Rp 18.481.615.000	Rp 17.411.412.000
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Rp 7.196.729.000	Rp 6.777.999.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Rp 7.010.241.000	Rp 5.775.963.000
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	Rp 11.919.186.000	Rp 10.165.010.000
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	Rp 26.402.673.000	Rp 19.959.475.000
Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan	Rp 12.705.388.000	Rp 12.836.055.000
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp 254.832.287.000	Rp 251.195.081.000
Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	Rp 398.797.003.000	Rp 389.288.438.000
Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	Rp 188.897.237.000	Rp 195.112.137.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan	Rp 718.361.738.000	Rp 736.082.527.000
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Rp 294.480.000	Rp 294.480.000
<b>Jumlah Rupiah Murni</b>	<b>Rp 1.644.898.577.000</b>	<b>Rp 1.644.898.577.000</b>
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp -	Rp 4.703.400.000
<b>Jumlah Hibah Luar Negeri</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 4.703.400.000</b>
Perhimpunan pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 10.992.000.000.000	Rp 10.992.000.000.000
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Rp 23.997.643.000	Rp 41.252.557.000
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 11.015.997.643.000</b>	<b>Rp 11.033.252.557.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.660.896.220.000</b>	<b>Rp 12.682.854.534.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp15.563.997.940.851,00

## B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir s.d tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp15.563.997.940.851,00** atau mencapai **134,70%** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp11.554.826.676.450,00** Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2018		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp 14.433.100	Rp 59.590.100	412,87%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 100.208.900	Rp 267.416.532	266,86%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp 695.526.700	Rp 1.490.665.162	214,32%
endapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 1.900.940.000	Rp 2.162.913.692	113,78%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Rp -	Rp 853.210	0,00%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap bendahara	Rp 268.200.000	Rp 151.983.660	56,67%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 4.745.500	Rp 669.319.193	14104,29%
Pendapatan Denda Lainnya	Rp -	Rp 150.000	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 117.616.250	Rp 268.122.856	227,96%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 322.502.000	Rp 313.384.531	97,17%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 500.000.000	Rp 157.191.350	31,44%
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Rp 967.150.000	Rp 2.629.780.878	271,91%
<b>Sub total</b>	<b>Rp 4.891.322.450</b>	<b>Rp 8.171.371.164</b>	<b>167,06%</b>
Pendapatan Investasi	Rp 30.000.000.000	Rp 31.589.533.397	105,30%
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 10.992.000.000.000	Rp 14.413.921.271.119	131,13%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Rp 527.935.354.000	Rp 1.103.074.726.390	208,94%
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp -	Rp 6.649.967.292	0,00%
Pendapatan Lain-lain BLU	Rp -	Rp 595.720.743	0,00%
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 11.549.935.354.000</b>	<b>Rp 15.555.831.218.941</b>	<b>134,68%</b>
Pengembalian	Rp -	Rp (4.649.254)	0,00%
<b>Jumlah Netto</b>	<b>Rp 11.554.826.676.450</b>	<b>Rp 15.563.997.940.851</b>	<b>134,70%</b>

Realisasi Pendapatan s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar **5,14%** persen dibandingkan realisasi pendapatan s.d tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan pendapatan secara umum disebabkan meningkatnya pendapatan yang berasal dari pendapatan jasa layanan perbankan BLU (deposito). Penurunan pada pendapatan denda dan lain-lain merupakan penurunan denda atas pelaksanaan rekening penerimaan bersaldo nihil dan penerimaan kembali belanja pegawai, barang dan modal tahun anggaran yang lalu.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN)%
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan	Rp 3.980.585.486	Rp 5.186.884.737	-23,26%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	Rp 152.836.870	Rp 7.203.266	2021,77%
Pendapatan Denda	Rp 669.469.193	Rp 1.895.832.953	-64,69%
Pendapatan Lain-Lain	Rp 3.368.479.615	Rp 4.940.178.503	-31,81%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.171.371.164</b>	<b>Rp 12.030.099.459</b>	<b>-32,08%</b>
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU	Rp 14.445.510.804.516	Rp 14.277.243.703.515	1,18%
Pendapatan BLU Lainnya	Rp 1.110.320.414.425	Rp 513.388.743.018	116,27%
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 15.555.831.218.941</b>	<b>Rp 14.790.632.446.533</b>	<b>5,17%</b>
Pengembalian	Rp (4.649.254)	Rp (1.959.808)	137,23%
<b>Jumlah Netto</b>	<b>Rp 15.563.997.940.851</b>	<b>Rp 14.802.660.586.184</b>	<b>5,14%</b>

Realisasi Belanja

Rp7.984.355.304.620,00

**B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja s.d tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp7.984.355.304.620,00** atau **62,95%** (termasuk realisasi belanja satker BLU) dari anggaran belanja sebesar **Rp12.682.854.534.000,00** Rincian anggaran dan realisasi belanja s.d tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

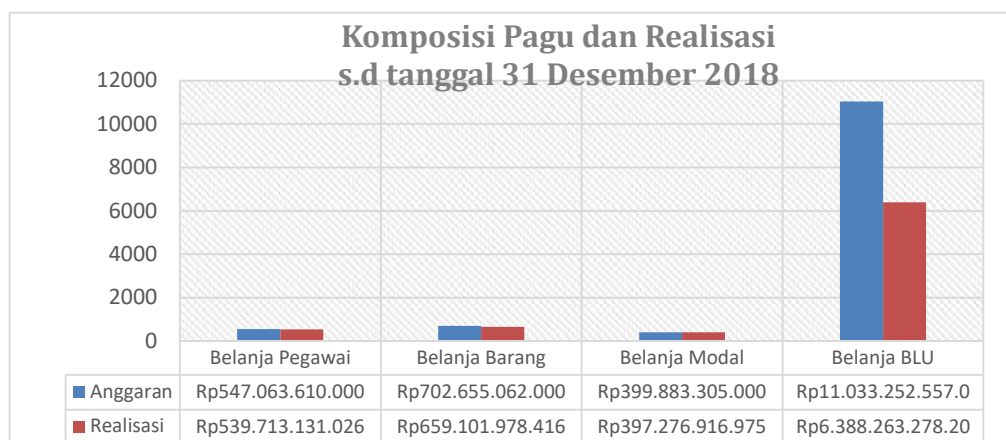
*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	Rp 547.063.610.000	Rp 539.803.416.813	98,67
Belanja Barang	Rp 702.655.062.000	Rp 659.252.576.242	93,82
Belanja Modal	Rp 399.883.305.000	Rp 397.292.901.358	99,35
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.649.601.977.000</b>	<b>Rp 1.596.348.894.413</b>	<b>96,77</b>
Belanja Barang-BLU	Rp 11.032.055.677.000	Rp 6.387.135.347.203	57,90
Belanja Modal-BLU	Rp 1.196.880.000	Rp 1.127.931.000	94,24
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 11.033.252.557.000</b>	<b>Rp 6.388.263.278.203</b>	<b>57,90</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (256.867.996)	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp 12.682.854.534.000</b>	<b>Rp 7.984.355.304.620</b>	<b>62,95</b>

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan s.d tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	31 Desember 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Rp 17.411.412.000	Rp 17.192.247.045	98,74%
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Rp 6.777.999.000	Rp 6.725.976.521	99,23%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Rp 5.775.963.000	Rp 5.726.089.000	99,14%
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	Rp 10.165.010.000	Rp 9.600.234.555	94,44%
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	Rp 19.959.475.000	Rp 19.590.579.312	98,15%
Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan	Rp 12.836.055.000	Rp 12.565.561.918	97,89%
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp 251.195.081.000	Rp 246.592.200.983	98,17%
Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	Rp 389.288.438.000	Rp 376.460.496.920	96,70%
Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	Rp 195.112.137.000	Rp 187.990.238.527	96,35%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan	Rp 736.082.527.000	Rp 709.545.301.752	96,39%
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Rp 294.480.000	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Rupiah Murni</b>	<b>Rp 1.644.898.577.000</b>	<b>Rp 1.591.988.926.533</b>	<b>96,78%</b>
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp 4.703.400.000	Rp 4.359.967.880	92,70%
<b>Jumlah Hibah Luar Negeri</b>	<b>Rp 4.703.400.000</b>	<b>Rp 4.359.967.880</b>	<b>92,70%</b>
Perhimpunan pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 10.992.000.000.000	Rp 6.364.398.426.756	57,90%
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Rp 41.252.557.000	Rp 23.864.851.447	57,85%
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 11.033.252.557.000</b>	<b>Rp 6.388.263.278.203</b>	<b>57,90%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (256.867.996)	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.682.854.534.000</b>	<b>Rp 7.984.355.304.620</b>	<b>62,95%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan realisasi belanja s.d tanggal 31 Desember 2017, realisasi belanja s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar **35,71%**. Penjelasan kenaikan dan penurunan realisasi belanja disebabkan antara lain:

1. Belanja pegawai non BLU mengalami Penurunan terbesar pada realisasi Belanja Tunjangan PPh bagi PNS disebabkan adanya perubahan PTKP sesuai PMK 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penurunan

realisasi belanja lembur sesuai instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/MK.01/2017 Tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan;

2. Belanja Barang non BLU mengalami penurunan disebabkan Belanja Jasa untuk pembayaran jasa konsultan dan jasa lainnya (Imbalan Jasa Bank/Pos Persepsi) dialihkan pembayarannya ke BA BUN;
3. Belanja Modal non BLU mengalami kenaikan disebabkan realisasi untuk belanja modal tanah dan belanja modal gedung dan bangunan satuan kerja DJPb dan kenaikan atas realisasi belanja modal lainnya yang merupakan pembayaran software dan lisensi untuk kebutuhan operasional DJPb (aplikasi SAKTI);
4. Belanja untuk BLU mengalami penurunan disebabkan penurunan pada realisasi belanja barang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dan penurunan realisasi belanja modal mesin dan peralatan satker BPDP Kelapa Sawit.

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 539.803.416.813	Rp 554.929.828.408	-2,73%
Belanja Barang	Rp 659.252.576.242	Rp 1.069.600.007.940	-38,36%
Belanja Modal	Rp 397.292.901.358	Rp 105.879.793.005	275,23%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.596.348.894.413</b>	<b>Rp 1.730.409.629.353</b>	<b>-7,75%</b>
Belanja Barang BLU	Rp 6.387.135.347.203	Rp 10.689.820.044.531	-40,25%
Belanja Modal BLU	Rp 1.127.931.000	Rp 1.823.967.000	-38,16%
<b>Jumlah BLU</b>	<b>Rp 6.388.263.278.203</b>	<b>Rp 10.691.644.011.531</b>	<b>-40,25%</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>Rp (256.867.996)</b>	<b>Rp (2.173.074.354)</b>	<b>-88,18%</b>
<b>Jumlah Netto</b>	<b>Rp 7.984.355.304.620</b>	<b>Rp 12.419.880.566.530</b>	<b>-35,71%</b>

*Belanja Pegawai*

*Rp539.713.131.026,00*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi belanja pegawai s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp539.713.131.026,00** Dan **Rp554.852.312.957,00** Realisasi belanja s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar **2,73%** persen dari realisasi belanja s.d tanggal 31 Desember 2017. Penurunan terbesar pada realisasi Belanja Tunjangan PPh bagi PNS disebabkan adanya perubahan PTKP sesuai PMK 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penurunan realisasi belanja lembur sesuai instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/MK.01/2017 Tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan.



## Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 361.991.021.833	Rp 375.246.397.715	-3,53%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 5.073.367	Rp 5.244.767	-3,27%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 25.592.461.326	Rp 24.727.629.234	3,50%
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 7.174.883.468	Rp 7.029.710.322	2,07%
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 19.568.450.000	Rp 18.039.590.000	8,48%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 236.520.000	Rp 207.405.000	14,04%
Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 755.112.649	Rp 1.171.166.110	-35,52%
Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 17.397.069.120	Rp 18.277.004.260	-4,81%
Belanja Uang Makan PNS	Rp 55.579.318.650	Rp 54.647.352.000	1,71%
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp 57.825.000	Rp 55.200.000	4,76%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp 1.269.440.000	Rp 1.251.075.000	1,47%
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 14.236.380.000	Rp 13.884.115.000	2,54%
Belanja Uang Lembur	Rp 35.939.861.400	Rp 40.387.939.000	-11,01%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 539.803.416.813</b>	<b>Rp 554.929.828.408</b>	<b>-2,73%</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp (90.285.787)	Rp (77.515.451)	16,47%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 539.713.131.026</b>	<b>Rp 554.852.312.957</b>	<b>-2,73%</b>

## Belanja Barang

Rp7.046.237.325.619,00

## B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp7.046.237.325.619,00** dan **Rp11.757.333.138.468,00** realisasi belanja barang s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan **40,07%** dibandingkan realisasi belanja barang s.d tanggal 31 Desember 2017. Penurunan disebabkan penurunan pada realisasi belanja barang Pengelolaan dana Perkebunan Kelapa sawit sedangkan Belanja Barang non BLU mengalami penurunan pada realisasi Belanja Jasa untuk pembayaran jasa konsultan dan jasa lainnya (Imbalan Jasa Bank/Pos Persepsi) karena pembayarannya telah dialihkan ke BA BUN, Belanja Pemeliharaan mengalami kenaikan pada Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin dan kenaikan realisasi juga terdapat pada Belanja Perjalanan dalam Negeri dan luar negeri.

## Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	Rp 161.173.637.028	Rp 140.225.634.355	14,94%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 73.542.107.467	Rp 73.859.576.198	-0,43%
Belanja Persediaan	Rp 30.709.238.329	Rp 28.209.155.608	8,86%
Belanja Jasa	Rp 65.516.535.620	Rp 516.491.076.355	-87,32%
Belanja Pemeliharaan	Rp 149.634.846.046	Rp 148.226.271.971	0,95%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 177.777.981.952	Rp 162.292.409.451	9,54%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 898.229.800	Rp 295.884.000	203,57%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 659.252.576.242</b>	<b>Rp 1.069.600.007.938</b>	<b>-38,36%</b>
Belanja Barang BLU	Rp 6.387.135.347.203	Rp 10.689.820.044.533	-40,25%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 6.387.135.347.203</b>	<b>Rp 10.689.820.044.533</b>	<b>-40,25%</b>
Pengembalian Belanja	Rp (150.597.826)	Rp (2.086.914.003)	-92,78%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 7.046.237.325.619</b>	<b>Rp 11.757.333.138.468</b>	<b>-40,07%</b>

Belanja Barang BLU  
Rp6.387.135.347.203,00

#### B.4.1 Belanja Barang BLU

Realisasi belanja barang BLU s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp6.387.135.347.203,00** dan **Rp10.687.894.003.146,00** realisasi belanja barang s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan **40,24%** dibandingkan realisasi belanja barang s.d tanggal 31 Desember 2017. Penurunan disebabkan penurunan pada realisasi belanja Pengelolaan dana Perkebunan Kelapa sawit sedangkan kenaikan realisasi BLU pada belanja gaji, barang, Jasa, pemeliharaan dan perjalanan.

*Perbandingan Belanja Barang BLU 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 50.132.898.607	Rp 37.054.320.813	35,30%
Belanja Barang	Rp 9.659.896.641	Rp 5.928.031.246	62,95%
Belanja Jasa	Rp 38.314.570.994	Rp 20.427.360.736	87,56%
Belanja Pemeliharaan	Rp 1.255.346.076	Rp 656.087.838	91,34%
Belanja Perjalanan	Rp 10.884.443.936	Rp 3.466.541.212	213,99%
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 6.276.885.963.449	Rp 10.622.287.702.688	-40,91%
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp 2.227.500	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 6.387.135.347.203</b>	<b>Rp 10.689.820.044.533</b>	<b>-40,25%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (1.926.041.387)	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 6.387.135.347.203</b>	<b>Rp 10.687.894.003.146</b>	<b>-40,24%</b>

Belanja Modal  
Rp398.404.847.975,00

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp398.404.847.975,00** dan **Rp107.695.115.105,00** Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar **269,94%** dibandingkan realisasi belanja modal s.d tanggal 31 Desember 2017. Realisasi belanja modal s.d tanggal 31 Desember 2018 terdapat realisasi belanja modal Tanah pada satker Kanwil DJPb Prov Kaltara dan KPPN Kutacane dan Kenaikan realisasi pada belanja modal peralatan dan mesin, belanja penambahan nilai gedung dan bangunan dan belanja modal

lainnya yang merupakan realisasi belanja untuk pembayaran aplikasi SAKTI.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	Rp 5.533.215.880	Rp -	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 207.849.117.375	Rp 50.509.710.258	311,50%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 1.093.855.427	Rp 186.045.800	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 36.451.670.818	Rp 23.837.684.030	52,92%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 39.285.631.750	Rp 19.582.033.192	100,62%
Belanja Modal Lainnya	Rp 107.079.410.108	Rp 11.764.319.725	810,20%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 397.292.901.358</b>	<b>Rp 105.879.793.005</b>	<b>275,23%</b>
Belanja Modal Perlatan dan Mesin BLU	Rp 800.373.000	Rp 1.262.910.000	-36,62%
Belanja Modal Linnya BLU	Rp 327.558.000	Rp 561.057.000	0,00%
<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>Rp 1.127.931.000</b>	<b>Rp 1.823.967.000</b>	<b>-38,16%</b>
Pengembalian Belanja	Rp (15.984.383)	Rp (8.644.900)	84,90%
<b>Jumlah Belanja Total</b>	<b>Rp 398.404.847.975</b>	<b>Rp 107.695.115.105</b>	<b>269,94%</b>

*Belanja Modal Tanah*  
*Rp5.533.215.880,00*

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi belanja modal tanah s.d tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi belanja modal tanah s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp5.533.215.880,00** dan **Rp0,00** Realisasi tersebut pada satker Kanwil DJPb Prov Kaltara dan KPPN Kutacane.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	Rp 5.451.222.880	Rp -	0,00
Belanja Modal Pembebasan Tanah	Rp 43.800.000	Rp -	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	Rp 38.193.000	Rp -	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 5.533.215.880</b>	<b>Rp -</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	Rp -	Rp -	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 5.533.215.880</b>	<b>Rp -</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin*  
*Rp207.836.454.475,00*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin s.d tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp207.836.454.475,00** dan **Rp50.508.785.358,00** Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar **311,49%** bila dibandingkan Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin s.d tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh belanja peralatan dan mesin untuk kebutuhan operasional dan penggantian yang usang/rusak pada Kanwil dan KPPN lingkup Ditjen Perbendaharaan.

## Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 207.849.117.375	Rp 50.509.710.258	311,50%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 207.849.117.375</b>	<b>Rp 50.509.710.258</b>	<b>311,50%</b>
Pengembalian	Rp (12.662.900)	Rp (924.900)	1269,11%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 207.836.454.475</b>	<b>Rp 50.508.785.358</b>	<b>311,49%</b>

Belanja Penambahan  
Nilai Peralatan dan  
Mesin  
Rp1.093.855.427,00

**B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp1.093.855.427,00** dan **Rp186.045.800,00** Realisasi s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar **487,95%** bila dibandingkan realisasi s.d tanggal 31 Desember 2017

## Perbandingan Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 1.093.855.427	Rp 186.045.800	487,95%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 1.093.855.427</b>	<b>Rp 186.045.800</b>	<b>487,95%</b>
Pengembalian	Rp -	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 1.093.855.427</b>	<b>Rp 186.045.800</b>	<b>487,95%</b>

Belanja Modal Gedung  
dan Bangunan  
Rp36.451.670.818,00

**B.5.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp36.451.670.818,00** dan **Rp23.829.964.030,00** Realisasi s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar **52,97%** bila dibandingkan realisasi s.d tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk kebutuhan operasional lingkup DJPb, realisasi terbesar pada satker Kanwil DJPb Prov Kaltara.

## Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 36.451.670.818	Rp 23.837.684.030	52,92%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 36.451.670.818</b>	<b>Rp 23.837.684.030</b>	<b>52,92%</b>
Pengembalian		Rp (7.720.000)	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 36.451.670.818</b>	<b>Rp 23.829.964.030</b>	<b>52,97%</b>

Belanja Penambahan  
Nilai Gedung dan  
Bangunan  
Rp39.282.310.267,00

**B.5.5 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan**

Realisasi belanja penambahan nilai gedung dan bangunan s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing

sebesar **Rp 39.282.310.267,00** dan **Rp19.582.033.192,00** Realisasi s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar **100,60%** bila dibandingkan s.d tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh belanja rehabilitasi dan perbaikan gedung dan bangunan pada Kanwil dan KPPN lingkup Ditjen Perbendaharaan, realisasi terbesar pada satker KPPN Jakarta I.

*Perbandingan Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 39.285.631.750	Rp 19.582.033.192	100,62%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 39.285.631.750</b>	<b>Rp 19.582.033.192</b>	<b>100,62%</b>
Pengembalian	Rp (3.321.483)	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 39.282.310.267</b>	<b>Rp 19.582.033.192</b>	<b>100,60%</b>

*Belanja Modal Jalan,  
jaringan dan Irigasi  
Rp0,00*

### ***B.5.6 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi***

Realisasi Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** Tidak terdapat pagu dan realisasi untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>0,00%</b>
Pengembalian	Rp -	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>0,00%</b>

*Belanja Modal Lainnya  
Rp107.079.410.108,00*

### ***B.5.7 Belanja Modal Lainnya***

Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp107.079.410.108,00** dan **Rp11.764.319.725,00** Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar **810,20%** persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d tanggal 31 Desember 2017. Belanja modal lainnya di belanjakan untuk pengadaan *software* dan lisensi antara lain:

1. Aplikasi SAKTI senilai Rp61,3 Miliar;
2. Aplikasi MPN Generasi Kedua (MPN G-2) senilai Rp29,5 Miliar.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	Rp 107.079.410.108	Rp 11.764.319.725	810,20%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 107.079.410.108</b>	<b>Rp 11.764.319.725</b>	<b>810,20%</b>
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 107.079.410.108</b>	<b>Rp 11.764.319.725</b>	<b>810,20%</b>

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU Rp800.373.000,00*

**B.5.8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp800.373.000,00** dan **Rp1.262.910.000,00** Realisasi s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar **36,62%** bila dibandingkan s.d tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan belanja peralatan dan mesin untuk kebutuhan operasional telah memadai.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 800.373.000	Rp 1.262.910.000	-36,62%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 800.373.000</b>	<b>Rp 1.262.910.000</b>	<b>-36,62%</b>
Pengembalian	Rp -	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 800.373.000</b>	<b>Rp 1.262.910.000</b>	<b>-36,62%</b>

*Belanja Modal Lainnya-BLU Rp327.558.000,00*

**B.5.9 Belanja Modal Lainnya- BLU**

Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU s.d tanggal 31 Desember 2018 dan s.d tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp327.558.000,00** dan **Rp561.057.000,00** Realisasi s.d tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar **41,62%** bila dibandingkan s.d tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan belanja modal lainnya untuk pembelian software dan lisensi kebutuhan operasional BLU.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 327.558.000	Rp 561.057.000	-41,62%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 327.558.000</b>	<b>Rp 561.057.000</b>	<b>-41,62%</b>
Pengembalian	Rp -	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 327.558.000</b>	<b>Rp 561.057.000</b>	<b>-41,62%</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp1.054.796,00*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp1.054.796,00** dan **Rp61.459.000,00** Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	Rp 1.054.796	Rp 61.459.000
Jumlah	Rp 1.054.796	Rp 61.459.000

Saldo Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 merupakan milik satuan kerja Kanwil DJPb Prov Papua Barat

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (TUP) per 31 Desember 2018 telah disetor pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	NTPN	Tanggal Setor	Nilai Setoran
Kanwil DJPb Prov Papua barat	12AE07HN6V0F21LO	07 Januari 2019	Rp 1.054.796
Jumlah			Rp 1.054.796

*Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp916.861.713,00*

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp916.861.713,00** dan **Rp3.592.705.373,00**

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan uang mutasi pegawai yang belum dibagikan sampai dengan tanggal pelaporan dan Dana Pihak Ketiga yang merupakan retur belanja yang belum terselesaikan proses pembayarannya kembali s.d. bulan Desember 2018 sebesar **Rp708.489.238,00**. Retur tersebut terjadi dikarenakan kesalahan input



nama/nomor rekening penerima, sehingga tertolak oleh sistem pembayaran. Dana Pihak Ketiga ada pada satker BPDP Kelapa Sawit.

Rekapitulasi incian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	Rp -	Rp 4,344,173
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 208,372,475	Rp 3,588,361,200
Dana Pihak Ketiga	Rp 708,489,238	
<b>Total</b>	<b>Rp 916,861,713</b>	<b>Rp 3,592,705,373</b>

Kas pada Badan Layanan Umum

Rp21.167.898.964.152,00

### C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp21.167.898.964.152,00** dan **Rp3.186.919.095.961,00** Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas tunai (yang sudah disahkan BUN) dan kas pada rekening Bank yang berada pada Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit dan Pusat Investasi Pemerintah.

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas dan Bank BLU	Rp 78,579,821,353	Rp -
Setara Kas Lainnya - BLU	Rp 21,089,319,142,799	Rp 3,186,919,095,961
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 21,167,898,964,152</b>	<b>Rp 3,186,919,095,961</b>

Rincian per satker Kas pada badan layanan umum disajikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2018
<b>Kas dan Bank BLU</b>	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 3,093,871,048
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp 75,485,950,305
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 78,579,821,353</b>
<b>Setara kas Lainnya - BLU</b>	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 20,919,000,000,000
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp 170,319,142,799
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 21,089,319,142,799</b>
<b>Total</b>	<b>Rp 21,167,898,964,152</b>

Kas dan Bank-BLU BPDP Kelapa Sawit terdiri dari Kas dan Bank -BLU berupa Kas di Bendahara sebesar Rp176.735.231,00 dan Kas di Bank sebesar Rp2.917.135.817,00. Sedangkan Setara Kas Lainnya-BLU berupa deposito dengan jangka waktu tempo s.d. 3 bulan sebesar Rp20.919.000.000.000,00.

Kas dan Bank-BLU Pusat Investasi Pemerintah merupakan Kas dan Bank-BLU berupa Kas di Bendahara sebesar Rp75.485.950.305,00 dan Setara Kas Lainnya merupakan deposito pada Bank BRI sebesar Rp170.319.142.799,00.



Investasi Jangka Pendek  
Badan Layanan Umum  
Rp0,00

#### C.4 Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp8.643.092.784.654,00** Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum pada satker BPDP Kelapa Sawit merupakan kas dan Bank BLU yang telah disahkan BUN berupa Deposito dan investasi jangka pendek lainnya (deposito di Bank Mandiri, BNI dan BRI).

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Investasi Jangka Pendek-BLU	Rp -	Rp 8.643.092.784.654
Jumlah	Rp -	Rp 8.643.092.784.654

Belanja Dibayar Dimuka  
Rp10.770.467.823,00

#### C.5 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp10.770.467.823,00** dan **Rp5.219.179.936,00**. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut:

Satker	Belanja Dibayar Dimuka
Kanwil DJPb Prov. Papua Barat	Sewa Gedung Arsip Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat Rp65.541.667,00
BPDP Kelapa Sawit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sewa 10 unit kendaraan roda empat dengan nilai Rp792.000.000,00 selama 12 bulan/1 tahun dari PT. Bumi Daya Plaza dengan Kontrak Nomor: PRJ-226.3/DPKS/Dit.I/2018 tanggal 7 Desember 2018;</li> <li>Pengadaan Jasa Lisensi dan Layanan Microsoft Office 365 dengan nilai Rp187.143.000,00 selama 12 bulan/1 tahun dari PT. Logos Teknologi Utama dengan Kontrak Nomor: SPK-230.3/DPKS/Dit.I/2018 tanggal 13 Desember 2018;</li> </ol>

	3. Sewa gedung dengan nilai Rp9.618.640.416,00 selama 12 bulan/1 tahun dari PT. Bumi Daya Plaza dengan Kontrak Nomor: 84.3/DPKS/Dit.I/2018 tanggal 30 April 2018.
Pusat Investasi Pemerintah	Biaya sewa dan <i>service charge</i> gedung kantor sebesar Rp5.702.004.000,00
Kantor Pusat DJPb	Sewa gedung untuk Kanwil DJPb Prov. Kep. Riau sebesar Rp291.750.000,00.
KPPN Banda Aceh	Sewa ruko untuk KPPN Fillial Rp2.500.000,00
KPPN Buntok	Sewa gedung kantor fillial Rp38.500.000,00
KPPN Palu	Sewa gedung KPPN Palu pasca gempa dan tsunami di wilayah kota Palu dan sekitarnya sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Rumah No. SPK-002/WPB.27/PPK/2018 tanggal 1 November 2018 sebesar Rp91.800.000,00
KPPN Ambon	Sewa gedung kantor sebesar Rp29.166.667,00
KPPN Ternate	Sewa rumah sebesar Rp25.666.667,00
KPPN Wamena	Listrik Prabayar sebesar Rp31.517.350,00
Kanwil DJPb Prov. Kaltara	Sewa 3 unit gudang sebesar Rp306.665.000,00

Rincian Belanja Dibayar di muka disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Uang Muka Belanja  
(prepayment)  
Rp2.857.163.927,00

### C.6 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar **Rp2.857.163.927,00** dan **Rp2,603,872,771**. Uang Muka Belanja merupakan pembayaran dimuka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Transaksi Uang Muka Belanja pada Ditjen Perbendaharaan merupakan transaksi persekot gaji hasil reklasifikasi akun Belanja Pegawai dibayar dimuka (*prepaid*). Pengertian dari Persekot Gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan

kepada pegawai yang dipindahkan/ dimutasi untuk kepentingan dinas. Pedoman pembayaran persekot gaji sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor SE-125/A/621/1995 tanggal 3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji bagi Pegawai Negeri. Sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji, maka transaksi Uang Muka Belanja (prepayment) hanya pada satker Kantor Pusat DJPb.

*Pendapatan yang masih harus diterima  
Rp39.922.005.718,00*

### C.7 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar **Rp39.922.005.718,00** dan **Rp17,398,545,400**. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2018	Satker	31 Desember 2017
BPDP Kelapa Sawit	Rp 29.472.298.630	BPDP Kelapa Sawit	Rp 17.398.545.400
Pusat Investasi Pemerintah	Rp 10.446.373.755		
KPPN Semarang I	Rp 3.333.333		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 39.922.005.718</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 17.398.545.400</b>

Pendapatan yang masih harus diterima pada satker BPDP Kelapa Sawit merupakan pendapatan Bunga Deposito dan pendapatan jasa giro yang sudah menjadi hak BPDP Kelapa Sawit tetapi hingga 31 Desember 2018 belum diterima.

*Piutang PNB  
Rp457.802.459,00*

### C.8 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar **Rp457.802.459,00** dan **Rp145,294,823**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak pada Kantor Pusat DJPb merupakan kelebihan pembayaran belanja pegawai atas nama Sri Ambarwati dari Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah. Saldo Piutang Bukan Pajak terdiri dari saldo Piutang PNB sebesar Rp75.134.459,00 dan Piutang Lainnya yang merupakan pengembalian belanja dari pencairan garansi bank yang dicairkan pada tahun 2019

sebesar Rp382.668.000,00. Piutang Lainnya terdiri dari pencairan garansi bank a.n. PT. Limawira Wisesa sebesar Rp286.968.000,00 dan PT. Mitsubishi Jaya Elevator sebesar Rp95.700.000,00. Rekapitulasi per satker Piutang PNBPN disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih –Piutang PNBPN  
Rp13.150.279,00

### C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBPN

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp13.150.279,00** dan **Rp11.587.741,00**

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	Rp 446.886.613	0,5%	Rp 2.234.433
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 10.915.846	100%	Rp 10.915.846
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 457.802.459		Rp 13.150.279

Bagian Lancar TP/TGR  
Rp58.999.200,00

### C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar **Rp58.999.200,00** dan **Rp99.699.200,00** Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian per debitor dan Berita Acara Rekonsiliasi TP/TGR antara DJPb dengan Sekjen Kementerian Keuangan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Rincian per satker Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

No	Nama	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Kantor Pusat DJPB	Rp 34.999.200	Rp 43.699.200
2	KPPN Cirebon	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
3	KPPN Bandar Lampung	Rp 12.000.000	Rp 44.000.000
Jumlah		Rp 58.999.200	Rp 99.699.200

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih –Piutang Jangka  
Pendek Rp294.996,00

### C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp294.996,00** dan **Rp498.496,00**

Penyisihan piutang tak tertagih – Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	Rp 58.999.200	0,5%	Rp 294.996
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp -	100%	Rp -
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 58.999.200		Rp 294.996

Piutang dari Kegiatan  
Operasional BLU  
Rp145.825.271,00

### C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Saldo Piutang dari KUN per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar **Rp145.825.271,00** dan **Rp0,00** Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum terdiri dari piutang kekurangan bunga deposito BNI sebesar Rp142.989.043,00 kekurangan bunga deposito Bank Mandiri sebesar Rp2.739.726,00 denda kekurangan bunga deposito BNI sebesar Rp84.380,00 dan denda kekurangan bunga deposito Bank Mandiri sebesar Rp12.122,00

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih –Piutang Jangka  
Pendek Rp729.125,00

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp729.125,00** dan **Rp0,00**

Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga ditetapkan paling sedikit 5‰ (lima permil) dari

piutang yang memiliki kualitas lancar.

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	Rp 145.825.271	0,5%	Rp 729.125
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp -	100%	Rp -
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 145.825.271		Rp 729.125

*Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp75.594.841,00*

#### C.14 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp75.594.841,00** dan **Rp0,00**

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum berupa kelebihan pembayaran uang harian atas biaya perjalanan dinas luar negeri kegiatan promosi BPDP Kelapa Sawit tahun 2015 sebesar **Rp75.594.841,00**

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU defisit Rp 377.974,00*

#### C.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar **Rp377.974,00** dan **Rp0,00**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang tersebut dari satu kerja BPDP Kelapa Sawit. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga ditetapkan paling sedikit 5‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.

Kualitas Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	Rp 75.594.841	0,5%	Rp 377.974
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp -	100%	Rp -
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 75.594.841		Rp 377.974

*Persediaan Rp31.980.514.114,00*

#### C.16 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-

masing adalah sebesar **Rp31.980.514.114,00** dan **Rp30.761.553.144,00**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	Rp 31.206.246.146	Rp 29.969.861.192
Barang untuk Pemeliharaan	Rp 774.267.968	Rp 791.691.952
Jumlah	Rp 31.980.514.114	Rp 30.761.553.144

*Investasi Jangka Panjang  
Non Permanen Lainnya  
Rp1.352.498.396.761,00*

### C.17 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp1.352.498.396.761,00** dan **Rp0,00** Investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut:

No	Satker	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Pusat Investasi Pemerintah	Rp 1.352.498.396.761	Rp -
	Jumlah	Rp 1.352.498.396.761	Rp -

*Piutang Tagihan TP/TGR  
Rp2.151.214.715,00*

### C.18 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp2.151.214.715,00** dan **Rp2.169.578.375,00**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per satker adalah sebagai berikut:

No	Satker	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Kantor pusat DJPb	Rp 1.718.414.309	Rp 89.000.000
2	Kanwil DJPB Prov DKI Jakarta	Rp 355.800.406	Rp 1.718.414.309
3	KPPN Cirebon	Rp 77.000.000	Rp 362.164.066
Jumlah		Rp 2.151.214.715	Rp 2.169.578.375

Terdapat 11 kasus kerugian negara yang belum masuk dalam Laporan Keuangan karena belum diperoleh dokumen pengakuan piutang (SKTM/SKPGR) namun sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan dengan rincian yaitu 9 kasus Banding kepada Presiden dan 2 kasus (Sdr. Bento Barus dan Sdr. Yuni Asih) dengan jumlah saldo sebesar Rp264.280.362,00. Rincian per debitor disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang defisit  
Rp2.074.599.715,00*

### C.19 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp2.074.599.715,00** dan **Rp2,081,023,375**. Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian per debitor disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	Rp 77.000.000	0,5%	Rp 385.000
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 2.074.214.715	100%	Rp 2.074.214.715
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 2.151.214.715		Rp 2.074.599.715



Tanah

Rp9.245.211.622.150,00

**C.20 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp9.245.211.622.150,00** kuantitas 1.712.506 M2 dan **Rp9,250,442,370,270.** kuantitas 1.707.345 M2. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara sedangkan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2018	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tanah	1.711.483	9.250.442.370.270	18.109	13.609.097.880	17.086	18.839.846.000	1.712.506	9.245.211.622.150,00
TANAH PERSIL	1.678.623	9.207.534.483.270	18.109	13.609.097.880	14.586	18.824.169.000	1.682.146	9.202.319.412.150,00
TANAH NON PERSIL	23.277	30.118.809.000	-	-	-	-	23.277	30.118.809.000,00
LAPANGAN	9.583	12.789.078.000	-	-	2.500	15.677.000	7.083	12.773.401.000,00

Peralatan dan Mesin

Rp1.355.084.962.397,00

**C.21 Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp1.355.084.962.397,00** dan **Rp1.165.077.847.255,00** Rekapitulasi Mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2018	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>179.582</b>	<b>1.165.077.847.255</b>	<b>14.390</b>	<b>254.950.287.202</b>	<b>9.211</b>	<b>64.943.172.060</b>	<b>184.761</b>	<b>1.355.084.962.397</b>
ALAT BESAR DARAT	2	45.580.650	-	-	1	44.128.150	1	1.452.500
ALAT BANTU	572	52.388.913.315	45	8.007.511.464	28	3.999.524.370	589	56.396.900.409
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.144	113.807.337.385	100	19.919.166.628	66	4.400.115.578	1.178	129.326.388.435
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	159	162.911.365	7	9.215.000	9	6.436.000	157	165.690.365
ALAT BENGKEL BERMESIN	17	2.038.395.256	7	16.973.000	1	1.650.000	23	2.053.718.256
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	54	115.153.021	2	6.656.900	1	565.000	55	121.244.921
ALAT UKUR	30	111.039.691	1	7.326.000	1	9.790.000	30	108.575.691
ALAT PENGOLAHAN	7	16.161.700	9	16.848.000	1	1.660.000	15	31.349.700
ALAT KANTOR	33.162	120.381.141.230	2.136	18.217.039.697	1.408	9.197.146.520	33.890	129.401.034.407
ALAT RUMAH TANGGA	104.638	234.988.074.525	6.367	29.467.477.538	4.262	7.254.373.172	106.743	257.201.178.891
ALAT STUDIO	4.695	100.943.199.530	457	13.760.918.207	193	6.203.283.532	4.959	108.500.834.205
ALAT KOMUNIKASI	1.860	6.616.136.600	54	233.998.841	91	160.870.405	1.823	6.689.265.036
PERALATAN PEMANCAR	99	24.953.009.127	9	500.390.266	8	1.001.504.500	100	24.451.894.893
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT KEDOKTERAN	203	432.456.843	45	122.773.500	23	40.904.000	225	514.326.343
ALAT KESEHATAN UMUM	2	1.695.000	3	14.277.100	3	14.277.100	2	1.695.000
UNIT ALAT LABORATORIUM	2	32.985.500	11	50.627.600	8	46.863.600	5	36.749.500
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	-	1	3.236.508	1	3.236.508	-	-
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	8.422.000	22	250.100.684	11	91.833.884	12	166.688.800
KOMPUTER UNIT	17.365	207.538.601.887	3.208	37.300.123.248	1.612	17.773.595.266	18.961	227.065.129.869
PERALATAN KOMPUTER	15.484	300.164.563.287	1.843	126.672.013.327	1.455	14.492.912.381	15.872	412.343.664.233
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	-	7	10.443.510	7	10.443.510	-	-
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	1	700.000	-	-	-	-	1	700.000
SUMUR	3	132.330.000	1	39.996.000	-	-	4	172.326.000
ALAT DETEKSI	40	18.000.000	-	-	-	-	40	18.000.000
ALAT PELINDUNG	-	-	10	10.450.000	-	-	10	10.450.000
ALAT SAR	1	2.500.000	18	95.810.000	-	-	19	98.310.000
ALAT KERJA PENERBANGAN	-	-	20	187.728.584	20	187.728.584	-	-
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	8.900.350	-	-	1	330.000	4	8.570.350
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	6.522.750	-	-	-	-	1	6.522.750
PERALATAN OLAH RAGA	35	163.116.243	7	29.185.600	-	-	42	192.301.843

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Barang Milik

Negara.

*Gedung dan Bangunan*  
*Rp1.678.476.219.861,00*

### C.22 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah **Rp1.678.476.219.861,00** dan **Rp1.615.223.326.414,00**

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 31 Desember 2018	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gedung dan Bangunan	3.993	1.615.223.326.414	81	75.962.588.579	69	12.709.695.132	4.005	1.678.476.219.861
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	880	1.238.968.413.851	4	40.757.421.243	6	3.958.544.785	878	1.275.767.290.309
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2.920	344.005.054.917	73	33.287.948.286	58	7.600.599.048	2.935	369.692.404.155
TUGU/TANDA BATAS	193	32.249.857.646	4	1.917.219.050	5	1.150.551.299	192	33.016.525.397

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

*Jalan. Irigasi dan Jaringan*  
*Rp16.236.440.328,00*

### C.23 Jalan. Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp16.236.440.328,00** dan **Rp16,516,438,451**. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan. Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2018	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>1.479.127</b>	<b>8.178.276.128</b>	<b>2.892</b>	<b>202.218.298</b>	<b>5.967</b>	<b>409.366.426</b>	<b>1.476.052</b>	<b>7.971.128.000</b>
JALAN	1.479.050	7.816.890.128	2.892	202.218.298	5.967	409.366.426	1.475.975	7.609.742.000
JEMBATAN	77	361.386.000	-	-	-	-	77	361.386.000
Irigasi	93	3.878.939.995	1	14.570.000	13	87.419.995	81	3.806.090.000
BANGUNAN AIR IRIGASI	8	130.289.000	-	-	-	-	8	130.289.000
BANGUNAN PENGEMBANGAN	1	27.417.000	-	-	-	-	1	27.417.000
BANGUNAN PENGAMAN SUN	1	48.449.000	-	-	-	-	1	48.449.000
BANGUNAN PENGEMBANGA	25	1.032.249.000	1	14.570.000	-	-	26	1.046.819.000
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR	47	1.902.359.995	-	-	13	87.419.995	34	1.814.940.000
BANGUNAN AIR KOTOR	11	738.176.000	-	-	-	-	11	738.176.000
Jaringan	139	4.459.222.328	-	-	-	-	139	4.459.222.328
INSTALASI AIR BERSIH / AIR	27	223.122.950	-	-	-	-	27	223.122.950
INSTALASI PENGOLAHAN SAN	1	5.049.000	-	-	-	-	1	5.049.000
INSTALASI PEMBANGKIT LIST	3	269.408.137	-	-	-	-	3	269.408.137
INSTALASI GARDU LISTRIK	8	955.754.500	-	-	-	-	8	955.754.500
INSTALASI PENGAMAN	1	27.850.000	-	-	-	-	1	27.850.000
INSTALASI LAIN	11	1.142.199.937	-	-	-	-	11	1.142.199.937
JARINGAN AIR MINUM	10	90.088.700	-	-	-	-	10	90.088.700
JARINGAN LISTRIK	64	1.686.426.504	-	-	-	-	64	1.686.426.504
JARINGAN TELEPON	12	42.352.000	-	-	-	-	12	42.352.000
JARINGAN GAS	2	16.970.600	-	-	-	-	2	16.970.600

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Aset Tetap Lainnya  
Rp11.826.309.371,00

## C.24 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah **Rp11.826.309.371,00** dan **Rp9,950,383,521**. Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari transaksi atas Aset Tetap Renovasi sebesar Rp 10.598.808.832,00 dan Nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp1.227.500.539,00 Mutasi transaksi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Aset Tetap Renovasi</b>	<b>11</b>	<b>8.788.257.732</b>	<b>26</b>	<b>5.132.347.471</b>	<b>12</b>	<b>3.321.796.371</b>	<b>25</b>	<b>10.598.808.832</b>
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	6	2.566.564.276	24	4.988.288.721	10	3.177.737.621	20	4.377.115.376
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	2	144.058.750	2	144.058.750	2	144.058.750	2	144.058.750
ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	3	6.077.634.706	-	-	-	-	3	6.077.634.706
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>6.424</b>	<b>1.162.125.789</b>	<b>501</b>	<b>87.506.750</b>	<b>197</b>	<b>22.132.000</b>	<b>6.728</b>	<b>1.227.500.539</b>
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	6.232	698.074.224	488	57.606.750	191	10.311.500	6.529	745.369.474
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	-	-	-	-	-	-	-
KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	86	87.486.050	4	7.260.000	4	3.612.500	86	91.133.550
BARANG BERCORAK KESENIAN	100	310.637.115	9	22.640.000	2	8.208.000	107	325.069.115
ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	6	65.928.400	-	-	-	-	6	65.928.400

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp31.264.180.042,00

## C.25 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp31.264.180.042,00** dan **Rp26.850.109.561,00** saldo konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian per satker Kontruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap defisit  
Rp1.224.575.852.743,00

## C.26 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing defisit **Rp1.224.575.852.743,00** dan **Rp1.064.005.682.714,00**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018. rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Barang Milik Negara.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 1.355.084.962.397	Rp (1.083.013.469.014)	Rp 272.071.493.383,00
2	Gedung dan Bangunan	Rp 1.678.499.222.646	Rp (135.250.699.635)	Rp 1.543.248.523.011,00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 16.236.440.328	Rp (6.207.731.029)	Rp 10.028.709.299,00
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 11.826.309.371	Rp (103.953.065)	Rp 11.722.356.306,00
	Akumulasi Penyusutan	Rp 3.061.646.934.742	Rp (1.224.575.852.743)	Rp 1.837.071.081.999

Aset Tak Berwujud  
Rp517.367.869.108,00

## C.27 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah **Rp517.367.869.108,00** dan **Rp410.408.339.858,00** Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Penyusutan Aset Tak Berwujud berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 berlaku mulai TA 2016. Rincian disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara, rekapitulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Software	Rp 328.942.010.169
2	Lisensi	Rp 188.376.569.939
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 49.289.000
Jumlah		Rp 517.367.869.108

Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Software	5.776	299.921.310.621	30	33.118.950.748	3	4.098.251.200	5.803	328.942.010.169
ASET TAK BERWUJUD	5.776	299.921.310.621	30	33.118.950.748	3	4.098.251.200	5.803	328.942.010.169
Lisensi	37.774	110.437.740.237	794	77.938.829.702	-	-	38.568	188.376.569.939
ASET TAK BERWUJUD	37.774	110.437.740.237	794	77.938.829.702	-	-	38.568	188.376.569.939
Aset Tak Berwujud Lainnya	4	49.289.000	-	-	-	-	4	49.289.000
ASET TAK BERWUJUD	4	49.289.000	-	-	-	-	4	49.289.000

Dana Kelolaan Badan  
Layanan Umum  
Rp2.647.501.603.239,00

### C.28 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Nilai dana kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah **Rp2.647.501.603.239,00** dan **Rp0,00** Saldo tersebut merupakan milik satuan kerja Pusat Investasi Pemerintah. Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan merupakan dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU.

Aset Lain-Lain  
Rp102.681.897.360,00

### C.29 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah **Rp102.681.897.360,00** dan **Rp117.803.438.922,00** Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dalam proses penghapusan dari aplikasi SIMAK-BMN. Rincian disajikan dalam Laporan Keuangan ini, rekapitulasi mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2018		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	28.924	114.272.601.572	10.102	28.913.038.215	12.990	42.982.355.427	26.036	100.203.284.360
TANAH PERSIL	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAT BANTU	64	1.690.032.489	20	917.276.770	31	883.081.575	53	1.724.227.684
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	86	3.202.031.383	58	2.113.421.211	59	3.574.169.788	85	1.741.282.806
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	44	22.226.556	9	6.436.000	12	7.483.466	41	21.179.090
ALAT BENGKEL BERMESIN	3	12.573.750	-	-	2	12.273.750	1	300.000
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6	5.733.000	1	565.000	2	1.058.000	5	5.240.000
ALAT UKUR	20	64.689.200	1	9.790.000	1	18.850	20	74.460.350
ALAT PENGOLAHAN	1	14.301	-	-	1	14.301	-	-
ALAT KANTOR	5.870	14.159.554.452	1.174	2.689.455.685	1.317	3.729.434.586	5.727	13.119.575.551
ALAT RUMAH TANGGA	14.093	18.103.485.014	3.824	5.168.916.717	5.735	6.383.870.830	12.182	16.880.530.901
ALAT STUDIO	1.570	10.641.472.312	104	716.258.080	203	1.050.194.454	1.471	10.307.535.938
ALAT KOMUNIKASI	736	1.402.893.306	84	144.535.405	138	290.542.825	682	1.256.885.886
PERALATAN PEMANCAR	15	737.439.600	4	6.590.500	9	712.414.100	10	31.616.000
ALAT KEDOKTERAN	66	72.575.140	-	-	12	10.843.000	54	61.732.140
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	3.505.000	-	-	-	-	5	3.505.000
KOMPUTER UNIT	2.217	30.115.047.819	593	6.317.335.592	1.054	12.237.729.791	1.756	24.194.653.620
PERALATAN KOMPUTER	3.506	28.755.133.540	997	6.915.178.828	1.433	9.316.431.672	3.070	26.353.880.696
ALAT DETEKSI	1	12.414.600	-	-	-	-	1	12.414.600
ALAT PELINDUNG	1	3.074.500	-	-	-	-	1	3.074.500
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	7.030.000	-	-	1	980.000	1	6.050.000
PERALATAN OLAH RAGA	2	2.682.000	-	-	1	1.700.000	1	982.000
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9	3.643.620.399	2	2.339.621.000	4	2.689.457.000	7	3.293.784.399
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	26	1.385.091.946	10	237.487.000	12	767.113.441	24	855.465.505
TUGU/TANDA BATAS	1	2.493.972	4	1.105.551.299	3	1.071.795.000	2	36.250.271
JALAN	-	-	3.075	207.148.128	2.892	202.218.298	183	4.929.830
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALASI GARDU LISTRIK	2	48.639.050	-	-	1	24.729.050	1	23.910.000
INSTALASI PENGAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALASI LAIN	60	33.261.150	-	-	59	3.000.150	1	30.261.000
JARINGAN LISTRIK	2	18.432.000	-	-	-	-	2	18.432.000
JARINGAN TELEPON	1	2.691.000	-	-	1	2.691.000	-	-
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	461	28.347.920	139	9.060.500	-	-	600	37.408.420
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	42	50.316.000	-	-	-	-	42	50.316.000
KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	5	736.173	1	202.500	5	902.500	1	36.173
BARANG BERCORAK KESENIAN	7	45.364.000	2	8.208.000	2	8.208.000	7	45.364.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	29.280	3.623.077.050	2	197.478.400	14.634	1.249.702.750	14.648	2.570.852.700
ASET TAK BERWUJUD	29.280	3.623.077.050	2	197.478.400	14.634	1.249.702.750	14.648	2.570.852.700

Terdapat perbedaan nilai pada neraca SAPP-A-E1 dengan nilai pada laporan neraca SIMAK-BMN E1, Nilai saldo aset Lain-lain pada Neraca sebesar **Rp102.681.897.360,00** sedangkan pada laporan SIMAK-BMN nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar **Rp102.774.137.060,00** Perbedaan sebesar Rp92.239.700.00 untuk menyajikan nilai yang wajar merupakan Jurnal Penyesuaian aset hilang dengan penjelasan sebagai berikut:

- pada satker Kantor Pusat DJPb sebesar Rp57.759.700,00 merupakan aset hilang sepeda motor dengan rincian sebagai berikut:
  - SKET atas temuan BPK tuntutan ganti rugi aset hilang satu buah sepeda motor nilai buku sebesar Rp15.759.700,00 atas nama Muchidi.
  - Aset hilang dalam proses penghapusan tiga unit sepeda motor

dengan nilai buku @Rp14.000.000,00

b. Perbedaan sebesar Rp34.480.000,00 pada satker KPPN Lhokseumawe atas aset hilang dua buah sepeda motor dengan rincian sebagai berikut:

- Tuntutan ganti rugi atas aset hilang satu buah sepeda motor nilai buku sebesar Rp17.240.000,00 atas nama Arizal/NIP196212271985031004, kerugian negara tersebut telah dilakukan pelunasan secara langsung melalui Bank/Pos Persepsi tanggal 27 Agustus 2013 nomor NTPN 1106031002010007 sebesar Rp11.700.000,00

- Tuntutan ganti rugi atas aset hilang satu buah sepeda motor nilai buku sebesar Rp17.240.000,00 atas nama Ibnu Mas'ud/NIP 198112112002121101, kerugian negara tersebut telah dilakukan pelunasan secara bertahap melalui pemotongan gaji dari bulan Oktober 2011 s.d Desember 2013.

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya defisit  
Rp427.778.134.183,00

### C.30 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp427.778.134.183,00** dan **Rp348.826.256.538,00** Rekapitulasi akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp 517.367.869.108	Rp (328.829.174.535)	Rp 188.538.694.573
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 517.367.869.108</b>	<b>Rp (328.829.174.535)</b>	<b>Rp 188.538.694.573</b>
1	Aset Lain-lain	Rp 102.681.897.360	Rp (98.948.959.648)	Rp 3.732.937.712
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 102.681.897.360</b>	<b>Rp (98.948.959.648)</b>	<b>Rp 3.732.937.712</b>
	<b>Total</b>	<b>Rp 620.049.766.468</b>	<b>Rp (427.778.134.183)</b>	<b>Rp 192.271.632.285</b>

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp22.216.800.846,00

### C.31 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp22.216.800.846,00** dan **Rp892.989.429.436,00** Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan

Keuangan. Rekapitulasi Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp 15.901.000	Rp 113.623.100
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 21.284.038.133	Rp 889.287.445.136
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 208.372.475	Rp 3.588.361.200
5	Dana Pihak Ketiga	Rp 708.489.238	Rp -
Total		Rp 22.216.800.846	Rp 892.989.429.436

*Utang Kelebihan  
Pembayaran Pendapatan  
Rp30.207.658,00*

### C.32 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp30.207.658,00** dan **Rp31.165.804,00**. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan utang satker disebabkan kelebihan terima pelunasan persekot gaji yang merupakan milik satuan kerja Kantor Pusat DJPb.

*Pendapatan Diterima di  
Muka Rp758.267.969,00*

### C.33 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp758.267.969,00** dan **Rp1.163.337.551,00**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNB. Rincian Pendapatan diterima dimuka pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan.

*Uang Muka dari KPPN  
Rp1.054.796,00*

### C.34 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp1.054.796,00** dan **Rp61.459.000,00**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp0,00*

### C.35 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31



Desember 2017 sebesar **Rp0,00** dan **Rp4.344.173,00** Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pajak tersebut yang masih dipegang oleh Bendahara per 31 Desember 2018.

*Utang Jangka Panjang  
BLU kepada BUN  
Rp4.000.000.000.000,00*

### **C.36 Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN**

Nilai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp4.000.000.000.000,00** dan **Rp0,00**. Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan kewajiban atas penerimaan Dana Kelolaan dari BA BUN 999.03. Nilai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan milik satker Pusat Investasi Pemerintah.

*Ekuitas  
Rp32.537.936.499.062,00*

### **C.37 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp32.537.936.499.062,00** dan **Rp22.195.161.238.061,00**

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### Pendapatan PNPB

Rp15.571.011.804.817,00

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp15.571.011.804.817,00** dan **Rp14.788.601.753.715,00** Pendapatan tersebut terdiri dari:

Jenis Pendapatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik(Turun)%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Rp 2.617.234.993	Rp 3.272.594.581	(20,03)
Pendapatan Jasa	Rp 853.210	Rp 6.997.989	(87,81)
Pendapatan Iuran dan Denda	Rp 669.469.193	Rp 1.738.242.286	(61,49)
Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp 1.112.618.240	(100,00)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU	Rp 14.446.979.343.932	Rp 14.277.243.703.515	1,19
Pendapatan BLU Lainnya	Rp 1.120.744.903.489	Rp 505.227.597.104	121,83
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15.571.011.804.817</b>	<b>Rp 14.788.601.753.715</b>	<b>5,29</b>

Pendapatan Pengelolaan BMN adalah merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari pemanfaatan BMN melalui sewa gedung dan bangunan, penjualan peralatan mesin yang telah dihapuskan karena usang dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

### Beban Pegawai

Rp586.920.363.333,00

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp586.920.363.333,00** dan **Rp589.173.561.675,00** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik(Turun)%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 500.860.141.026	Rp 511.734.204.862	(2,12)
Beban Lembur	Rp 35.927.323.700	Rp 40.385.036.000	(11,04)
Beban Gaji dan Tunjangan BLU Sawit	Rp 50.132.898.607	Rp 37.054.320.813	35,30
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 586.920.363.333</b>	<b>Rp 589.173.561.675</b>	<b>(0,38)</b>

### Beban Persediaan

Rp27.832.742.232,00

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp27.832.742.232,00** dan **Rp29.453.151.138,00** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk

barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik(Turun)%
Beban Persediaan bahan baku	Rp 2.925.000	Rp 3.389.000	-13,69
Beban Persediaan konsumsi	Rp 27.828.917.232	Rp 29.448.658.138	-5,50
Beban Persediaan Lainnya	Rp -	Rp 1.104.000	0,00
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	Rp 900.000	Rp -	0,00
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>Rp 27.832.742.232</b>	<b>Rp 29.453.151.138</b>	<b>(5,50)</b>

*Beban Barang dan Jasa*  
*Rp5.783.267.067.556,00*

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp5.783.267.067.556,00** dan **Rp11.616.280.495.236,00** Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik(Turun)%
Beban Barang Operasional	Rp 161.108.418.745	Rp 140.133.895.027	14,97
Beban Barang Non Operasional	Rp 73.193.663.517	Rp 73.803.992.698	-0,83
Beban Jasa	Rp 65.723.075.525	Rp 493.804.260.309	-86,69
Beban Aset Ekstrakomptabel	Rp 674.985.871	Rp 12.968.000	5.105,01
Beban Barang BLU	Rp 5.482.566.923.898	Rp 10.908.525.379.202	-49,74
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.783.267.067.556</b>	<b>Rp 11.616.280.495.236</b>	<b>-50,21</b>

*Beban Pemeliharaan*  
*Rp149.437.265.754,00*

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp149.437.265.754,00** dan **Rp149.237.285.449,00** Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 49.537.937.739	Rp 46.867.160.896	5,70
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 80.111.710	Rp 38.233.100	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 96.109.203.792	Rp 99.596.276.275	-3,50
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	Rp 9.114.827		0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	Rp 1.155.000.000	Rp 899.296.200	28,43
Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp -	Rp 15.000.000	-100,00
Beban Pemeliharaan BLU	Rp 1.255.346.076	Rp 656.087.838	91,34
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp 1.282.411.610	Rp 1.165.231.140	10,06
Beban Persediaan Suku Cadang	Rp 8.140.000	Rp -	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 149.437.265.754</b>	<b>Rp 149.237.285.449</b>	<b>0,13</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp189.451.883.938,00

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp189.451.883.938,00** dan **Rp166.044.939.483,00** Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	Rp 105.515.988.258	Rp 97.319.425.755	8,42
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 7.652.378.740	Rp 6.322.391.500	21,04
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 50.969.525.829	Rp 39.465.081.924	29,15
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 13.564.638.575	Rp 19.142.293.892	(29,14)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	Rp 814.432.000	Rp 295.884.000	175,25
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	Rp 83.797.800	Rp -	0,00
Beban Perjalanan-BLU	Rp 10.851.122.736	Rp 3.499.862.412	210,04
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 189.451.883.938</b>	<b>Rp 166.044.939.483</b>	<b>14,10</b>

Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp273.893.466.342,00

## D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp273.893.466.342,00** dan **Rp250.059.962.269,00** Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Beban dan Penyusutan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 90.262.986.225	Rp 95.350.923.759	-5,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 87.315.795.866	Rp 70.519.968.613	23,82
Beban Penyusutan Jalan Jembatan, Irigasi Jaringan	Rp 2.571.201.205	Rp 2.216.910.619	15,98
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp 9.775.125	Rp 10.997.000	-11,11
Beban Amortisasi Software dan Lisensi	Rp 93.414.094.945	Rp 81.014.649.002	15,31
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 319.612.976	Rp 946.513.276	-66,23
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>Rp 273.893.466.342</b>	<b>Rp 250.059.962.269</b>	<b>9,53</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak tertagih  
defisit Rp3.957.523,00

## D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar defisit **Rp3.957.523,00** dan defisit **Rp9.019.698,00** Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik(Turun)%
Beban penyisihan piutang PNBP	Rp (350.802)	Rp (1.665.414)	-78,94
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp 1.913.340	Rp -	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan/Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	Rp (203.500)	Rp (6.790.384)	-97,00
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	Rp 729.125	Rp -	0,00
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	Rp 377.974	Rp (330.000)	-214,54
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	Rp (6.423.660)	Rp (233.900)	2.646,33
<b>Jumlah</b>	<b>Rp (3.957.523)</b>	<b>Rp (9.019.698)</b>	<b>-56,12</b>

Surplus dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp793.937.344,00

## D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik(Turun)%
Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 1.758.081.694	Rp 798.760.008	120,10
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp (4.149.016.743)	Rp (3.311.089.786)	25,31
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya	Rp 10.010.184.369	Rp 2.906.649.664	244,39
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (6.825.311.976)	Rp (7.465.484.014)	-8,58
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>Rp 793.937.344</b>	<b>Rp (7.071.164.128)</b>	<b>-111,23</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### Ekuitas Awal

Rp22.195.161.238.061,00

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp22.195.161.238.061,00** dan **Rp22.195.161.238.061,00**

### Surplus(defisit) LO

#### Surplus

Rp8.561.006.910.529,00

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah surplus sebesar **Rp8.561.006.910.529,00** dan **Rp1.981.290.214.035,00**. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa,

### Penyesuaian Nilai Tahun

Berjalan Rp0,00

### E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**

### Koreksi Nilai Persediaan

Rp13.512.500,00

### E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp13.512.500,00** dan **Rp7.060.925,00**

### Selisih Revaluasi Aset

Tetap Rp0,00

### E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya, koreksi nilai revaluasi aset tetap pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp7.663.161.660.492,00**

### Koreksi Nilai Aset Tetap

Non Revaluasi defisit

Rp352.414.822,00

### E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan transaksi yang mengkoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan

revaluasi. Koreksi Non Revaluasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar defisit **Rp352.414.822,00** dan surplus **Rp11.774.515.384,00**

**Lain-lain**

Rp35.015.815.582,00

**E.7 Lain-lain**

Koreksi Nilai Lain-lain merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan, Koreksi Nilai Lain-lain untuk tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp35.015.815.582,00** dan defisit **Rp4.129.426.140,00** Rincian Koreksi Lain-lain tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Satker	Keterangan	31 Desember 2018
KPPN Khusus Penerimaan	Koreksi belanja barang yang masih harus dibayarkan ke BA BUN	Rp 32.225.250.000
Pusat Investasi Pemerintah	Koreksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan penyisihan atas investasi jangka panjang non permanen lainnya	Rp 2.735.567.742
Kantor Pusat DJPb	Koreksi penyajian saldo persekot	Rp 54.997.840
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 35.015.815.582</b>

**Transaksi Antar Entitas**

Rp1.747.091.437.212,00

**E.8 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp1.747.091.437.212,00** dan **Rp3.706.337.269.283,00** Akun -akun pembentuk komponen Transaksi Antar Entitas sebagai berikut:

Uraian Akun	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 1.596.092.026.417	Rp 1.730.162.596.384
Diterima dari Entitas Lain	Rp (8.166.721.910)	Rp (12.028.139.651)
Transfer Keluar	Rp (53.894.884.219)	Rp (26.045.062.744)
Transfer Masuk	Rp 213.010.931.924	Rp 14.247.875.294
Setoran Surplus BLU	Rp -	Rp 2.000.000.000.000
Pengesahan Hibah Langsung	Rp 50.085.000	Rp -
	<b>Rp 1.747.091.437.212</b>	<b>Rp 3.706.337.269.283</b>

Penjelasan akun-akun Transaksi Antar Entitas:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto belanja namun tidak termasuk realisasi belanja BPDP Kelapa Sawit;
2. Diterima dari Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto PNBPN namun tidak termasuk realisasi PNBPN BPDP Kelapa sawit;

3. Transfer Keluar merupakan nilai transaksi transfer keluar BMN yang dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
4. Transfer Masuk merupakan nilai transaksi transfer masuk BMN dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
5. Terdapat selisih antara Transfer Keluar dengan Transfer Masuk sebesar Rp159.116.047.705 yang antara lain disebabkan adanya transfer dari dan/atau ke satuan kerja non DJPB dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Transfer ke E1 lain	(12.904.990.275)
2	Transfer dari E1 lain	172.948.060.826
3	Transfer ke E1 lain namun tidak dicatat sebagai transfer masuk oleh E1 lain	(927.022.846)
Total		159.116.047.705

6. Setoran surplus BLU sebesar Rp2T merupakan pengembalian setoran surplus anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang telah disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2016 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 975/KMK.05/2017 tanggal 29 Desember 2017.
7. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi pada satuan kerja KPPN Baturaja sebesar Rp10.195.000,00 dan KPPN Sanggau sebesar Rp39.890.000,00

*Ekuitas Akhir*

*Rp32.537.936.499.062,00*

### **E.9 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp32.537.936.499.062,00** dan **Rp22.195.161.238.061,00**



## PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

#### A. Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Pelaksanaan *Piloting* SAKTI meliputi seluruh modul yang terdapat dalam aplikasi SAKTI yaitu:
  - a. Modul Penganggaran;
  - b. Modul Komitmen;
  - c. Modul Bendahara;
  - d. Modul Pembayaran;
  - e. Modul Persediaan;
  - f. Modul Aset Tetap; dan
  - g. Modul Akuntansi dan Pelaporan.
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada akhir Desember 2016 untuk keperluan pembayaran gaji Januari 2017 telah melaksanakan *Piloting* sentralisasi pembayaran gaji untuk pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan sesuai PER-41/PB/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

#### B. Penyajian Laporan Keuangan

1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan-Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-5992/PB.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Rilis *Update* Aplikasi SAIBA Versi 4.1 dan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi serta Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker telah menerbitkan langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada sistem akuntansi instansi basis akrual tahun 2017, berdasarkan langkah-langkah tersebut satker BLU melakukan penyesuaian pada neraca.
2. Pada Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian kembali (revaluasi) nilai aset sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Gedung dan Bangunan; dan
- c. Jalan, irigasi, dan Jaringan, berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air.

Berdasarkan kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, termasuk dalam ruang lingkup aset tetap yang direvaluasi adalah aset tetap yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.

3. Pada Tahun 2018 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. PIP merupakan satuan kerja unit organisasi non eselon dibidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan

### C. Pengungkapan Satuan Kerja BLU

1. Dana cadangan pada satker BLU BPDPKS adalah dana yang direncanakan untuk menjadi “dana abadi” untuk BPDPKS. Dana cadangan rencana akan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang sehingga BPDPKS perlu menyampaikan izin ke Menteri Keuangan. Izin Menteri Keuangan tersebut terbit melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-469/MK.05/2017 tanggal 5 Juni 2017 hal Persetujuan bagi BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Melakukan Pengelolaan Dana Dalam Bentuk Investasi Jangka Panjang. Namun demikian, sampai saat ini regulasi dan perangkat pendukung untuk melaksanakan investasi jangka panjang tersebut masih dalam proses penyusunan di BPDPKS.

Tahun	Penambahan Nilai Dana Cadangan	Saldo	Keterangan
2015	385.000.000.000	385.000.000.000	Nilai berdasarkan kutipan dari Renstra BPDPKS. Pada saat itu Komite Pengarah belum menetapkan alokasi dana untuk penyaluran maupun cadangan.
2016	19.842.098.910	404.842.098.910	Besaran alokasi dana cadangan baru ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 3% dari dana tersedia untuk disalurkan/program, oleh karena itu nilai dana cadangan tahun 2016 ditetapkan sebesar selisih antara nilai total dana cadangan tahun 2016 dan 2015.
2017	399.000.000.000	803.842.098.910	Besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2017 RBA setara 3% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.

#### D. Pengungkapan Aset Sengketa Dalam Proses Pengadilan

##### 1. Sengketa Tanah dan Bangunan Milik Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur seluas 8.800m<sup>2</sup> di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya senilai Rp48.169.475.000,00

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 8.880 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya, merupakan Aset Tetap yang dimiliki dan dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Kepemilikan tersebut dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 14 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 108/HP/35/1998 tentang Pemberian Hak pakai atas Tanah Negara atas nama Depkeu c.q. DJA.

Perolehan tanah bangunan rumah negara tersebut berdasarkan pembelian DJA yang berasal dari hak yasan (hak milik pribadi/girik) dan *eigendom verponding*, dan telah dibayarkan kepada dua orang yaitu Sdr. Mariyatin B. Suradi seluas 4.575 m<sup>2</sup> (surat pernyataan tanggal 31 Maret 1986) dan Sdr. Sumaji Darmo Suwito seluas 5000 m<sup>2</sup> (surat pernyataan tanggal 31 Maret 1986/tanah telah bersertifikat).

Selanjutnya atas kepemilikan dan hak Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 8.880 m<sup>2</sup> tersebut, terjadi tumpang tindih dengan pihak masyarakat yaitu Hj. Aminah dan menimbulkan sengketa pengadilan. Dalam gugatannya Hj. Aminah menyatakan bahwa belum mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain. Kepemilikan Hj. Aminah dibuktikan dengan Petok D Nomor 446 Persil 28 S.II seluas 6.530 m<sup>2</sup> yang telah dikuasai dan dikelola sebelum tahun 1960.

Gugatan Hj. Aminah tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Berdasarkan putusan Nomor 69/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 20 Juli 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 469.K/TUN/2012 tanggal 25 Februari 2013 diputuskan bahwa sertifikat Nomor 14 milik Kementerian Keuangan dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

Atas keputusan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-818/SJ/2014 tanggal 25 Maret 2014 menyatakan bahwa apabila pembuktian PTUN dokumen pembebasan berupa surat pernyataan pelepasan hak yang telah disampaikan ke BPN pada tahun 1998

tidak diketemukan, maka menjadi tanggung jawab BPN. Kementerian Keuangan tidak dapat serta merta menghapuskan kepemilikan tanah tersebut dan beralih ke Penggugat. Pada saat ini, sengketa tanah di Dukuh Menanggal Surabaya seluas 8.800 M2 milik Kanwil DJPB Jawa Timur ini sudah dalam tahap Kasasi. Kasus ini berproses di pengadilan pada ranah Tata Usaha Negara (TUN). Keputusan akhir menyebutkan agar BPN mencabut sertipikat Hak Pakai No 14 sehingga tanah tersebut tidak bersertipikat, namun kepemilikan masih ada pada kanwil DJPb Prov. Jawa Timur karena putusan TUN tidak memutuskan kepemilikan.

## **2. Sengketa Tanah dan Bangunan Milik Kanwil DJPb Jawa Timur seluas 321m<sup>2</sup> di Jalan Sekolah Nomor 09 Kelurahan Asemrowo Surabaya Senilai Rp3.165.576.000,00**

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 321m<sup>2</sup> di Jalan Sekolah Nomor 09 Kelurahan Asemrowo Surabaya. Aset tetap tersebut dimiliki dan dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHP nomor 02 atas nama DJA yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 108/HP/35/1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang pemberian Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama Depkeu c.q DJA.

Selanjutnya atas Kepemilikan dan hak atas tanah Bangunan Rumah Negara tersebut diakui juga kepemilikannya oleh masyarakat yaitu Sdr. Abdullah Ansori dan menimbulkan sengketa di pengadilan. Dalam gugatan perdata yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, Sdr. Abdullah Ansori menyatakan sebagai pemilik sah berdasarkan bukti kepemilikan SHM Nomor 2613/Kelurahan Asemrowo, surat ukur tanggal 3 Juni 2013 Nomor 362/Asemrowo/2013 seluas 321m<sup>2</sup>.

Atas gugatan Sdr. Abdullah Ansori, PN Surabaya mengabulkan berdasarkan surat putusan nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa Kementerian Keuangan selaku tergugat, tanpa hak mensertifikatkan tanah Asemrowo berupa SHP Nomor 02 atas nama DJA berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 108/HP/35/1998 tanggal 16 Maret 1998, merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kasus Sengketa tanah dan Bangunan di Jln Sekolah No.9 kelurahan Asem Rowo Surabaya milik Kanwil DJPB Jawa

Timur ini merupakan ranah hukum perdata dan pada saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

**3. Sengketa Tanah dan Bangunan Milik Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Seluas 620 m<sup>2</sup> di Kelurahan Tikala Ares Manado Senilai Rp3.883.684.000,00**

Tanah Bangunan seluas 620m<sup>2</sup> di Kelurahan Tikla Ares Manado merupakan aset yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan berdasarkan salinan fotokopi SHP Nomor 81/Desa Tikala tanggal 31 Mei 1974 dan surat ukur Nomor 209/1974 tanggal 30 Mei 1974. Kepemilikan tanah tersebut diklaim juga oleh masyarakat yaitu Sdr. Gerard Cunraad Matheosz yang memiliki bukti kepemilikan berupa SHM asli Nomor 301/Kelurahan Tikala Ares tanggal 16 November 2015, surat ukur nomor 00016/Tikala Ares tanggal 24 Agustus 2015 seluas 637m<sup>2</sup>. Sdr Gerard Cunraad Matheosz bersama orang tuanya telah menguasai dan menduduki tanah tersebut sejak tahun 1967 dan rekening listrik serta PBB atas nama orang tuanya.

Atas kepemilikan ganda tersebut tanah bangunan di Kelurahan Tikal Ares Manado tersebut, Sdr. Gerard Cunraad Matheosz melakukan gugatan kepada Kementerian Keuangan melalui PTUN Manado. Gugatan Sdr. Gerard Cunraad Matheosz tersebut dikabulkan berdasarkan surat putusan PTUN Manado Nomor 41/G/2016/PTUN.MDO tanggal 5 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa SHP Nomor 81/Desa Tikala tanggal 31 Mei 1974, surat ukur Nomor 2019/1974 tanggal 30 Mei 1974 milik Kementerian Keuangan dinyatakan batal dan memerintahkan Kementerian Keuangan mencabut dan mencoret SHP tersebut.

Atas putusan PTUN Manado tersebut, Kementerian Keuangan berupaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Surat Nomor 309//71.600/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017. Adapun dasar Kementerian Keuangan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali karena ditemukannya bukti yang bersifat menentukan yaitu warkah penerbitan tanah berupa:

- a) SHP Nomor 81/Desa Tikala tanggal 31 Mei 1974, surat ukur Nomor 209/1974 tanggal 30 Mei 1974;
- b) Surat Permohonan Hak Pakai oleh Poejiman BS bertindak atas nama Kantor Bendahara Negara Manado;

- c) Surat keterangan pendaftaran tanah nomor 123/Mdo/ket/1974 tanggal 18 Maret 1974;
- d) Gambar Schets;
- e) Risalah pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah di Manado tanggal 2 April 1974;
- f) Ikhtisar tentang permohonan hak pakai tanggal 15 Mei 1974 Nomor 01/HP/1974;
- g) Surat pernyataan tanggal 16 Januari 1974 oleh DJ Harahap Bc. KN selaku wakantor Bendahara Negara.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100	DKI JAKARTA					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	45,157,000	0	45,157,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	0	0	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	70,000,000	33,658,250	0	33,658,250	48.08
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	90,300,000	55,619,464	0	55,619,464	61.59
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	101,489	0	101,489	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	6,363,660	0	6,363,660	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	712,210	0	712,210	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2,000,000	0	0	0	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6,900,000	10,935,000	0	10,935,000	158.48
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	179,200,000	152,547,073	0	152,547,073	29.79
0199	INSTANSI PUSAT					
424136	Pendapatan Investasi	30,000,000,000	31,589,533,397	0	31,589,533,397	105.3
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	10,992,000,000,000	14,413,921,271,119	0	14,413,921,271,119	131.13
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	527,935,354,000	1,103,074,726,390	0	1,103,074,726,390	208.94
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,649,967,292	0	6,649,967,292	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	595,720,743	0	595,720,743	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	350,000,000	1,094,148,888	0	1,094,148,888	312.61
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	696,350,000	1,240,743,547	2,441,714	1,238,301,833	177.83
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	185,000,000	16,700,000	0	16,700,000	9.03
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	191,266,496	0	191,266,496	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	55,000,000	249,250,706	0	249,250,706	453.18
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	273,500,000	217,194,950	0	217,194,950	79.41
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	500,000,000	45,583,719	0	45,583,719	9.12
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	745,150,000	2,629,780,878	2,207,540	2,627,573,338	352.62
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (0199) - INSTANSI PUSAT</b>	<b>11,552,740,354,000</b>	<b>15,561,515,888,125</b>	<b>4,649,254</b>	<b>15,561,511,238,871</b>	<b>141.47</b>
0200	JAWA BARAT					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	23,650,000	0	23,650,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1,225,000	21,225,000	0	21,225,000	1732.65
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	528,990,000	499,012,000	0	499,012,000	94.33
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	100
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	331,898	0	331,898	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	707,000	0	707,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,309,606	0	28,309,606	0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,585,641	0	40,585,641	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	14,000,000	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT</b>	<b>556,215,000</b>	<b>625,821,145</b>	<b>0</b>	<b>625,821,145</b>	<b>214.11</b>
0300	<b>JAWA TENGAH</b>					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	100
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	158,964,699	0	158,964,699	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	39,000,000	119,134,000	0	119,134,000	305.47
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	5,000,000	0	0	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	415,000	1,581,708	0	1,581,708	381.13
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	148,000	692,000	0	692,000	467.57
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1,102,000	8,181,000	0	8,181,000	742.38
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,104,057	0	1,104,057	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH</b>	<b>50,165,000</b>	<b>294,157,464</b>	<b>0</b>	<b>294,157,464</b>	<b>249.57</b>
0400	<b>DI YOGYAKARTA</b>					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1,375,000	112,846,210	0	112,846,210	8207
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	52,800,000	24,856,800	0	24,856,800	47.08

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	479,600	0	479,600	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	200,000	0	0	0	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	150,000	0	150,000	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (0400) - DI YOGYAKARTA</b>	<b>55,375,000</b>	<b>138,332,610</b>	<b>0</b>	<b>138,332,610</b>	<b>1,375.68</b>
0500	<b>JAWA TIMUR</b>					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,621,559	0	6,621,559	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	36,000,000	22,508,095	0	22,508,095	62.52
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20,000,000	1,492,000	0	1,492,000	7.46
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,264,875	0	4,264,875	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	150,000	0	150,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3,000,000	984,000	0	984,000	32.8
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	15,000,000	11,947,870	0	11,947,870	79.65
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR</b>	<b>74,000,000</b>	<b>47,968,399</b>	<b>0</b>	<b>47,968,399</b>	<b>26.06</b>
0600	<b>NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	65,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,500,000	0	0	0	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	376,547	0	376,547	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 5  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4,000,000	0	0	0	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	928,100	0	928,100	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	<b>72,500,000</b>	<b>1,304,647</b>	<b>0</b>	<b>1,304,647</b>	<b>0</b>
0700	<b>SUMATERA UTARA</b>					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	22,600,000	22,600,000	0	22,600,000	100
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	4,410,000	0	4,410,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,500,000	466,240	0	466,240	10.36
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	320,274	0	320,274	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,738,707	0	5,738,707	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (0700) - SUMATERA UTARA</b>	<b>27,100,000</b>	<b>33,535,221</b>	<b>0</b>	<b>33,535,221</b>	<b>22.07</b>
0800	<b>SUMATERA BARAT</b>					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000	100
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	120,000,000	159,211,805	0	159,211,805	132.68
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT</b>	<b>123,250,000</b>	<b>162,461,805</b>	<b>0</b>	<b>162,461,805</b>	<b>116.34</b>
0900	<b>RIAU</b>					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10,577,364	0	10,577,364	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	11,000,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 6  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,000,000	996,000	0	996,000	14.23
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	727,735	0	727,735	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,221,000	0	2,221,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,428,000	0	7,428,000	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	20,000,000	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU</b>	<b>38,000,000</b>	<b>21,950,099</b>	<b>0</b>	<b>21,950,099</b>	<b>2.03</b>
1000	<b>JAMBI</b>					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	39,000,000	43,514,532	0	43,514,532	111.58
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9,000,000	0	0	0	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,363,600	0	12,363,600	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI</b>	<b>48,000,000</b>	<b>55,878,132</b>	<b>0</b>	<b>55,878,132</b>	<b>37.19</b>
1100	<b>SUMATERA SELATAN</b>					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6,000,000	3,200,000	0	3,200,000	53.33
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	10,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,000,000	726,000	0	726,000	24.2
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	95,726	0	95,726	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	703,500	0	703,500	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 7  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN	19,000,000	4,725,226	0	4,725,226	15.51
1200	LAMPUNG					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	14,433,100	14,433,100	0	14,433,100	100
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,100,000	0	1,100,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,500,000	0	0	0	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	48,000,000	32,000,000	0	32,000,000	66.67
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,797,400	0	9,797,400	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	910,000	0	910,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	64,933,100	58,240,500	0	58,240,500	27.78
1300	KALIMANTAN BARAT					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,539,168	0	1,539,168	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,000,000	18,230,000	0	18,230,000	60.77
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	100
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	155,670	0	155,670	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	34,200,000	24,124,838	0	24,124,838	40.19
1400	KALIMANTAN TENGAH					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,920,000	0	3,920,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 8  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,500,000	16,627,000	0	16,627,000	114.67
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	48,241	0	48,241	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,844,800	0	3,844,800	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	22,000,000	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>36,500,000</b>	<b>24,440,041</b>	<b>0</b>	<b>24,440,041</b>	<b>22.93</b>
1500	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	9,787,500	0	9,787,500	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	32,000,000	5,174,000	0	5,174,000	16.17
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	347,473	0	347,473	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>32,000,000</b>	<b>15,308,973</b>	<b>0</b>	<b>15,308,973</b>	<b>5.39</b>
1600	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	12,943,000	0	12,943,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10,500,000	147,100	0	147,100	1.4
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	399,796,000	0	399,796,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3,000,000	578,000	0	578,000	19.27
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,000	0	12,000	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	69,917,933	0	69,917,933	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 9  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	13,500,000	483,394,033	0	483,394,033	3.44
1700	SULAWESI UTARA					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	414,000	0	414,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	0	414,000	0	414,000	0
1800	SULAWESI TENGAH					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,000,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2,000,000	0	0	0	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	100,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH	136,000,000	0	0	0	0
1900	SULAWESI SELATAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,899,999	0	7,899,999	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15,000,000	0	0	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4,330,500	36,542,281	0	36,542,281	843.84
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,268,250	1,414,250	0	1,414,250	111.51
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	20,598,750	45,856,530	0	45,856,530	238.84
2000	SULAWESI TENGGARA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 10  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,525,000	0	2,525,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	70,500,000	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA</b>	<b>70,500,000</b>	<b>2,525,000</b>	<b>0</b>	<b>2,525,000</b>	<b>0</b>
2100	<b>MALUKU</b>					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7,000,000	2,356,000	0	2,356,000	33.66
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12,000,000	0	0	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	11,789,214	0	11,789,214	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	7,000,000	0	0	0	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	41,000,000	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (2100) - MALUKU</b>	<b>67,000,000</b>	<b>14,145,214</b>	<b>0</b>	<b>14,145,214</b>	<b>6.73</b>
2200	<b>BALI</b>					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2,000,000	8,300,830	0	8,300,830	415.04
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12,000,000	227,736	0	227,736	1.9
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	292,690	0	292,690	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	24,000,000	7,198,500	0	7,198,500	29.99
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	622,325	0	622,325	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI</b>	<b>38,000,000</b>	<b>16,642,081</b>	<b>0</b>	<b>16,642,081</b>	<b>89.39</b>



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 11  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
2400	NUSA TENGGARA TIMUR					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	11,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,500,000	0	0	0	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	17,500,000	0	17,500,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,286,362	0	2,286,362	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	300,000	0	300,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	16,500,000	20,086,362	0	20,086,362	0
2500	PAPUA					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	13,051,700	70,801,700	0	70,801,700	542.47
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	63,220,000	0	63,220,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,606,313	0	4,606,313	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2500) - PAPUA	13,051,700	138,628,013	0	138,628,013	180.82
2600	BENGGKULU					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	50,000,000	19,050,000	0	19,050,000	38.1
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	31,775	0	31,775	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,000,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 12  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	56,000,000	19,081,775	0	19,081,775	9.52
2800	MALUKU UTARA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	65,733,900	65,733,900	0	65,733,900	100
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9,500,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,000,000	0	0	0	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	26,000,000	5,061,000	0	5,061,000	19.47
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	102,233,900	70,794,900	0	70,794,900	29.87
2900	BANTEN					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9,000,000	300,000	0	300,000	3.33
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,000,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	818,600	0	818,600	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,251,400	0	2,251,400	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	17,000,000	3,370,000	0	3,370,000	0.67
3100	GORONTALO					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	58,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15,000,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 13  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	2,468	0	2,468	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,565,431	0	4,565,431	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO	73,000,000	4,567,899	0	4,567,899	0
3300	PAPUA BARAT					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,000,000	0	0	0	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	14,000,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5,000,000	0	0	0	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	21,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	47,000,000	0	0	0	0
3400	SULAWESI BARAT					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9,000,000	1,200,000	0	1,200,000	13.33
	JUMLAH PENDAPATAN (3400) - SULAWESI BARAT	9,000,000	1,200,000	0	1,200,000	13.33
3500	KALIMANTAN UTARA					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	5,200,000	0	5,200,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,500,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3500) - KALIMANTAN UTARA	6,500,000	5,200,000	0	5,200,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 15/04/19 5:14 AM  
Halaman : 14  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN	11,554,836,676,450	15,564,002,590,105	4,649,254	15,563,997,940,851	113.11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100	DKI JAKARTA					
015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	0	490,000	0	490,000	0
015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	10,000,000	0	0	0	0
527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	91,000,000	69,579,034	0	69,579,034	76.46
527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	20,000,000	10,658,250	0	10,658,250	53.29
531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	35,700,000	45,180,739	0	45,180,739	126.56
579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	22,500,000	26,639,050	0	26,639,050	118.4
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	179,200,000	152,547,073	0	152,547,073	62.45
0199	INSTANSI PUSAT					
409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	11,507,000,000,000	15,456,480,417,189	0	15,456,480,417,189	134.32
439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	0	8,000,000	0	8,000,000	0
439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0	179,300,969	0	179,300,969	0
440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	42,935,354,000	99,350,801,752	0	99,350,801,752	231.4
527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	2,805,000,000	5,497,368,215	4,649,254	5,492,718,961	195.82
	JUMLAH PENDAPATAN (0199) - INSTANSI PUSAT	11,552,740,354,000	15,561,515,888,125	4,649,254	15,561,511,238,871	112.31
0200	JAWA BARAT					
527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	42,000,000	78,018,774	0	78,018,774	185.76

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	100
527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	469,890,000	485,569,998	0	485,569,998	103.34
527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	0	3,599,791	0	3,599,791	0
527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	4,500,000	0	0	0	0
527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	9,100,000	500,000	0	500,000	5.49
527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	725,000	725,000	0	725,000	100
527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	0	23,650,000	0	23,650,000	0
634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	0	150,000	0	150,000	0
648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	18,000,000	0	0	0	0
652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	0	21,607,582	0	21,607,582	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT	556,215,000	625,821,145	0	625,821,145	44.96
0300	JAWA TENGAH					
451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	0	31,000,000	0	31,000,000	0
527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	0	118,022,374	0	118,022,374	0
527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	34,000,000	30,500,000	0	30,500,000	89.71
527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	5,000,000	35,139,700	0	35,139,700	702.79
527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	0	8,183,057	0	8,183,057	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	563,000	60,836,333	0	60,836,333	10805.74
527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	5,602,000	5,602,000	0	5,602,000	100
648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	5,000,000	4,874,000	0	4,874,000	97.48
	JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH	50,165,000	294,157,464	0	294,157,464	1,474.46
0400	DI YOGYAKARTA					
497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	0	150,000	0	150,000	0
527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	1,375,000	1,375,000	0	1,375,000	100
634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	54,000,000	136,807,610	0	136,807,610	253.35
	JUMLAH PENDAPATAN (0400) - DI YOGYAKARTA	55,375,000	138,332,610	0	138,332,610	117.78
0500	JAWA TIMUR					
451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	0	3,781,000	0	3,781,000	0
527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	6,000,000	5,040,000	0	5,040,000	84
527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	10,500,000	810,000	0	810,000	7.71
527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	5,500,000	1,200,000	0	1,200,000	21.82
527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	0	12,505,095	0	12,505,095	0
527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	49,000,000	10,792,000	0	10,792,000	22.02
527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	0	3,935,875	0	3,935,875	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0	2,520,000	0	2,520,000	0
527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	3,000,000	5,372,429	0	5,372,429	179.08
527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0	116,000	0	116,000	0
634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0	96,000	0	96,000	0
648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0	1,800,000	0	1,800,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	74,000,000	47,968,399	0	47,968,399	26.22
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	71,000,000	273,437	0	273,437	0.39
527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	1,500,000	1,031,210	0	1,031,210	68.75
	JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM	72,500,000	1,304,647	0	1,304,647	34.57
0700	SUMATERA UTARA					
527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0	466,240	0	466,240	0
527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000	100
527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0	189,034	0	189,034	0
527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI SIDEMPUAN	1,000,000	0	0	0	0
527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	3,000,000	4,410,000	0	4,410,000	147
527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0	131,240	0	131,240	0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 5  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000	100
527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	500,000	5,738,707	0	5,738,707	1147.74
	JUMLAH PENDAPATAN (0700) - SUMATERA UTARA	27,100,000	33,535,221	0	33,535,221	186.84
0800	SUMATERA BARAT					
527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	120,000,000	159,211,805	0	159,211,805	132.68
527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000	100
	JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT	123,250,000	162,461,805	0	162,461,805	116.34
0900	RIAU					
527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	28,500,000	10,376,735	0	10,376,735	36.41
527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	2,500,000	0	0	0	0
527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	7,000,000	0	0	0	0
613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0	11,573,364	0	11,573,364	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU	38,000,000	21,950,099	0	21,950,099	9.1
1000	JAMBI					
527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	1,000,000	34,977,300	0	34,977,300	3497.73
527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	3,000,000	0	0	0	0
613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	40,000,000	20,900,832	0	20,900,832	52.25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 6  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	4,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI	48,000,000	55,878,132	0	55,878,132	887.5
1100	SUMATERA SELATAN					
527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	6,000,000	726,000	0	726,000	12.1
527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	6,000,000	3,200,000	0	3,200,000	53.33
527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	7,000,000	0	0	0	0
634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	0	703,500	0	703,500	0
648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0	95,726	0	95,726	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN	19,000,000	4,725,226	0	4,725,226	13.09
1200	LAMPUNG					
528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0	10,897,400	0	10,897,400	0
528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	62,433,100	46,433,100	0	46,433,100	74.37
528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	2,500,000	0	0	0	0
634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	0	910,000	0	910,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	64,933,100	58,240,500	0	58,240,500	18.59
1300	KALIMANTAN BARAT					
528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	19,000,000	18,230,000	0	18,230,000	95.95

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 7  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	0	1,539,168	0	1,539,168	0
528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	15,200,000	4,355,670	0	4,355,670	28.66
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	34,200,000	24,124,838	0	24,124,838	41.54
1400	KALIMANTAN TENGAH					
528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	21,500,000	9,925,241	0	9,925,241	46.16
528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	3,000,000	412,000	0	412,000	13.73
528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	12,000,000	0	0	0	0
613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	14,102,800	0	14,102,800	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	36,500,000	24,440,041	0	24,440,041	14.97
1500	KALIMANTAN SELATAN					
528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	18,000,000	9,787,500	0	9,787,500	54.38
528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	10,000,000	0	0	0	0
528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	4,000,000	5,174,000	0	5,174,000	129.35
648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	0	347,473	0	347,473	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN	32,000,000	15,308,973	0	15,308,973	45.93
1600	KALIMANTAN TIMUR					
528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	3,000,000	469,713,933	0	469,713,933	15657.13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 8  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	10,500,000	3,849,100	0	3,849,100	36.66
613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0	9,831,000	0	9,831,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	13,500,000	483,394,033	0	483,394,033	5,231.26
1700	SULAWESI UTARA					
528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0	309,000	0	309,000	0
635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	0	105,000	0	105,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	0	414,000	0	414,000	0
1800	SULAWESI TENGAH					
528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	30,000,000	0	0	0	0
528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	17,000,000	0	0	0	0
528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	29,500,000	0	0	0	0
528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	6,000,000	0	0	0	0
613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	53,500,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH	136,000,000	0	0	0	0
1900	SULAWESI SELATAN					
528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	40,111,780	0	40,111,780	0
528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	1,052,250	1,052,250	0	1,052,250	100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 9  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	16,330,500	4,476,500	0	4,476,500	27.41
528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	216,000	216,000	0	216,000	100
648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	3,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	20,598,750	45,856,530	0	45,856,530	45.48
2000	SULAWESI TENGGARA					
528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	24,000,000	0	0	0	0
528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	15,000,000	0	0	0	0
613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	31,500,000	2,525,000	0	2,525,000	8.02
	JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA	70,500,000	2,525,000	0	2,525,000	2.67
2100	MALUKU					
528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	39,000,000	0	0	0	0
528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	7,500,000	1,494,660	0	1,494,660	19.93
528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	14,000,000	12,650,554	0	12,650,554	90.36
652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	6,500,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2100) - MALUKU	67,000,000	14,145,214	0	14,145,214	27.57
2200	BALI					
528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	38,000,000	7,718,926	0	7,718,926	20.31

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 10  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	0	8,923,155	0	8,923,155	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	38,000,000	16,642,081	0	16,642,081	10.16
2400	NUSA TENGGARA TIMUR					
528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	10,000,000	17,800,000	0	17,800,000	178
528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0	2,286,362	0	2,286,362	0
528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	3,500,000	0	0	0	0
652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	3,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	16,500,000	20,086,362	0	20,086,362	44.5
2500	PAPUA					
528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	13,051,700	13,051,700	0	13,051,700	100
528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0	125,576,313	0	125,576,313	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2500) - PAPUA	13,051,700	138,628,013	0	138,628,013	50
2600	BENGGKULU					
528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGGKULU	20,000,000	0	0	0	0
528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	1,000,000	0	0	0	0
613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGGKULU	30,000,000	19,081,775	0	19,081,775	63.61
634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	5,000,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 11  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	56,000,000	19,081,775	0	19,081,775	15.9
2800	MALUKU UTARA					
452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	5,000,000	0	0	0	0
528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	31,500,000	5,061,000	0	5,061,000	16.07
662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	65,733,900	65,733,900	0	65,733,900	100
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	102,233,900	70,794,900	0	70,794,900	38.69
2900	BANTEN					
527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	3,000,000	711,400	0	711,400	23.71
634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0	300,000	0	300,000	0
634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	14,000,000	2,358,600	0	2,358,600	16.85
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	17,000,000	3,370,000	0	3,370,000	13.52
3100	GORONTALO					
497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	3,000,000	2,468	0	2,468	0.08
648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	70,000,000	4,565,431	0	4,565,431	6.52
	JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO	73,000,000	4,567,899	0	4,567,899	3.3
3300	PAPUA BARAT					
330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	34,000,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 15/04/19 5:19 AM  
Halaman : 12  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	12,000,000	0	0	0	0
528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	1,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	47,000,000	0	0	0	0
3400	SULAWESI BARAT					
528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	9,000,000	1,200,000	0	1,200,000	13.33
	JUMLAH PENDAPATAN (3400) - SULAWESI BARAT	9,000,000	1,200,000	0	1,200,000	13.33
3500	KALIMANTAN UTARA					
634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	6,500,000	5,200,000	0	5,200,000	80
	JUMLAH PENDAPATAN (3500) - KALIMANTAN UTARA	6,500,000	5,200,000	0	5,200,000	80
	JUMLAH PENDAPATAN	11,554,836,676,450	15,564,002,590,105	4,649,254	15,563,997,940,851	276.087



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 15/04/19 4:20 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	343,071,157,000	362,222,023,000	361,991,021,833	12,892,398	361,978,129,435	99.93	243,893,565
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,889,000	5,221,000	5,073,367	33,065	5,040,302	96.54	180,698
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	18,176,682,000	25,625,000,000	25,592,461,326	4,216,680	25,588,244,646	99.86	36,755,354
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	7,400,104,000	7,300,000,000	7,174,883,468	3,118,703	7,171,764,765	98.24	128,235,235
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,332,440,000	19,600,000,000	19,568,450,000	10,192,000	19,558,258,000	99.79	41,742,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,554,909,000	250,000,000	236,520,000	6,425,000	230,095,000	92.04	19,905,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,083,941,000	775,000,000	755,112,649	0	755,112,649	97.43	19,887,351
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	7,328,623,000	17,414,587,000	17,397,069,120	1,810,500	17,395,258,620	99.89	19,328,380
511129	Belanja Uang Makan PNS	79,584,979,000	58,369,730,000	55,579,318,650	7,108,650	55,572,210,000	95.21	2,797,520,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	75,600,000	60,000,000	57,825,000	400,000	57,425,000	95.71	2,575,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1,350,000,000	1,300,000,000	1,269,440,000	8,365,800	1,261,074,200	97.01	38,925,800
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,697,324,000	14,250,000,000	14,236,380,000	22,828,291	14,213,551,709	99.74	36,448,291
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	496,660,648,000	507,171,561,000	503,863,555,413	77,391,087	503,786,164,326	99.35	3,385,396,674
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	49,855,098,000	39,892,049,000	35,939,861,400	12,894,700	35,926,966,700	90.06	3,965,082,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	49,855,098,000	39,892,049,000	35,939,861,400	12,894,700	35,926,966,700	90.09	3,965,082,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	546,515,746,000	547,063,610,000	539,803,416,813	90,285,787	539,713,131,026	98.67	7350478974
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	88,847,672,000	92,910,714,000	89,736,480,995	6,879,945	89,729,601,050	96.58	3,181,112,950
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,414,741,000	8,864,816,000	8,271,078,559	0	8,271,078,559	93.3	593,737,441
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31,541,460,000	29,658,448,000	29,041,232,827	14,131,500	29,027,101,327	97.87	631,346,673
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	36,258,020,000	36,345,581,000	34,124,844,647	10,058,790	34,114,785,857	93.86	2,230,795,143
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	168,061,893,000	167,779,559,000	161,173,637,028	31,070,235	161,142,566,793	96.06	6,636,992,207
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	75,799,674,000	70,351,126,000	59,635,223,069	5,938,000	59,629,285,069	84.76	10,721,840,931
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,926,436,000	9,116,823,000	8,707,887,148	7,050,000	8,700,837,148	95.44	415,985,852
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,783,549,000	5,630,279,000	5,198,997,250	8,100,000	5,190,897,250	92.2	439,381,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	95,509,659,000	85,098,228,000	73,542,107,467	21,088,000	73,521,019,467	86.42	11,577,208,533
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,113,305,000	31,178,349,000	30,709,238,329	0	30,709,238,329	98.5	469,110,671
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	27,113,305,000	31,178,349,000	30,709,238,329	0	30,709,238,329	98.5	469,110,671
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	40,844,807,000	34,302,854,000	32,168,780,676	5,500	32,168,775,176	93.78	2,134,078,824

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 15/04/19 4:20 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	7,054,144,000	4,436,127,000	3,732,498,379	10,000	3,732,488,379	84.14	703,638,621
522113	Belanja Langganan Air	2,649,567,000	4,130,629,000	3,232,684,731	39,380	3,232,645,351	78.26	897,983,649
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	129,904,000	88,120,000	78,333,141	0	78,333,141	88.89	9,786,859
522131	Belanja Jasa Konsultan	2,130,000,000	1,624,050,000	1,606,152,875	0	1,606,152,875	98.9	17,897,125
522141	Belanja Sewa	24,561,097,000	4,316,231,000	3,790,786,875	2,070,000	3,788,716,875	87.78	527,514,125
522151	Belanja Jasa Profesi	4,572,050,000	3,941,611,000	3,510,447,500	1,700,000	3,508,747,500	89.02	432,863,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	29,365,957,000	18,060,374,000	17,396,851,443	0	17,396,851,443	96.33	663,522,557
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>111,307,526,000</b>	<b>70,899,996,000</b>	<b>65,516,535,620</b>	<b>3,824,880</b>	<b>65,512,710,740</b>	<b>92.41</b>	<b>5,387,285,260</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,105,628,000	50,154,866,000	49,254,382,306	16,200,065	49,238,182,241	98.17	916,683,759
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	60,000,000	67,309,000	49,865,550	0	49,865,550	74.08	17,443,450
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	33,189,000	59,823,000	58,606,710	0	58,606,710	97.97	1,216,290
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99,210,039,000	101,011,987,000	98,985,589,153	2,964,096	98,982,625,057	97.99	2,029,361,943
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	52,000,000	122,340,000	122,287,500	0	122,287,500	99.96	52,500
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara	0	9,116,000	9,114,827	0	9,114,827	99.99	1,173
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	900,000,000	1,214,000,000	1,155,000,000	0	1,155,000,000	95.14	59,000,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>147,360,856,000</b>	<b>152,639,441,000</b>	<b>149,634,846,046</b>	<b>19,164,161</b>	<b>149,615,681,885</b>	<b>98.03</b>	<b>3,023,759,115</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	108,276,140,000	114,889,778,000	105,543,806,308	27,818,050	105,515,988,258	91.84	9,373,789,742
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,051,890,000	9,225,217,000	7,674,028,740	21,650,000	7,652,378,740	82.95	1,572,838,260
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75,081,549,000	55,845,415,000	50,993,400,829	23,875,000	50,969,525,829	91.27	4,875,889,171
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16,347,194,000	13,902,539,000	13,566,746,075	2,107,500	13,564,638,575	97.57	337,900,425
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>208,756,773,000</b>	<b>193,862,949,000</b>	<b>177,777,981,952</b>	<b>75,450,550</b>	<b>177,702,531,402</b>	<b>91.7</b>	<b>16,160,417,598</b>
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	719,946,000	1,088,114,000	814,432,000	0	814,432,000	74.85	273,682,000
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	108,426,000	83,797,800	0	83,797,800	77.29	24,628,200
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242</b>	<b>719,946,000</b>	<b>1,196,540,000</b>	<b>898,229,800</b>	<b>0</b>	<b>898,229,800</b>	<b>75.07</b>	<b>298,310,200</b>
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	92,584,204,000	100,693,552,000	50,132,898,607	0	50,132,898,607	49.79	50,560,653,393
525112	Belanja Barang	16,502,318,000	19,269,390,000	9,659,896,641	0	9,659,896,641	50.13	9,609,493,359
525113	Belanja Jasa	38,470,940,000	45,993,071,000	38,314,570,994	0	38,314,570,994	83.31	7,678,500,006
525114	Belanja Pemeliharaan	1,986,340,000	1,736,135,000	1,255,346,076	0	1,255,346,076	72.31	480,788,924
525115	Belanja Perjalanan	50,857,641,000	49,620,108,000	10,884,443,936	0	10,884,443,936	21.94	38,735,664,064
525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	10,815,000,000,0	10,814,700,000,0	6,276,885,963,44	0	6,276,885,963,44	58.04	4,537,814,036,5
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	43,421,000	2,227,500	0	2,227,500	5.13	41,193,500
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251</b>	<b>11,015,401,443,00</b>	<b>11,032,055,677,00</b>	<b>6,387,135,347,203</b>	<b>0</b>	<b>6,387,135,347,203</b>	<b>57.9</b>	<b>4,644,920,329,7</b>

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 15/04/19 4:20 PM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,774,231,401,00	11,734,710,739,00	7,046,387,923,445	150,597,826	7,046,237,325,619	60.05	4688473413381
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	336,000,000	5,484,032,000	5,451,222,880	0	5,451,222,880	99.4	32,809,120
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	56,278,000	43,800,000	0	43,800,000	77.83	12,478,000
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	39,984,000	38,193,000	0	38,193,000	95.52	1,791,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	336,000,000	5,580,294,000	5,533,215,880	0	5,533,215,880	99.16	47,078,120
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159,425,809,000	209,329,315,000	207,849,117,375	12,662,900	207,836,454,475	99.29	1,492,860,525
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1,200,000,000	1,093,855,427	0	1,093,855,427	91.15	106,144,573
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	159,425,809,000	210,529,315,000	208,942,972,802	12,662,900	208,930,309,902	99.25	1,599,005,098
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,084,718,000	36,613,981,000	36,451,670,818	0	36,451,670,818	99.56	162,310,182
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	32,195,665,000	39,891,491,000	39,285,631,750	3,321,483	39,282,310,267	98.47	609,180,733
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	64,280,383,000	76,505,472,000	75,737,302,568	3,321,483	75,733,981,085	99	771,490,915
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	115,510,681,000	107,268,224,000	107,079,410,108	0	107,079,410,108	99.82	188,813,892
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	115,510,681,000	107,268,224,000	107,079,410,108	0	107,079,410,108	99.82	188,813,892
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	496,200,000	811,430,000	800,373,000	0	800,373,000	98.64	11,057,000
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	100,000,000	385,450,000	327,558,000	0	327,558,000	84.98	57,892,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	596,200,000	1,196,880,000	1,127,931,000	0	1,127,931,000	94.24	68,949,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	340,149,073,000	401,080,185,000	398,420,832,358	15,984,383	398,404,847,975	99.34	2675337025
	JUMLAH BELANJA	12,660,896,220,00	12,682,854,534,00	7,984,612,172,616	256,867,996	7,984,355,304,620	62.96	4,698,499,229,3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
UNIT ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 15/04/19 4:20 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_es1 --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara							
1698	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	18,481,615,000	17,411,412,000	17,192,247,045	350,000	17,191,897,045	98.74	219,514,955
1699	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	7,196,729,000	6,777,999,000	6,725,976,521	325,000	6,725,651,521	99.23	52,347,479
1700	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	7,010,241,000	5,775,963,000	5,726,089,000	7,625,000	5,718,464,000	99	57,499,000
1701	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	11,919,186,000	10,165,010,000	9,600,234,555	300,000	9,599,934,555	94.44	565,075,445
1702	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	26,402,673,000	19,959,475,000	19,590,579,312	3,637,500	19,586,941,812	98.13	372,533,188
1703	Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan	12,705,388,000	12,836,055,000	12,565,561,918	977,500	12,564,584,418	97.89	271,470,582
1704	Pengembangan Sistem Perbendaharaan	254,832,287,000	251,195,081,000	246,592,200,983	332,500	246,591,868,483	98.17	4,603,212,517
1705	Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	398,797,003,000	389,288,438,000	376,460,496,920	111,682,298	376,348,814,622	96.68	12,939,623,378
1706	Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	188,897,237,000	195,112,137,000	187,990,238,527	10,806,411	187,979,432,116	96.34	7,132,704,884
1707	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan	718,361,738,000	736,082,527,000	709,545,301,752	120,831,787	709,424,469,965	96.38	26,658,057,035
1730	Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	294,480,000	294,480,000	0	0	0	0	294,480,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	1,644,898,577,000	1,644,898,577,000	1,591,988,926,533	256,867,996	1,591,732,058,537	88.636	<b>53,166,518,463</b>
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	1,644,898,577,000	1,644,898,577,000	1,591,988,926,533	256,867,996	1,591,732,058,537	88.636	<b>53,166,518,463</b>
06	BADAN LAYANAN UMUM							
09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara							
1730	Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	23,997,643,000	41,252,557,000	23,864,851,447	0	23,864,851,447	57.85	17,387,705,553
5739	Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	10,992,000,000,000	10,992,000,000,000	6,364,398,426,756	0	6,364,398,426,756	57.9	4,627,601,573,244
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	11,015,997,643,000	11,033,252,557,000	6,388,263,278,203	0	6,388,263,278,203	57.875	<b>4,644,989,278,797</b>

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
UNIT ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 15/04/19 4:20 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_es1 --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BADAN LAYANAN UMUM	11,015,997,643,000	11,033,252,557,000	6,388,263,278,203	0	6,388,263,278,203	57.875	<b>4,644,989,278,797</b>
09	HIBAH LUAR NEGERI							
09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara							
1704	Pengembangan Sistem Perbendaharaan	0	4,703,400,000	4,359,967,880	0	4,359,967,880	92.7	343,432,120
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	0	4,703,400,000	4,359,967,880	0	4,359,967,880	92.7	<b>343,432,120</b>
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	0	4,703,400,000	4,359,967,880	0	4,359,967,880	92.7	<b>343,432,120</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,660,896,220,000</b>	<b>12,682,854,534,000</b>	<b>7,984,612,172,616</b>	<b>256,867,996</b>	<b>7,984,355,304,620</b>	<b>84.53</b>	<b>4,698,499,229,380</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 4:21 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	1,054,796	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	208,372,475	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	708,489,238	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	78,579,821,353	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	21,089,319,142,799	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	10,770,467,823	0
0.0	114211	Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	2,857,163,927	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	39,922,005,718	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	75,134,459	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	382,668,000	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	58,999,200	0
0.0	115614	Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima	0	0
0.0	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	145,825,271	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	75,594,841	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	11,236,939
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	1,913,340
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	294,996
0.0	116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	729,125
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	377,974
0.0	117111	Barang Konsumsi	31,206,246,146	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	774,267,968	0
0.0	117114	Suku Cadang	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	117219	Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	1,352,498,396,761	0
0.0	123211	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	0	0
0.0	131111	Tanah	9,245,211,622,150	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,355,084,962,397	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	132311	Peralatan dan Mesin - BLU	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,678,476,219,861	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,971,128,000	0
0.0	134112	Irigasi	3,806,090,000	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 4:21 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	134113	Jaringan	4,459,222,328	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	10,598,808,832	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,227,500,539	0
0.0	135221	Aset Tetap Renovasi - BLU	0	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	31,264,180,042	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,083,013,469,014
0.0	137121	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	0	0
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	135,250,699,635
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	3,988,021,375
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	257,581,973
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,962,127,681
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	103,953,065
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	2,151,214,715	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	2,074,599,715
0.0	162151	Software	328,942,010,169	0
0.0	162161	Lisensi	188,376,569,939	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49,289,000	0
0.0	162211	Software-Badan Layanan Umum	0	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	2,647,501,603,239	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	100,111,044,660	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2,570,852,700	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	96,378,106,948
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	272,449,257,710
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	56,379,916,825
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	2,570,852,700
0.0	169411	Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	0	0
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	15,901,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	21,284,038,133
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	0
0.0	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	208,372,475
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	708,489,238
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219123	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	0	30,207,658
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	758,267,969

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 4:21 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,054,796
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	219962	Utang Perwalian Bendahara yang Belum Disampaikan Kepada yang Berhak	0	0
0.0	219964	Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor	0	0
0.0	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	0	4,000,000,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,596,092,026,417
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,166,721,910	0
0.0	313211	Transfer Keluar	53,894,884,219	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	213,010,931,924
0.0	391111	Ekuitas	0	22,195,161,238,061
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	13,512,500
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	352,414,822	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	35,015,815,582
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	50,085,000
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	424136	Pendapatan Investasi	0	33,058,072,813
3.0	424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	0	14,413,921,271,119
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,120,149,182,746
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,725,562,133
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	595,720,743
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	59,590,100
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	267,416,532
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,490,665,162
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,560,086,607
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,441,714	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	853,210
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	92,920,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	669,319,193
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	150,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	254,988,240
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	313,384,531
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	85,528,393
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	2,341,500
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	2,535,459,572
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	359,455,633,206	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	12,656,171
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,053,182	0



**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 4:21 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	33,065
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	25,385,314,936	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,869,030
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	7,089,874,315	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	2,963,025
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	19,567,910,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	9,652,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	234,872,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	4,777,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	755,112,649	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	17,397,069,120	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	1,810,500
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	55,480,120,150	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	7,108,650
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57,825,000	0
3.1	511135	Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	400,000
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	1,269,440,000	0
3.1	511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	8,365,800
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	14,235,936,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	22,384,291
3.0	512211	Beban Uang Lembur	35,940,218,400	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	12,894,700
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	89,640,135,212	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	6,879,945
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,263,152,694	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	29,041,232,827	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	14,131,500
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	34,194,968,247	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	10,058,790
3.0	521211	Beban Bahan	59,307,867,119	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	5,938,000
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,707,887,148	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	7,050,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	5,198,997,250	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	8,100,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	31,905,572,710	0
3.1	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	5,500
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,661,373,447	0
3.1	522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	10,000
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,226,703,249	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 4:21 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	39,380
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	74,554,641	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,606,152,875	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,360,372,708	0
3.1	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	2,070,000
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,510,447,500	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	1,700,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	17,381,723,275	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49,554,137,804	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	16,200,065
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	80,111,710	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96,112,167,888	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,964,096
3.0	523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	9,114,827	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,155,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	105,543,806,308	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	27,818,050
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,674,028,740	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	21,650,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50,993,400,829	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	23,875,000
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13,566,746,075	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,107,500
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	814,432,000	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	83,797,800	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	50,132,898,607	0
3.0	525112	Beban Barang	8,985,523,545	0
3.0	525113	Beban Jasa	32,202,510,629	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	1,255,346,076	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	10,851,122,736	0
3.0	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	5,441,376,662,224	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2,227,500	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	90,262,986,225	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87,315,795,866	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,327,923,757	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	154,268,796	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	89,008,652	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9,775,125	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	75,824,748,150	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	17,540,554,795	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 4:21 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	48,792,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	319,612,976	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	27,828,917,232	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,282,411,610	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	8,140,000	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	900,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	2,925,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1,964,132,739	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	0	350,802
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1,913,340	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	203,500
3.0	594641	Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	729,125	0
3.0	594791	Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	377,974	0
3.0	594821	Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	0	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	6,423,660
3.0	595111	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah	0	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	674,985,871	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0
3.0	595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	4,149,016,743	0
3.0	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	2,285,805,992	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2,575,373,245	0
<b>JUMLAH</b>			<b>45,299,820,082,382</b>	<b>45,299,820,082,382</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 5:35 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	null	0	0
0.0	115211	null	0	0
0.0	115612	Piutang dari KPPN	4,697,763,466,770	0
0.0	116211	null	0	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	4,009,897,027,011	0
2.0	423129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423141	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423759	Estimasi Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Penerimaan Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423921	Estimasi Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423951	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423952	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423953	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423991	Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Yang Dialokasikan	0	0
2.0	424136	Estimasi Pendapatan Investasi Yang Dialokasikan	30,000,000,000	0
2.0	424138	Estimasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dialokasikan	10,992,000,000,000	0
2.0	424911	Estimasi Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Yang Dialokasikan	527,935,354,000	0
2.0	425119	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya Yang Dialokasikan	14,433,100	0
2.0	425122	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan	110,208,900	0
2.0	425129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Yang Dialokasikan	695,526,700	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	1,900,940,000	0
2.0	425791	Estimasi Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Yang Dialokasikan	268,200,000	0
2.0	425811	Estimasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Yang Dialokasikan	4,745,500	0
2.0	425817	null	0	0
2.0	425911	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	117,616,250	0
2.0	425912	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	322,502,000	0
2.0	425913	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	500,000,000	0
2.0	425991	Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Yang Dialokasikan	967,150,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	362,222,023,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	5,221,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	25,625,000,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	7,300,000,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	19,600,000,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	250,000,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	775,000,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	17,414,587,000

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 5:35 AM  
 lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	58,369,730,000
2.0	511135	Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	60,000,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	1,300,000,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	14,250,000,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	39,892,049,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	92,910,714,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	8,864,816,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	29,658,448,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	36,345,581,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	70,351,126,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	9,116,823,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	5,630,279,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	31,178,349,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	34,302,854,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	4,436,127,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	4,130,629,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	88,120,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	1,624,050,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	4,316,231,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	3,941,611,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	18,060,374,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	50,154,866,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	67,309,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	59,823,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	101,011,987,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	122,340,000
2.0	523124	Allotment Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	0	9,116,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	1,214,000,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	114,889,778,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	9,225,217,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	55,845,415,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	13,902,539,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	1,088,114,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	108,426,000
2.0	525111	Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan	0	100,693,552,000
2.0	525112	Allotment Belanja Barang	0	19,269,390,000
2.0	525113	Allotment Belanja Jasa	0	45,993,071,000
2.0	525114	Allotment Belanja Pemeliharaan	0	1,736,135,000
2.0	525115	Allotment Belanja Perjalanan	0	49,620,108,000

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 5:35 AM  
 lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	525117	Allotment Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	0	10,814,700,000,000
2.0	525119	Allotment Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	43,421,000
2.0	531111	Allotment Belanja Modal Tanah	0	5,484,032,000
2.0	531112	Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	56,278,000
2.0	531115	Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	39,984,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	209,329,315,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1,200,000,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	36,613,981,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	39,891,491,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	107,268,224,000
2.0	537112	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	811,430,000
2.0	537115	Allotment Belanja Modal Lainnya - BLU	0	385,450,000
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
3.0	423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
3.0	424136	Pendapatan Investasi	0	31,589,533,397
3.0	424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	0	14,413,921,271,119
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,103,074,726,390
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,649,967,292
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	595,720,743
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	59,590,100
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	267,416,532
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,490,665,162
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,162,913,692
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,441,714	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	853,210
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	151,983,660
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	669,319,193
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	150,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	268,122,856
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	313,384,531
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	157,191,350
3.0	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	2,629,780,878
3.1	425991	Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2,207,540	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	361,991,021,833	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	12,892,398

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 5:35 AM  
 lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,073,367	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	33,065
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	25,592,461,326	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	4,216,680
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	7,174,883,468	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	3,118,703
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	19,568,450,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	10,192,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	236,520,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	6,425,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	755,112,649	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	17,397,069,120	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,810,500
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	55,579,318,650	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	7,108,650
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57,825,000	0
3.1	511135	Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	400,000
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1,269,440,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	8,365,800
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	14,236,380,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	22,828,291
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	35,939,861,400	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	12,894,700
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	89,736,480,995	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	6,879,945
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,271,078,559	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29,041,232,827	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	14,131,500
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	34,124,844,647	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	10,058,790
3.0	521211	Belanja Bahan	59,635,223,069	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	5,938,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,707,887,148	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	7,050,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,198,997,250	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	8,100,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,709,238,329	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	32,168,780,676	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	5,500



**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 5:35 AM  
 lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,732,498,379	0
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	10,000
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,232,684,731	0
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	39,380
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	78,333,141	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,606,152,875	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,790,786,875	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	2,070,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,510,447,500	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	1,700,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	17,396,851,443	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49,254,382,306	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	16,200,065
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49,865,550	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58,606,710	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98,985,589,153	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,964,096
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122,287,500	0
3.0	523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	9,114,827	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,155,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	105,543,806,308	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	27,818,050
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,674,028,740	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	21,650,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50,993,400,829	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	23,875,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13,566,746,075	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,107,500
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	814,432,000	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	83,797,800	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	50,132,898,607	0
3.0	525112	Belanja Barang	9,659,896,641	0
3.0	525113	Belanja Jasa	38,314,570,994	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	1,255,346,076	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	10,884,443,936	0
3.0	525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	6,276,885,963,449	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2,227,500	0
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	5,451,222,880	0
3.0	531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	43,800,000	0
3.0	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	38,193,000	0



**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 15/04/2019 5:35 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207,849,117,375	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	12,662,900
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,093,855,427	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,451,670,818	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	39,285,631,750	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	3,321,483
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	107,079,410,108	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	800,373,000	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	327,558,000	0
3.0	594211	null	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>28,247,113,992,101</b>	<b>28,247,113,992,101</b>

Pembahasan TP DJPB atas LK BA 01508 TA 2018

No	Temuan	Poin	Uraian Temuan	Tanggapan	Hasil Pembahasan	UIC
21	Pengawasan atas Pelaksanaan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Belum Memadai	a	BPDPKS tidak dapat mengetahui secara pasti dan akurat data piutang penyaluran dana PPKS terhadap pekebun yang mengundurkan diri atau bermasalah;	BPDPKS bersama-sama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan perbaikan SOP dan manual penetapan penerima dana peremajaan (PSR) serta Monev atas dana PSR. Dengan penyempurnaan tersebut maka petani yang mengundurkan diri dan saldo dana peremajaan yang mengendap di rekening petani atau escrow pada Gapoktan/Koperasi dapat dimonitoring setiap saat-periode.	BPDPKS bersama-sama dengan pihak terkait akan melakukan perbaikan SOP dan manual penetapan penerima dana peremajaan (PSR) serta Monev atas dana PSR	BPDPKS
		b	Laporan Keuangan belum bisa menyajikan informasi atas realisasi penyaluran dana PPKS kepada pekebun minimal senilai Rp62.233.279.477,00 (Rp1.982.030.000,00 + Rp60.251.249.477,00).	Terkait hal tersebut, BPDPKS: i. Melakukan jurnal koreksi sebesar Rp1.982.030.000,00 (terlampir); ii. BPDPKS akan menyempurnakan SOP dan manual penetapan penerima dana peremajaan (PSR) serta Monev atas dana PSR. Selain itu BPDPKS bersama-sama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan monev secara tepat, baik jumlah maupun waktu atas dana PSR; iii. BPDPKS akan mengatur mengenai kewajiban pelaporan realisasi penyaluran dana PPKS oleh bank serta pengembalian dana PSR dari petani yang mengundurkan diri ke rekening BPDPKS.	1. BPDPKS akan menyampaikan bukti pengunduran diri pekebun 2. BPDPKS akan mengatur mengenai kewajiban pelaporan realisasi penyaluran dana PPKS oleh bank serta pengembalian dana PSR dari petani yang mengundurkan diri ke rekening BPDPKS.	BPDPKS
22	Pengelolaan Persediaan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Belum Tertib		Pengelolaan Persediaan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Belum Tertib	Sesuai prinsipnya barang persediaan adalah barang habis pakai yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, namun demikian mengingat waktu pengadaan barang persediaan dalam tahun 2018 berbeda-beda, maka sisa neraca persediaan pada akhir tahun tidak nihil dan/atau masih memiliki nilai yang cukup signifikan. Secara umum kantor pusat Ditjen Perbendaharaan terus berupaya untuk berbenah dan memperbaiki pengelolaan barang persediaan yang sangat banyak, bervariasi dan disimpan dalam 3 gudang yang berbeda, hal tersebut antara lain dapat terlihat dengan dilaksanakannya penghapusan barang persediaan dalam 2 tahun terakhir yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Namun demikian terkait permasalahan dalam pengelolaan barang persediaan yang ditemukan, dapat kami berikan tanggapan secara umum bahwa variabel penyebab timbulnya permasalahan selisih tersebut relatif sangat beragam, antara lain seperti: 1. SPMB sebagai dasar pencatatan barang keluar belum dibukukan baik karena terlewat ataupun karena pengembalian dari pihak penerima barang setelah ditandatangani pejabat yang berwenang (yang mengambil fisik barang PPNPN) berlarut-larut 2. Kartu gudang belum diperbarui 3. SPK/BAST penyediaan barang persediaan sejak barang tersebut diterima di gudang relatif lama (+ 1-2 bulan) baik karena bersifat kolektif ataupun merupakan kasbon sambil menunggu proses lelang selesai, terlebih lagi apabila barang yang diterima jumlahnya tidak sekaligus (diciil sesuai kebutuhan mendesak saat itu) 4. Referensi jenis dan satuan barang yang sangat banyak dan/atau bahkan hampir memiliki kemiripan, mengakibatkan kekeliruan operator dalam membukukan transaksi mutasi barang 5. Petugas pemeriksa dari BPK belum mengecek jumlah barang untuk jenis yang sama pada gudang persediaan yang lain, sehingga masih terdapat selisih kurang ataupun beberapa jenis barang yang dinyatakan tidak ditemukan berada pada gudang yang lain 6. Terdapat peremajaan printer yang berimplikasi terhadap toner yang telah di SPMB kan kepada pengguna dan disimpan, dikembalikan/dititip ke gudang persediaan namun tidak dicatat sebagai mutasi masuk kembali 7. Hasil opname fisik akhir tahun 2018 ada yang terlewat untuk dibukukan Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah mencoba memetakan seluruh transaksi persediaan yang ada, dengan hasil sesuai tabel sebagaimana terlampir Berikutnya kami akan lakukan perbaikan dan mitigasi kembali terhadap administrasi pengelolaan barang persediaan milik kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.	DJPB akan memberikan penjelasan terkait perbedaan nilai persediaan dan apabila ada kelemahan maka DJPB melakukan perbaikan sistem pengelolaan persediaan	KP DJPB

Kepala Bagian Aklap (BA 015)

Kasubbag Aklap DJPB

Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi

Ketua Tim BPK RI

Anne Berfiana  
NIP 196506271987032001

Sukadi  
NIP 197206031994021002

Hari Kuncoro  
NIP 197305291994031002

Marius Sirumapea  
NIP 196602161997031002

## TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TA.2012 TERKAIT SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Nomor Temuan	Temuan	Rekomendasi	Action Plan/Tindak lanjut	Status
1.3.6	<p>Terdapat Aset pada Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Pihak Ketiga, Tidak Didukung Dokumen Sertifikat, dan Tidak Diketahui Keberadaannya</p> <p>DJPB berupa: Rumah Dinas Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara yang dikuasai oleh pihak lain sebanyak 11 unit Rumah Dinas Kanwil DJPB Provinsi Papua yang dikuasai oleh pihak lain sebanyak 17 unit</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menkeu memerintahkan: Kuasa Pengguna Barang pada DJPB, DJBC, dan DJP menertibkan aset dikuasai pihak yang tidak berhak;</p>	<p>Jumlah rumah dinas yang masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak sebanyak 11 unit sesuai dengan surat Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Utara Nomor S-308/WPB.29/BG.0103/2015 tanggal 30 Maret 2015.</p> <p><b>update 8 Februari 2018 :</b></p> <p>Rumah Dinas Kanwil DJPb prov Sulut yang masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak sebanyak 9 unit)</p> <p><b>update 17 Juli 2018 :</b></p> <p>Jumlah rumah dinas Kanwil DJPb Prov Sulut yang masih ditempati oleh pihak ketiga sebanyak 9 unit</p> <p><b>update 26 Juli 2018 :</b></p> <p>jumlah rumah dinas Kanwil DJPb Prov Sulut yang berhasil dibebaskan sebanyak 5 unit dari total 12 unit (laporan progress penertiban rumah dinas terlampir)</p> <p><b>update 10 Des 2018 :</b></p>	

jumlah rumah dinas Kanwil DJPb Prov Sulut yang berhasil dibebaskan sebanyak 6 unit dari total 12 unit ( Berita Acara terlampir)

Kanwil DJPb prov Sulut akan menyampaikan penolakan permohonan alih status rumah negara menjadi Gol III kepada para penghuni yang masih menempati rumdin (penyampaian S-3855J/PB.1/2018 tgl 30 April 2018)

update 21 Des 2018 :

Akan dilakukan konfirmasi atas status 17 rumdin di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Papua

update 4 Januari 2019 :

masih terdapat 16 unit rumdin kanwil DJPb Papua yang masih ditempati oleh yg tidak berhak. Kanwil DJPb Prov Papua akan melakukan koordinasi dengan KPKNL Jayapura untuk pengurusan sertifikasi tanah bangunan yang belum memiliki sertifikat

## TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TA.2013 TERKAIT KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor Temuan	Temuan	Rekomendasi	Action Plan/Tindak lanjut	Status
1.1.6	<p>PNBP Dari Denda Keterlambatan Sebesar Rp556,81 Juta, Sewa atas Pemanfaatan BMN sebesar Rp21,87 Juta Belum Dipungut, dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp131,12 Juta Belum Dicairkan</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:</p> <p>b. memerintahkan PPK untuk segera memungut kekurangan penerimaan PNBP sebesar Rp473.471.097,00 (DJPb sebesar Rp 131.123.065) atas denda keterlambatan dan Rp131.123.065,00 atas jaminan pelaksanaan kepada pihak terkait dan menyetorkan ke Kas Negara;</p> <p>c. menginstruksikan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk memerintahkan PPK memberikan sanksi dan memasukkan PT MSN ke dalam daftar hitam</p>	<p><b>DJPB</b></p> <p>KPPN Tangerang telah mengajukan permohonan pencairan jaminan kepada PT. Asuransi Mega Pratama sebanyak 4x (surat terakhir S-1360/WPB.11/KP.127/2014 tgl 23 Juli 2014), namun belum ada tanggapan dan Atas denda keterlambatan, telah dipotong dari tagihan PT. MSN sebesar Rp 3.256.193,00 dan sisa sebesar Rp 127.866.872,00 telah ditagihkan untuk segera disetor ke kas negara. Sampai dengan bulan Oktober 2014, belum ada tanggapan dari PT. Asuransi Mega Pratama.</p> <p>Pihak DJPb telah melakukan perhitungan sisa temuan beserta dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan untuk nilai temuan</p> <p>Untuk jaminan, jaminan pelaksanaan terakhir telah dicairkan. Apakah jaminan pelaksanaan sebelumnya (awal) harus</p>	

dicairkan juga atau seperti apa

Pencairan jaminan pelaksanaan atas keterlambatan sebesar Rp 7.461.000 (sesuai jaminan terakhir. Besaran jaminan berbeda dengan BPK

Telah dilakukan pemutusan kontrak dan mengusulkan PT MSN dimasukkan ke dalam daftar hitam penyedia barang/jasa

Jaminan pelaksanaan telah dicairkan sebesar Rp 7.461.000,- (S-2381/WPb.11/KP.127/2014 tanggal 8 Des 2014). Total denda yang telah disetor sebesar Rp 7.461.000,- (Rp 3.256.193,- + Rp 4.204.807,-) dari jumlah denda yang harus dibayar sebesar Rp 131.123.065,-. Jumlah kekurangan denda yang belum dibayar sebesar Rp 123.662.065,-. Atas kekurangan tagihan tersebut KPPN Tangerang telah mengirimkan kembali surat penagihan kepada PT MSN untuk melakukan pelunasan sisa hutang dengan surat nomor S-422a/WPb.11/KP.127/2015 tanggal 20 Maret 2015 (**sisa hutang sebesar Rp 132.456.825,- terdiri dari kekurangan denda Rp 123.662.065,- dan uang sewa listrik Rp 8.794.760,-**)

update 17 Juli 2018 :

Akan dibahas internal BPK, feedback dari BPK akan disampaikan paling lambat minggu ke-4 bulan Juli 2018

**Update 27 Juli 2018 :**

Hasil pembahasan internal BPK : agar PPK tetap melakukan penagihan kepada pihak terkait. Jika tidak berhasil, sebagaimana peraturan yang berlaku diserahkan ke DJKN (PUPN), namun sebelumnya harus ditetapkan kerugiannya sebagai dasar pencatatan piutang

**Update 11 Okt 2018 :**

Akan dilakukan penagihan kepada pihak rekanan, setelah 3x penagihan akan dilanjutkan dengan pengalihan kepada DJKN (PUPN)

**Update 14 Nov 2018 :**

Telah dikirimkan surat penagihan pertama (S-1052/WPB.11/KP.02/2018 tgl 11 Okt 2018

Telah dikirimkan surat penagihan kedua (S-1182/WPB.11/KP.02/2018 tgl 12 Nov 2018

**Update 21 Des 2018 :**

			<p>Sesuai risalah Rapat PTL dengan BPK, agar dilakukan penagihan ketiga untuk selanjutnya dilimpahkan ke DJKN. Setelah itu status diusulkan selesai.</p> <p>Update 20 Februari 2018 : Telah dilakukan penyerahan pengurusan piutang negara kepada KPKNL Tangerang sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-55/MK.1/2019 tanggal 20 Februari 2019</p>	
1.2.1	<p>Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp3,59 Miliar dan Pembayaran Sebesar Rp1,22 Miliar Tidak Didukung Bukti Pembayaran</p> <p>DJPB berupa Kekurangan volume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renov ruang kerja KPPN Jakarta VI Rp 112,96 juta</li> <li>- Renov ruang kerja KPPN Jakarta VII Rp 123,24 juta</li> </ul> <p>Total yang harus disetor : Rp 236.205.643</p>	<p>memerintahkan PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada satker di lingkungan DJPU, DJPB, DJKN, Setjen, BPPK, DJPK, dan DJBC Kementerian Keuangan sebesar Rp2.343.880.960,08 (Rp417.339.978,91 + Rp1.362.269.736,00 + Rp52.406.245,17 + Rp161.865.000,00 + Rp350.000.000,00)</p>	<p>Kekurangan yang belum disetor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renov ruang kerja KPPN Jakarta VI Rp 112,96 juta</li> <li>- Renov ruang kerja KPPN Jakarta VII Rp 123,24 juta</li> </ul> <p>Kantor Pusat DJPBN telah mengirim surat ke pihak rekanan sebanyak 3x (S-977/PB.15/2014, S-1014/PB.15/2014, dan S-1786/PB.15/2014) dan telah ditanggapi oleh rekanan melalui surat no 25/SU/KR/VI/2014 tgl 26 Juni 2014 yang menyatakan bahwa pihak rekanan masih keberatan dengan nilai perhitungan dari BPK dan meminta perhitungan ulang. Atas tanggapan rekanan, kantor pusat DJPBN telah menyurati ke BPK untuk meminta</p>	On Progress



petunjuk lebih lanjut (S-2402/PB.15/2014 tanggal 01 September 2014), dan terakhir dengan surat nomor S-1754/PB.15/2015 tanggal 18 Agustus 2015, namun belum mendapat jawaban dari BPK. PT Kencana Rodho telah menyetorkan ke kas negara sebesar Rp75.000.000,- tanggal 23 September 2015

**Update Tindak Lanjut (Januari 2017)**

:

1. **DJPB telah mengirimkan surat kepada rekanan dengan nomor S-2765/PB.15/2015 tanggal 25 Nov 2015 tentang Permintaan Penyetoran sisa temuan sebesar Rp 35.621.924,44**
2. **DJPB mengirimkan surat kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu dengan nomor S-2779/PB.14/2015 tanggal 1 Des 2015 tentang Permohonan bantuan ke Rocankeu rencana pengukuran ulang agar daat didampingi ltjen**
3. **DJPB mengirimkan surat kepada rekanan dengan nomor S-993/PB.14/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Permintaan penyetoran sisa temuan**

**Update 04 Juli 2018 :**

1. Telah dilakukan penyetoran sebesar Rp 35.621.924,- pada tanggal 18 Maret 2016 (bukti setor terlampir)
2. DJPB akan menyurati rekanan untuk meminta penyetoran sisa temuan sebanyak 3x, apabila tidak ada tanggapan akan dilimpahkan ke DJKN
3. Telah dikirimkan surat penagihan pertama dengan nomor S-1011/PB.14/2018 terkait Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI Th 2013 (terlampir)

**Update 17 Juli 2018 :**

Akan dilakukan pembahasan internal tim BPK, hasil akan disampaikan paling lambat minggu ke-IV bulan Juli 2018

**Update 27 Juli 2018 :**

Hasil pembahasan internal BPK : agar PPK tetap melakukan penagihan kepada pihak terkait. Jika tidak berhasil, sebagaimana peraturan yang berlaku diserahkan ke DJKN (PUPN), namun sebelumnya harus ditetapkan kerugiannya sebagai dasar pencatatan

piutang

**Update 8 Agustus 2018 :**

Telah dilakukan penagihan ke-2 kpd PT Kencana Rodo dgn surat S-2090/PB.14/2018 tgl 8 Agustus 2018

**Update 18 Sept 2018 :**

Telah dilakukan penagihan ke-3 kpd PT Kencana Rodo dgn surat S-2221/PB.14/2018 tgl 18 September 2018

**Update 21 Des 2018 :**

Sesuai risalah rapat PTL dengan BPK, agar dilakukan pelimpahan piutang ke DJKN, setelah itu diusulkan selesai.

Telah dilakukan penyetoran oleh PT. Kencono Rodho dengan rincian :

- Tanggal 17 Okt 2018 sebesar Rp 15.583.719
- Tanggal 30 Nov 2018 sebesar Rp 15.000.000
- Tanggal 21 Des 2018 sebesar Ro 15.000.000
- Tanggal 31 Jan 2019 sebesar Rp 15.000.000
- Tanggal 28 Feb 2019 sebesar Ro 15.000.000

Jumlah kekurangan yang telah disetor sebesar Rp 186.205.643,- sehingga sisa

kekurangan yang masih harus disetor sebesar Rp 50.000.000 (bukti setor terlampir)

**Update 26 Maret 2019 :**

PT. Kencono Rodo melakukan setoran sebesar Rp 15.000.000,- sehingga jumlah kekurangan yang belum disetor sebesar Rp 35.000.000,- (bukti terlampir)

**NOTA KESEPAKATAN SEMENTARA ANGKA ASERSI  
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ESELON I DITJEN PERBENDAHARAAN (BA 015.08) TAHUN 2018  
YANG DIMASUKKAN DALAM  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2018 (AUDITED)**

Nomor : *NKC-015.08/52/PB.6/2019*

Pada hari ini, **Jumat tanggal 29 Maret 2019**, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Unit Eselon I Ditjen Perbendaharaan (BA 015.08) Tahun 2018**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi sementara atas **Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Unit Eselon I Ditjen Perbendaharaan (BA 015.08) Tahun 2018**.

Nota Kesepakatan Sementara ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi). Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi). Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Nota Kesepakatan ini masih bersifat sementara mengingat beberapa hal yang belum disepakati, yaitu BPK masih melakukan pemeriksaan atas **Persediaan Satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Pengembalian Pendapatan pada Satker BPDP Kelapa Sawit.**

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka **Kementerian Keuangan Unit Eselon I Ditjen Perbendaharaan** akan melakukan pembahasan kembali paling lambat pada tanggal 5 April 2019 sehingga dihasilkan Nota Kesepakatan Final.

Kementerian **Kementerian Keuangan Unit Eselon I Ditjen Perbendaharaan** menyetujui akan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2018 (*Audited*) berdasarkan Nota Kesepakatan Final sebagaimana di atas kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi). Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi). Direktorat Barang Milik Negara) **paling lambat tanggal 18 April 2019.**

**PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI**

Kementerian Keuangan RI,  
(BA 015)

  
Anne Serfiana  
NIP. 196506271987032001

Kepala Bagian Keuangan  
Ditjen Perbendaharaan

  
SEKRETARIAT

Sakop  
NIP. 196811221990011001

Kementerian Keuangan RI,  
Ditjen Kekayaan Negara  
Selaku Tim Penyusun LBMN

  
Ketut Arimbawa  
NIP. 196902241989121001

Kabag Penatausahaan BMN  
Biro Manajemen BMN dan  
Pengadaan

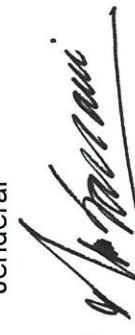


Sumartono  
NIP. 197101051990121003A

Kementerian Keuangan RI,  
Ditjen Perbendaharaan  
Selaku Tim Penyusun LKPP

  
Denny Febriono Singawiria  
NIP. 196502161986031001

Tim Reviu Inspektorat  
Jenderal



M. Kayani  
NIP. 196206151983021001

MENGETAHUI  
Tim Auditor BPK

  
Marius Sirumapea  
NIP. 196602161997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

JURNAL KOREKSI KEMENTERIAN

Kementerian Negara : (015) Keuangan Republik Indonesia  
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perbendaharaan

No :  
Tgl : 31 Desember 2018  
Tgl : 2018

Periode (Bulan) : Desember 2018  
Keterangan :

Jenis  Periode Berjalan  
 Periode Sebelumnya

No	Jenis Koreksi	Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Akun Akruai	Uraian Akun Akruai	Kode Pos Akruai	Akun Kas	Uraian Akun Kas	Kode Anggaran	Kode Pos Kas	Debit	Kredit	Keterangan
1	K	08	528718	KPPN Manokwari	593111	Beban Persediaan konsumsi	LO1212			99	0099	187.500		koreksi nilai persediaan krn perbaikan opname fisik
	K	08	528718	KPPN Manokwari	117111	Barang Konsumsi	NC1171			99	0099		187.500	
2	K	08	528718	KPPN Manokwari	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	LO1214			99	0099	64.000		koreksi nilai persediaan krn perbaikan opname fisik
	K	08	528718	KPPN Manokwari	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	NC1171			99	0099		64.000	
3	B	08	528221	KPPN Samarinda	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LP3005			99	0099	23.002.785		tindak lanjut atas temuan BPK berupa kelebihan realisasi belanja modal TA 2018
	B	08	528221	KPPN Samarinda	133111	Gedung dan Bangunan	NC1331			99	0099		23.002.785	
4	B	08	528221	KPPN Samarinda	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	NC1370			99	0099	230.028		tindak lanjut atas temuan BPK berupa kelebihan realisasi belanja modal TA 2018
	B	08	528221	KPPN Samarinda	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	LO1221			99	0099		230.028	
5	B	08	528221	KPPN Samarinda	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	NC1152			99	0099	23.002.785		tindak lanjut atas temuan BPK berupa kelebihan realisasi belanja modal TA 2018
	B	08	528221	KPPN Samarinda	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LP3005			99	0099		23.002.785	
6	B	08	528221	KPPN Samarinda	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	LO1222			99	0099	115.014		tindak lanjut atas temuan BPK berupa kelebihan realisasi belanja modal TA 2018
	B	08	528221	KPPN Samarinda	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	NC1162			99	0099		115.014	
7	B	08	409999	BPD PKS*)	424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1123			99	0099	20.952.434.729		Restitusi atas perubahan tarif pengenaan tarif 0 (PMK 152/2018)
	B	08	409999	BPD PKS*)	219123	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	NC2191			99	0099		20.952.434.729	
8	B	08	409999	BPD PKS	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			99	0099	165.241.390.000		Penyesuaian beban peremajaan yang masih harus dibayar
	B	08	409999	BPD PKS	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	NC2121			99	0099		165.241.390.000	
9	B	08	409999	BPD PKS	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	NC1157			99	0099	1.982.030.000		Piutang pengembalian belanja peremajaan
	B	08	409999	BPD PKS	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			99	0099		1.982.030.000	
10	B	08	409999	BPD PKS	594641	Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	LO1222			99	0099	9.910.150		Penyisihan piutang tidak tertagih Spermil pengembalian belanja peremajaan
	B	08	409999	BPD PKS	116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	NC1166			99	0099		9.910.150	
11	B	08	409999	BPD PKS	424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1123			99	0099	25.565.880.542		Restitusi atas kelebihan pungutan sebelum PMK 152/2018
	B	08	409999	BPD PKS	219123	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	NC2191			99	0099		25.565.880.542	

No	Jenis Koreksi	Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Akun Akruak	Uraian Akun Akruak	Kode Pos Akruak	Akun Kas	Uraian Akun Kas	Kode Anggaran	Kode Pos Kas	Debit	Kredit	Keterangan
12	B	08	409999	BPDPKS	311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	LO1123			99	0099	5.680.430.778		Koreksi pengembalian pendapatan TAYL pengembalian pendapatan 2015-2017 dibayarkan 2018
	B	08	409999	BPDPKS	424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LP3999			99	0099		5.680.430.778	
<b>J U M L A H</b>												219.478.678.311	219.478.678.311	

\*) masih menunggu kelengkapan dokumen sumber


Tim Auditor BPK

  
Marius Sirumapea  
NIP 196602161997031002

Tim Reviu Inspektorat  
Jenderal

  
M. Kayani  
NIP 196206151983021001

Kepala Bagian Akuntansi dan  
Pelaporan Keuangan


  
Anne Surlaga  
NIP 196506271987032001

Jakarta, 14 Maret 2019  
Kabag Keuangan DJPB

  
Sakop  
NIP 196811221990011001



Kabag Penatausahaan BMN  
Biro Manajemen BMN dan  
Pengadaan


  
Sumartono  
NIP 197101051990121003



Denny F. Singawiria  
NIP 196502161986031001



Selaku Tim Penyusun LBMN

  
Ketut ArimbaWa  
NIP 196902241989121001



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2019  
Direktur Jenderal,



*Marwanto Harjowiryo*  
Marwanto Harjowiryo



**DATA REKENING  
DITJEN PERBENDAHARAAN  
PERIODE 31 Desember 2018**

No	Kd KPPN	BA	Eselon I	KD Satker	Nama Satuan Kerja	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	JENIS REKENING	SURAT IJIN PERSETU	TANGGAL IZIN PEMBUKAAN	Saldo	Ket
1	019	015	08	015114	KPPN JAKARTA VI	1190006833055	RPL 019 KPPN Jakarta VI utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
2	019	015	08	015114	KPPN JAKARTA VI	1190006447211	BPg 019 KPPN Jakarta VI	BANK MA	BPG	S1689/W	23 April 2015		
3	019	015	08	015115	KPPN JAKARTA VII	034001002350306	RPL 019 KPPN Jakarta VII utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
4	019	015	08	015115	KPPN JAKARTA VII	034001001581302	BPg 019 KPPN Jakarta VII	BRI	BPG	S1085/W	20 Maret 2015		
5	019	015	08	015116	KPPN Khusus Penerimaan	1030006842922	RPL 019 KPPN Khusus Penerimaan	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
6	019	015	08	015116	KPPN Khusus Penerimaan	1030006269027	BPg 019 KPPN Khusus Penerimaan	BANK MA	BPG	S2117/W	19 Mei 2015		
7	019	015	08	015117	KPPN Khusus Investasi	50701000230308	RPL 019 KPPN Investasi untuk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
8	019	015	08	015117	KPPN Khusus Investasi	050701000215308	BPg 019 KPPN Khusus Investasi	BRI	BPG	S0770/W	3 Maret 2015		
9	009	015	08	325237	KANWIL DJPBN PROV. KEPULAU	214701000159302	RPL 009 Kanwil Prov Kepri utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
10	009	015	08	325237	KANWIL DJPBN PROV. KEPULAU	017401001325307	BPg 009 Kanwil DJPBN Provinsi	BRI	BPG	S0683/W	3 Juni 2015		
11	065	015	08	330171	KANWIL DJPBN PROV. PAPUA BA	1600002123764	RPL 065 Kanwil Prov Papua utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
12	065	015	08	330171	KANWIL DJPBN PROV. PAPUA BA	1600001183512	BPg 065 Kanwil DJPBN Papua	BANK MA	BPG	S00343/W	19 Maret 2015		
13	178	015	08	340249	KANWIL DJPBN PROV. SULAWES	21801002570309	RPL 178 KANWIL PROV SULAWES	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
14	178	015	08	340249	KANWIL DJPBN PROV. SULAWES	021801001047033	BPg 178 Kanwil Ditjen Perbe	BRI	BPG	S0489/W	9 April 2015		
15	181	015	08	445371	KPPN MUKOMUKO	110101000582308	RPL 181 KPPN MukoMuko utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
16	019	015	08	439165	KSAP	1190004469563	BPg 019 KSAP	BANK MA	BPG	S1175/W	25 Maret 2015		
17	019	015	08	439171	SPAN	1190005361256	BPg 019 SPAN	BANK MA	BPG	S2124/W	19 Mei 2015		
18	181	015	08	445371	KPPN MUKOMUKO	110101000003304	BPg 181 KPPN Mukomuko	BRI	BPG	S063/WP	25 Februari 2015		
19	022	015	08	451531	KPPN BANDUNG II	35401001801303	RPL 022 KPPN Bandung II utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
20	022	015	08	451531	KPPN BANDUNG II	035401000567304	BPg 022 KPPN bandung II	BRI	BPG	S413/WP	2 Maret 2015		
21	026	015	08	451547	KPPN SEMARANG II	8301002270302	RPL 026 KPPN Semarang II utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
22	026	015	08	451547	KPPN SEMARANG II	008301000772308	BPg 026 KPPN Semarang II	BRI	BPG	S539/WP	4 Maret 2015		
23	031	015	08	451553	KPPN SURABAYA II	1420015495640	RPL 031 KPPN Surabaya II utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
24	031	015	08	451553	KPPN SURABAYA II	1420007558157	BPg 031 KPPN Surabaya II	BANK MA	BPG	S505/WP	3 Maret 2015		
25	123	015	08	451562	KPPN MEDAN II	5301004357305	RPL 123 KPPN Medan II utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
26	123	015	08	451562	KPPN MEDAN II	005301001430308	BPg 123 KPPN Medan II	BRI	BPG	S232/WP	31 Maret 2015		
27	136	015	08	451578	KPPN MAKASSAR II	5001002956305	RPL 136 KPPN Makassar II utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
28	136	015	08	451578	KPPN MAKASSAR II	5001000731301	BPg 136 Kantor Pelayanan P	BRI	BPG	S598/WP	19 Maret 2015		
29	178	015	08	451604	KPPN MAMUJU	21801002572301	RPL 178 KPPN Mamuju utk P	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
30	178	015	08	451604	KPPN MAMUJU	021801000321306	BPg 178 Kantor Pelayanan P	BRI	BPG	S0640/W	6 Mei 2015		
31	112	015	08	452878	KPPN TOBELO	1500012218531	RPL 112 KPPN Tobelo utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
32	112	015	08	452878	KPPN TOBELO	1500008809905	BPg 112 KPPN Tobelo	BANK MA	BPG	S535/WP	10 Maret 2015		
33	176	015	08	497587	KPPN WATES	15201000804304	RPL 176 KPPN Wates utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
34	176	015	08	497587	KPPN WATES	015201000248304	BPg 176 KPPN Wates	BRI	BPG	S135/WP	12 Februari 2015		
35	177	015	08	497593	KPPN SINJAI	025801001395300	RPL 177 KPPN Sinjai utk PS T	BRI	RPL	S11382/N	20 Desember 2017		
36	177	015	08	497593	KPPN SINJAI	25801001367307	BPg 177 KPPN Sinjai	BNI	BPG	S213/WP	16 April 2015		Perubahan Rek
37	049	015	08	497607	KPPN BITUNG	16801001229300	RPL 179 KPPN Bitung utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
38	049	015	08	497607	KPPN BITUNG	016801000175304	BPg 179 KPPN Bitung	BRI	BPG	S102/WP	13 Maret 2015		
39	180	015	08	497622	KPPN MARISA	1500012226021	RPL 180 KPPN Marisa utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
40	180	015	08	497622	KPPN MARISA	1500006904518	BPg 180 KPPN Marisa	BANK MA	BPG	S332/WP	8 April 2015		
41	019	015	08	527027	KANWIL DJPBN PROV. DKI JAKA	034001002351302	RPL 019 Kanwil Prov DKI Jkt	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
42	019	015	08	527027	KANWIL DJPBN PROV. DKI JAKA	034001000708309	BPg 019 Kanwil Ditjen PBN D	BRI	BPG	S1024/W	18 Maret 2015		
43	019	015	08	527031	KPPN JAKARTA I	124301000021300	RPL 019 KPPN Jakarta I utk P	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
44	019	015	08	527031	KPPN JAKARTA I	32901001930307	BPg 019 KPPN Jakarta I	BRI	BPG	S1049/W	19 Maret 2015		
45	019	015	08	527048	KPPN JAKARTA II	1030006842161	RPL 019 KPPN Jakarta II utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
46	019	015	08	527048	KPPN JAKARTA II	1190092004637	BPg 019 KPPN Jakarta II	BANK MA	BPG	S0810/W	4 Maret 2015		

No	Kd KPPN	BA	Eselon I	KD Satker	Nama Satuan Kerja	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	JENIS REKENING	SURAT IJIN PERSETU	TANGGAL IZIN PEMBUKAAN	Saldo	Ket
47	019	015	08	527052	KPPN JAKARTA III	34001002349305	RPL 019 KPPN Jakarta III utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
48	019	015	08	527052	KPPN JAKARTA III	034001000935304	BPg 019 KPPN Jakarta III	BRI	BPG	S1078/W	20 Maret 2015		
49	022	015	08	527094	KANWIL DJPBN PROV. JAWA BA	501002363303	RPL 022 Kanwil Prov Jawa Ba	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
50	022	015	08	527094	KANWIL DJPBN PROV. JAWA BA	000501001100304	BPg 022 Kanwil DJPBN PROV	BRI	BPG	S1375/W	11 Juni 2015		
51	022	015	08	527102	KPPN BANDUNG I	76501000024305	RPL 022 KPPN Bandung I utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
52	022	015	08	527102	KPPN BANDUNG I	076501000007303	BPg 022 KPPN bandung I	BRI	BPG	S433/WP	4 Maret 2015		
53	024	015	08	527120	KPPN CIREBON	10701002960305	RPL 024 KPPN Cirebon utk P	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
54	024	015	08	527120	KPPN CIREBON	010701000088301	BPg 024 Kantor Pelayanan P	BRI	BPG	S406/WP	25 Maret 2015		
55	023	015	08	527137	KPPN BOGOR	122401000111307	RPL 023 KPPN Bogor utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
56	023	015	08	527137	KPPN BOGOR	000000120100009302	BPg 023 KPPN Bogor	BRI	BPG	S350/WP	5 Februari 2015		
57	025	015	08	527141	KPPN TASIKMALAYA	10001001873303	RPL 025 KPPN Tasikmalaya u	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
58	025	015	08	527141	KPPN TASIKMALAYA	010001000003303	BPG 025 KPPN TSM	BRI	BPG	S00156/W	06 Februari 2015		
59	021	015	08	527158	KPPN PURWAKARTA	0506173593	RPL 021 KPPN Purwakarta u	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
60	021	015	08	527158	KPPN PURWAKARTA	0187302098	BPg 021 KPPN Purwakarta	BNI	BPG	S225/WP	27 Februari 2015		
61	020	015	08	527162	KPPN SERANG	8401003077303	RPL 020 KPPN Serang utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
62	020	015	08	527162	KPPN SERANG	008401000028305	BPg 020 KPPN Serang	BRI	BPG	S754/WP	27 April 2015		
63	086	015	08	527183	KPPN KARAWANG	11601001491302	RPL 086 KPPN Karawang utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
64	086	015	08	527183	KPPN KARAWANG	0000011601001172306	BPg 086 KPPN Karawang	BRI	BPG	S211/WP	20 Februari 2015		
65	096	015	08	527205	KPPN GARUT	0506297474	RPL 096 KPPN Garut utk PS	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
66	096	015	08	527205	KPPN GARUT	0189366797	BPg 096 KPPN Garut	BNI	BPG	S250/WP	17 Maret 2015		
67	128	015	08	527230	KPPN SUKABUMI	1820001154533	RPL 128 KPPN Sukabumi utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		Perubahan Rek
68	128	015	08	527230	KPPN SUKABUMI	009201000117303	BPg 128 KPPN Sukabumi	BRI	BPG	S200/WP	2 Maret 2015		
69	026	015	08	527268	KANWIL DJPBN PROV. JAWA TEN	8301002268305	RPL 026 Kanwil Prov Jawa Te	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
70	026	015	08	527268	KANWIL DJPBN PROV. JAWA TEN	008301000007305	BPg 026 Kanwil Ditjen Perbe	BRI	BPG	S496/WP	2 Maret 2015		
71	026	015	08	527272	KPPN SEMARANG I	8301002269301	RPL 026 KPPN Semarang I ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
72	026	015	08	527272	KPPN SEMARANG I	008301000003301	BPg 026 KPPN Semarang I	BRI	BPG	S500/WP	2 Maret 2015		
73	028	015	08	527289	KPPN SURAKARTA	9701001470306	RPL 028 KPPN Surakarta utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
74	028	015	08	527289	KPPN SURAKARTA	009701000628304	BPg 028 KPPN Surakarta	BRI	BPG	S270/WP	20 Maret 2015		
75	027	015	08	527293	KPPN PURWOREJO	7801001144301	RPL 027 KPPN Purworejo utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
76	027	015	08	527293	KPPN PURWOREJO	007801000266304	BPg 027 KPPN Purworejo	BRI	BPG	S120/WP	20 Februari 2015		
77	029	015	08	527301	KPPN PURWOKERTO	7701001436306	RPL 029 KPPN Pthwokerlo u	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
78	029	015	08	527301	KPPN PURWOKERTO	007701000028304	BPg 029 KPPN Purwokerto	BRI	BPG	S153/WP	25 Februari 2015		
79	072	015	08	527315	KPPN PEKALONGAN	505961336	RPL 072 KPPN Pekalongan u	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
80	072	015	08	527315	KPPN PEKALONGAN	186989964	BPg 072 Kantor Pelayanan P	BNI	BPG	S169/WP	13 Februari 2015		
81	097	015	08	527322	KPPN PATI	6601002101305	RPL 097 KPPN Pati utk PS TK	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
82	097	015	08	527322	KPPN PATI	006601000063307	BPg 097 KPPN Pati	BRI	BPG	S204/WP	12 Maret 2015		
83	129	015	08	527336	KPPN KUDUS	506382654	RPL 129 KPPN Kudus utk PS	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
84	129	015	08	527336	KPPN KUDUS	0211159325	BPg 129 KPPN Kudus	BNI	BPG	S294/WP	5 Maret 2015		
85	115	015	08	527340	KPPN MAGELANG	153301000026301	RPL 115 KPPN Magelang utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
86	115	015	08	527340	KPPN MAGELANG	004801000002303	BPg 115 KPPN Magelang	BRI	BPG	S261/WP	9 maret 2015		
87	118	015	08	527357	KPPN TEGAL	1390066060660	RPL 118 KPPN Tegal utk PS T	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
88	118	015	08	527357	KPPN TEGAL	1390002016974	BPg 118 KPPN Tegal	BANK MA	BPG	S203/WP	6 Maret 2015		
89	130	015	08	527361	KPPN CILACAP	505926426	RPL 130 KPPN Cilacap utk PS	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
90	130	015	08	527361	KPPN CILACAP	0185612659	BPg 130 KPPN Cilacap	BNI	BPG	S111/WP	4 Februari 2015		
91	030	015	08	527399	KPPN YOGYAKARTA	1370012911760	RPL 030 KPPN Yogyakarta ut	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
92	030	015	08	527399	KPPN YOGYAKARTA	1370010647804	BPg 030 KPPN Yogyakarta	BANK MA	BPG	S1065/W	18 Februari 2015		
93	031	015	08	527411	KANWIL DJPBN PROV. JAWA TIM	1400016219587	RPL 031 Kanwil Prov Jawa Ti	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
94	031	015	08	527411	KANWIL DJPBN PROV. JAWA TIM	1400009746067	BPg 031 Kanwil Ditjen Perbe	BANK MA	BPG	S403/WP	18 Februari 2015		
95	031	015	08	527425	KPPN SURABAYA I	1400016221336	RPL 031 KPPN Surabaya I ut	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
96	031	015	08	527425	KPPN SURABAYA I	1400009718256	BPg 031 KPPN Surabaya I	BANK MA	BPG	S348/WP	16 Februari 2015		
97	032	015	08	527432	KPPN MALANG	1440016405356	RPL 032 KPPN Malang utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
98	032	015	08	527432	KPPN MALANG	1440010470141	BPg 032 KPPN Malang	BANK MA	BPG	S2875/W	5 Februari 2015		
99	034	015	08	527446	KPPN KEDIRI	3301003484307	RPL 034 KPPN Kediri utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		

No	Kd KPPN	BA	Eselon I	KD Satker	Nama Satuan Kerja	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	JENIS REKENING	SURAT IJIN PERSETU	TANGGAL IZIN PEMBUKAAN	Saldo	Ket
100	034	015	08	527446	KPPN KEDIRI	0000003301001575306	BPg 034 KPPN Kediri	BRI	BPG	S0157/W	25 februari 2015		
101	033	015	08	527450	KPPN MADIUN	1710002576802	RPL 033 KPPN Madiun utk P	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
102	033	015	08	527450	KPPN MADIUN	1440010671565	BPg 033 KPPN Madiun	BANK MA	BPG	S259/WP	6 Februari 2015		
103	035	015	08	527467	KPPN BONDOWOSO	1301001593308	RPL 035 KPPN Bondowoso u	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
104	035	015	08	527467	KPPN BONDOWOSO	001301000394303	BPg 035 KPPN Bondowoso	BRI	BPG	S171/WP	5 februari 2015		
105	036	015	08	527471	KPPN PAMEKASAN	6101002803305	RPL 036 KPPN Pamekasan ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
106	036	015	08	527471	KPPN PAMEKASAN	006101000148301	BPg 036 KPPN Pamekasan	BRI	BPG	S305/WP	10 Maret 2015		
107	073	015	08	527488	KPPN BOJONEGORO	1101002049304	RPL 073 KPPN Bojonegoro u	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
108	073	015	08	527488	KPPN BOJONEGORO	001101000127300	BPg 098 KPPN Bojonegoro	BRI	BPG	S151/WP	24 februari 2015		
109	100	015	08	527492	KPPN BANYUWANGI	701002141301	RPL 100 KPPN Banyuwangi	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
110	100	015	08	527492	KPPN BANYUWANGI	000701000004309	BPg 100 KPPN Banyuwangi	BRI	BPG	S0060/W	9 februari 2015		
111	098	015	08	527500	KPPN MOJOKERTO	5501001843305	RPL 098 KPPN Mojokerto ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
112	098	015	08	527500	KPPN MOJOKERTO	1420016858804	BPg 098 KPPN Mojokerto	BRI	BPG	S155/WP	18 Februari 2015		
113	099	015	08	527514	KPPN PACITAN	6701002163301	RPL 099 KPPN Pacitan utk P	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
114	099	015	08	527514	KPPN PACITAN	000006701001140300	BPg 099 KPPN Pacitan	BRI	BPG	S104/WP	4 Maret 2015		
115	131	015	08	527521	KPPN JEMBER	2101001905306	RPL 131 KPPN Jember utk P	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
116	131	015	08	527521	KPPN JEMBER	002101000044301	BPg 131 KPPN Jember	BRI	BPG	S266/WP	12 Maret 2015		
117	001	015	08	527556	KANWIL DJPBN PROV. ACEH	131101000185309	RPL 001 Kanwil Prov Aceh ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
118	001	015	08	527556	KANWIL DJPBN PROV. ACEH	003701000072301	BPg 001 Kanwil Ditjen Perbe	BRI	BPG	S1466/W	29 Juni 2015		
119	001	015	08	527560	KPPN BANDA ACEH	131101000184303	RPL 001 KPPN Banda Aceh u	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
120	001	015	08	527560	KPPN BANDA ACEH	003701000074303	BPg 001 KPPN Banda Aceh	BRI	BPG	S622/WP	9 April 2015		
121	003	015	08	527577	KPPN MEULABOH	1580003351533	RPL 003 KPPN Meulaboh utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
122	003	015	08	527577	KPPN MEULABOH	1580000888321	BPg 003 KPPN Meulaboh	BANK MA	BPG	S238/WP	10 Maret 2015		
123	002	015	08	527581	KPPN LANGSA	1580038888814	RPL 002 KPPN Langsa utk P	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
124	002	015	08	527581	KPPN LANGSA	1580007777717	BPg 002 KPPN Langsa	BANK MA	BPG	S138/WP	13 Maret 2015		
125	074	015	08	527598	KPPN TAPAKTUAN	26401000991304	RPL 074 KPPN Tapaktuan ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
126	074	015	08	527598	KPPN TAPAKTUAN	26401000008305	BPg 074 KPPN Tapaktuan	BRI	BPG	S120/WP	2 Maret 2015		
127	089	015	08	527603	KPPN LHOKEUMAWE	1580003352812	RPL 089 KPPN Lhokseumawe	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
128	089	015	08	527603	KPPN LHOKEUMAWE	1580000803817	BPg 089 KPPN Lhokseumaw	BANK MA	BPG	S119/WP	5 Februari 2015		
129	105	015	08	527610	KPPN KUTACANE	26301001719303	RPL 105 KPPN Kutacane utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
130	105	015	08	527610	KPPN KUTACANE	026301000921305	BPg 105 KPPN Kutacane	BRI	BPG	S319/WP	13 Februari 2015		
131	122	015	08	527624	KPPN TAKENGON	1580003352978	RPL 122 KPPN Takengon utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
132	122	015	08	527624	KPPN TAKENGON	1580000761254	BPg 122 KPPN Takengon	BANK MA	BPG	S0189/W	24 Februari 2015		
133	123	015	08	527645	KANWIL DJPBN PROV. SUMATERA	005301004358301	RPL 123 Kanwil Prov Sumut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
134	123	015	08	527645	KANWIL DJPBN PROV. SUMATERA	005301000002306	BPg 123 Kanwil DJPBN Prov	BRI	BPG	S522/WP	12 Mei 2015		
135	123	015	08	527652	KPPN MEDAN I	5301004356309	RPL 123 KPPN Medan I utk P	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
136	123	015	08	527652	KPPN MEDAN I	005301000003302	BPg 123 KPPN Medan I	BRI	BPG	S365/WP	21 April 2015		
137	005	015	08	527666	KPPN PEMATANG SIANTAR	11301001817302	RPL 005 KPPN P Siantar utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
138	005	015	08	527666	KPPN PEMATANG SIANTAR	011301000085300	BPg 005 KPPN Pematangsiar	BRI	BPG	S000206/	20 Februari 2015		
139	006	015	08	527670	KPPN PADANG SIDEMPUAN	13501003198300	RPL 006 KPPN Padang Siden	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
140	006	015	08	527670	KPPN PADANG SIDEMPUAN	013501000099303	BPg 006 KPPN Padang siden	BRI	BPG	S00145/W	28 Januari 2015		
141	007	015	08	527687	KPPN GUNUNG SITOLI	17601001272308	RPL 007 KPPN Gunung Sitoli	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
142	007	015	08	527687	KPPN GUNUNG SITOLI	017601000378305	BPg 007 KPPN Gunung Sitoli	BRI	BPG	S000195/	1 April 2015		
143	076	015	08	527691	KPPN TANJUNG BALAI	15401000874307	RPL 076 KPPN Tanjungbalai	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
144	076	015	08	527691	KPPN TANJUNG BALAI	0000015401000011307	BPg 076 KPPN TJ Balai	BRI	BPG	S157/WP	23 Februari 2015		
145	075	015	08	527709	KPPN RANTAU PRAPAT	22801001431301	RPL 075 KPPN Rantau Prapa	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
146	075	015	08	527709	KPPN RANTAU PRAPAT	22801000005301	BPg 075 KPPN Rantauprapat	BRI	BPG	S140/WP	12 Maret 2015		
147	007	015	08	527713	KPPN SIBOLGA	1061061089	RPL 106 KPPN Sibolga utk P	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
148	007	015	08	527713	KPPN SIBOLGA	1061061090	BPg 106 KPPN Sibolga	BNI	BPG	S0061/W	10 Februari 2015		
149	119	015	08	527734	KPPN SIDIKALANG	19401001860303	RPL 119 KPPN Sidikalang utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
150	119	015	08	527734	KPPN SIDIKALANG	019401000158305	BPg 119 KPPN Sidikalang	BRI	BPG	S272/WP	18 Maret 2015		
151	124	015	08	527741	KPPN TEBING TINGGI	28301000795302	RPL 124 KPPN Tebing Tinggi	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
152	124	015	08	527741	KPPN TEBING TINGGI	028301000147305	BPg 124 KPPN Tebing Tinggi	BRI	BPG	S238/WP	18 Maret 2015		

No	Kd KPPN	BA	Eselon I	KD Satker	Nama Satuan Kerja	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	JENIS REKENING	SURAT IJIN PERSETU	TANGGAL IZIN PEMBUKAAN	Saldo	Ket
153	125	015	08	527755	KPPN BALIGE	31401001174306	RPL 125 KPPN Balige utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
154	125	015	08	527755	KPPN BALIGE	031401000127306	BPg 125 KPPN Balige	BRI	BPG	S0332/W	11 Maret 2015		
155	010	015	08	527776	KANWIL DJPBN PROV. SUMATE	66901000408303	RPL 010 Kanwil Prov Sumbang	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
156	010	015	08	527776	KANWIL DJPBN PROV. SUMATE	66901000230302	BPg 010 Kanwil DJPBN Prov.	BRI	BPG	S1165/W	22 Juni 2015		
157	010	015	08	527780	KPPN PADANG	5801003009307	RPL 010 KPPN Padang utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
158	010	015	08	527780	KPPN PADANG	005801000099303	BPg 010 KPPN Padang	BRI	BPG	S314/WP	13 Februari 2015		
159	011	015	08	527797	KPPN BUKIT TINGGI	1501001614306	RPL 011 KPPN Bukittinggi ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
160	011	015	08	527797	KPPN BUKIT TINGGI	001501000559309	BPg 011 KPPN Bukit Tinggi	BRI	BPG	S170/WP	16 Februari 2015		
161	125	015	08	527802	KPPN SIJUNJUNG	27101000942306	RPL 077 KPPN Sijunjung utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
162	125	015	08	527802	KPPN SIJUNJUNG	027101000078301	BPg 077 KPPN Sijunjung	BRI	BPG	S61/WPB	29 Januari 2015		
163	125	015	08	527819	KPPN SOLOK	9101001653308	RPL 090 KPPN Solok utk PS T	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
164	125	015	08	527819	KPPN SOLOK	009101000203304	BPg 090 KPPN Solok	BRI	BPG	S172/WP	16 April 2015		
165	091	015	08	527823	KPPN LUBUK SIKAPING	26901001291309	RPL 091 KPPN Lubuk Sikapin	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
166	091	015	08	527823	KPPN LUBUK SIKAPING	026901000121307	BPG 091 KPPN Lubuk Sikapir	BRI	BPG	S114/WP	10 Februari 2015		
167	008	015	08	527844	KPPN PEKANBARU	506234548	RPL 008 KPPN Pekanbaru ut	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
168	008	015	08	527844	KPPN PEKANBARU	0201119859	Bpg 008 KPPN Pekanbaru	BNI	BPG	S712/WP	20 Februari 2015		
169	009	015	08	527851	KPPN TANJUNG PINANG	0505833916	RPL 009 KPPN Tanjung Pinar	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
170	009	015	08	527851	KPPN TANJUNG PINANG	0185547778	BPg 009 KPPN Tanjung Pinar	BNI	BPG	S0576/W	13 Mei 2015		
171	092	015	08	527865	KPPN RENGAT	506145759	RPL 092 KPPN Rengat utk TK	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
172	092	015	08	527865	KPPN RENGAT	0186862766	BPg 092 KPPN Rengat	BNI	BPG	S162/WP	4 Februari 2015	387.875	
173	120	015	08	527872	KPPN DUMAI	1720000785784	RPL 120 KPPN Dumai utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
174	120	015	08	527872	KPPN DUMAI	1080011266898	BPg 120 KPPN Dumai	BANK MA	BPG	S316/WP	16 februari 2015		
175	012	015	08	527890	KPPN JAMBI	002001003750305	RPL 012 KPPN Jambi utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
176	012	015	08	527890	KPPN JAMBI	002001000003301	BPG 012 KPPN Jambi	BRI	BPG	S346/WP	10 Februari 2015		
177	012	015	08	527908	KPPN SUNGAI PENUH	11701002224304	RPL 013 KPPN Sungai Penuh	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		Perubahan Rek
178	012	015	08	527908	KPPN SUNGAI PENUH	11701000023304	Bpg(013) KPPN Sungai Penu	BRI	BPG	S374/WP	23 Juni 2015		
179	078	015	08	527912	KPPN MUARA BUNGO	016001003409302	RPL 078 KPPN Muara Bungo	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
180	078	015	08	527912	KPPN MUARA BUNGO	016001001873301	BPG 078 KPPN Muara Bungo	BRI	BPG	S0341/W	27 Maret 2015		
181	014	015	08	527933	KANWIL DJPBN PROV. SUMATE	1120069039704	RPL 014 Kanwil Prov Sumsel	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
182	014	015	08	527933	KANWIL DJPBN PROV. SUMATE	1120006903970	BPg 014 Kanwil DJPBN Prov	BANK MA	BPG	S1736/W	29 Juni 2015		
183	014	015	08	527940	KPPN PALEMBANG	1120011986242	RPL 014 KPPN Palembang ut	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
184	014	015	08	527940	KPPN PALEMBANG	1120006636547	BPg 014 KPPN Palembang	BANK MA	BPG	S1754/W	30 Juni 2015		
185	015	015	08	527954	KPPN PANGKAL PINANG	006301001949300	RPL 015 KPPN Pangkal Pinar	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
186	015	015	08	527954	KPPN PANGKAL PINANG	006301000698304	BPg 015 KPPN Pangkalpina	BRI	BPG	S1169/W	18 Juni 2015	56.720.000	
187	070	015	08	527961	KPPN LUBUK LINGGAU	1130011718271	RPL 070 KPPN Lubuk Linggau	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
188	070	015	08	527961	KPPN LUBUK LINGGAU	1120006691633	BPg 070 KPPN Lubuk Linggau	BANK MA	BPG	S214/WP	20 Mei 2015		
189	109	015	08	527975	KPPN BATURAJA	801001958301	RPL 109 KPPN Baturaja utk F	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		Perubahan Rek
190	109	015	08	527975	KPPN BATURAJA	1120006748110	BPg 109 KPPN Baturaja	BANK MA	BPG	S134/WP	12 Februari 2015		
191	107	015	08	527982	KPPN TANJUNG PANDAN	013101001221305	RPL 107 KPPN Tanjung pand	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
192	107	015	08	527982	KPPN TANJUNG PANDAN	013101000019307	BPg 107 KPPN Tanjung Pand	BRI	BPG	S560/WP	27 Februari 2015		
193	017	015	08	528001	KANWIL DJPBN PROV. LAMPUNG	1140012347988	RPL 017 Kanwil Prov Lampung	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
194	017	015	08	528001	KANWIL DJPBN PROV. LAMPUNG	1140004950492	BPg 017 Kanwil DJPB Prov. L	BANK MA	BPG	S1415/W	17 April 2015		
195	017	015	08	528015	KPPN BANDAR LAMPUNG	1140012347996	RPL 017 KPPN Bandar Lampu	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
196	017	015	08	528015	KPPN BANDAR LAMPUNG	1140098006797	BPg 017 KPPN Bandar Lampu	BANK MA	BPG	S1117/W	7 April 2015		
197	116	015	08	528022	KPPN KOTABUMI	15501001873308	RPL 116 KPPN Kotabumi utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
198	116	015	08	528022	KPPN KOTABUMI	015501000024304	BPg 116 KPPN Kotabumi	BRI	BPG	S394/WP	24 April 2015		
199	126	015	08	528036	KPPN METRO	1140012347640	RPL 126 KPPN Metro utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
200	126	015	08	528036	KPPN METRO	1140009728943	BPg 017 KPPN Metro	BANK MA	BPG	S394/WP	13 Maret 2015		
201	042	015	08	528057	KANWIL DJPBN PROV. KALIMAN	007101002738309	RPL 042 Kanwil Prov Kalbar	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
202	042	015	08	528057	KANWIL DJPBN PROV. KALIMAN	7101002509302	BPg 042 Kanwil Direktorat Je	BRI	BPG	S316/WP	5 Februari 2015		
203	042	015	08	528061	KPPN PONTIANAK	1460010355852	RPL 042 KPPN Pontianak utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
204	042	015	08	528061	KPPN PONTIANAK	1460000038302	BPg 042 KPPN Pontianak	BANK MA	BPG	S205/WP	30 Januari 2015		
205	079	015	08	528078	KPPN SINTANG	030401001208306	RPL 079 KPPN Sintang utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		

No	Kd KPPN	BA	Eselon I	KD Satker	Nama Satuan Kerja	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	JENIS REKENING	SURAT IJIN PERSETU	TANGGAL IZIN PEMBUKAAN	Saldo	Ket
206	079	015	08	528078	KPPN SINTANG	1460005545525	BPg 079 KPPN Sintang	BANK MANDIRI	BPG	S115/WP	24 februari 2015		
207	094	015	08	528082	KPPN KETAPANG	1460010355753	RPL 094 KPPN Ketapang utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
208	094	015	08	528082	KPPN KETAPANG	496142698	BPg 094 KPPN Ketapang	BNI	BPG	S616/WP	19 Desember 2016		
209	042	015	08	528099	KPPN SINGKAWANG	008901000921309	RPL 093 KPPN Singkawang ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
210	042	015	08	528099	KPPN SINGKAWANG	1460011073629	BPg 093 KPPN Singkawang	BANK MANDIRI	BPG	S0687/W	06 September 2017		
211	117	015	08	528104	KPPN PUTUSSIBAU	030501001579303	RPL 117 KPPN Putussibau ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
212	117	015	08	528104	KPPN PUTUSSIBAU	030501000030306	BPg 117 KPPN Putussibau	BRI	BPG	S096/WP	13 februari 2015		
213	043	015	08	528125	KPPN PALANGKARAYA	24301002351306	RPL 043 KPPN Palangkaraya	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
214	043	015	08	528125	KPPN PALANGKARAYA	024301000012304	BPg 043 KPPN Palangkaraya	BRI	BPG	S153/WP	11 Februari 2015		
215	080	015	08	528146	KPPN BUNTOK	030301000976300	RPL 080 KPPN Buntok PS TK	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
216	080	015	08	528146	KPPN BUNTOK	030301000093306	BPg 080 KPPN Buntok	BRI	BPG	S229/WP	2 Februari 2015		
217	102	015	08	528150	KPPN PANGKALAN BUN	28201001426300	RPL 102 KPPN Pangkalan Bu	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
218	102	015	08	528150	KPPN PANGKALAN BUN	028201001502300	BPg 102 KPPN pangkalan bu	BRI	BPG	S1077/W	21 November 2017		
219	045	015	08	528171	KANWIL DJPBN PROV. KALIMAN	301002278306	RPL 045 Kanwil Kalsel utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
220	045	015	08	528171	KANWIL DJPBN PROV. KALIMAN	000301000007301	BPg 045 Kanwil DJPBN Prov	BRI	BPG	S325/WP	12 Februari 2015		
221	045	015	08	528188	KPPN BANJARMASIN	310011313445	RPL 045 KPPN Banjarmasin ut	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
222	045	015	08	528188	KPPN BANJARMASIN	0310006784535	BPg 045 KPPN Banjarmasin	BANK MANDIRI	BPG	S1082/W	28 April 2015		
223	045	015	08	528192	KPPN KOTABARU	12701001341300	RPL 081 KPPN Kotabaru utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017	403	
224	045	015	08	528192	KPPN KOTABARU	0000012701000257304	BPg 081 KPPN Kotabaru	BRI	BPG	S048/WP	30 Januari 2008		
225	110	015	08	528200	KPPN BARABAI	14301000673306	RPL 110 KPPN Barabai utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
226	110	015	08	528200	KPPN BARABAI	014301000020309	BPg 110 KPPN Barabai	BRI	BPG	S172/WP	5 Maret 2015		
227	046	015	08	528221	KPPN SAMARINDA	8201003508306	RPL 046 KPPN Samarinda ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
228	046	015	08	528221	KPPN SAMARINDA	008201000974304	BPg 046 KPPN Samarinda	BRI	BPG	S0670/W	11 Maret 2015		
229	048	015	08	528235	KPPN TARAKAN	18301001108306	RPL 048 KPPN Tarakan utk P	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
230	048	015	08	528235	KPPN TARAKAN	018301000007303	BPg 048 KPPN Tarakan	BRI	BPG	S682/WP	18 Mei 2015		
231	047	015	08	528242	KPPN BALIKPAPAN	1490007893904	RPL 047 KPPN Balikpapan ut	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
232	047	015	08	528242	KPPN BALIKPAPAN	1490005683018	BPg 047 KPPN Balikpapan	BANK MANDIRI	BPG	S496/WP	9 April 2015		
233	049	015	08	528260	KANWIL DJPBN PROV. SULAWES	1500012220990	RPL 049 Kanwil Prov Sulut ut	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
234	049	015	08	528260	KANWIL DJPBN PROV. SULAWES	1500010385969	BPg 049 Kanwil DJPBN Provi	BANK MANDIRI	BPG	S1471/W	30 Juni 2015		
235	049	015	08	528277	KPPN MANADO	1500012223929	RPL 049 KPPN Manado utk P	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
236	049	015	08	528277	KPPN MANADO	1500007499237	BPg 049 KPPN Manado	BANK MANDIRI	BPG	S994/WP	7 Mei 2015		
237	050	015	08	528281	KPPN GORONTALO	2701002352306	RPL 050 KPPN Gorontalo utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
238	050	015	08	528281	KPPN GORONTALO	002701000024305	BPg 050 KPPN Gorontalo	BRI	BPG	S581/WP	30 April 2015		
239	049	015	08	528298	KPPN TAHUNA	1500078784848	RPL 083 KPPN Tahuna utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
240	049	015	08	528298	KPPN TAHUNA	1500074757475	BPg 083 KPPN Tahuna	BANK MANDIRI	BPG	S447/WP	15 Juni 2015		
241	051	015	08	528310	KPPN PALU	1510007627869	RPL 051 KPPN Palu utk PS TK	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
242	051	015	08	528310	KPPN PALU	1510005383481	BPg 051 KPPN Palu	BANK MANDIRI	BPG	S373/WP	3 Februari 2015	4.662.200	
243	053	015	08	528324	KPPN LUWUK	1510007625822	RPL 053 KPPN Luwuk utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
244	053	015	08	528324	KPPN LUWUK	1510005317521	BPg 053 KPPN Luwuk	BANK MANDIRI	BPG	S126/WP	5 Maret 2015		
245	052	015	08	528331	KPPN POSO	1510007630558	RPL 052 KPPN Poso utk PS T	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
246	052	015	08	528331	KPPN POSO	1510005355075	BPg 052 KPPN Poso	BANK MANDIRI	BPG	S677/WP	16 April 2015		
247	082	015	08	528345	KPPN TOLITOLI	1510007626366	RPL 082 KPPN ToliToli utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
248	082	015	08	528345	KPPN TOLITOLI	1510005552010	BPg 082 KPPN TOLITOLI	BANK MANDIRI	BPG	S123/WP	10 februari 2015		
249	136	015	08	528366	KANWIL DJPBN PROV. SULAWES	5001002958307	RPL 136 Kanwil Prov Sulse	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
250	136	015	08	528366	KANWIL DJPBN PROV. SULAWES	5001000078305	BPG 136 KANWIL DITJEN PE	BRI	BPG	S755/WP	30 Maret 2015		
251	136	015	08	528370	KPPN MAKASSAR I	5001002957301	RPL 136 KPPN Makassar I ut	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
252	136	015	08	528370	KPPN MAKASSAR I	5001000131307	BPG 136 KPPN MAKASSAR I	BRI	BPG	S566/WP	18 Maret 2015		
253	057	015	08	528387	KPPN PAREPARE	6401001006300	RPL 057 KPPN ParePare utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
254	057	015	08	528387	KPPN PAREPARE	006401000550306	BPg 057 KPPN Pare pare	BRI	BPG	S138/WP	25 Maret 2015		
255	056	015	08	528391	KPPN BANTAENG	24001001358303	RPL 056 KPPN Bantaeng utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
256	056	015	08	528391	KPPN BANTAENG	24001000026301	BPg 056 KPPN Bantaeng	BRI	BPG	S146/WP	23 Februari 2015		
257	058	015	08	528409	KPPN PALOPO	18701001320302	RPL 058 KPPN Palopo utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017	53.326	
258	058	015	08	528409	KPPN PALOPO	18701000589301	BPG 058 KPPN PALOPO	BRI	BPG	S289/WP	11 Maret 2015		



No	Kd KPPN	BA	Eselon I	KD Satker	Nama Satuan Kerja	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	JENIS REKENING	SURAT IJIN PERSETU	TANGGAL IZIN PEMBUKAAN	Saldo	Ket
259	059	015	08	528413	KPPN MAJENE	004701001035305	RPL 059 KPPN Majene utk P	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
260	059	015	08	528413	KPPN MAJENE	004701000003305	BPg 059 KPPN Majene	BRI	BPG	S358/WP	26 Juni 2015		
261	055	015	08	528420	KPPN WATAMPONE	1700001441421	RPL 055 KPPN Watampone u	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
262	055	015	08	528420	KPPN WATAMPONE	1520004155186	BPG 055 KPPN WATAMPON	BANK MA	BPG	S381/WP	09 April 2015		
263	060	015	08	528441	KPPN KENDARI	1620001606056	RPL 060 KPPN Kendari utk P	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
264	060	015	08	528441	KPPN KENDARI	1620000044895	BPg 060 KPPN Kendari	BANK MA	BPG	S0793/W	28 Mei 2015		
265	103	015	08	528455	KPPN BAU BAU	32601001645308	RPL 103 KPPN Bau Bau utk P	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
266	103	015	08	528455	KPPN BAU BAU	32601000004305	BPg 103 KPPN Baubau	BRI	BPG	S502/WP	15 April 2015		
267	061	015	08	528476	KANWIL DJPBN PROV. MALUKU	000101001516305	RPL 061 Kanwil Prov Maluku	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
268	061	015	08	528476	KANWIL DJPBN PROV. MALUKU	000101000522303	BPg 061 Kanwil Ditjen PBN F	BRI	BPG	S468/WP	30 Maret 2015		
269	061	015	08	528480	KPPN AMBON	101001519303	RPL 061 KPPN Ambon utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
270	061	015	08	528480	KPPN AMBON	000101000520301	BPg 061 KPPN Ambon	BRI	BPG	S805/WP	22 Mei 2015		
271	062	015	08	528497	KPPN TERNATE	1500012223721	RPL 062 KPPN Ternate utk P	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
272	062	015	08	528497	KPPN TERNATE	1500006651127	BPg 062 KPPN TERNATE	BANK MA	BPG	S328/WP	09 Februari 2015		
273	084	015	08	528502	KPPN TUAL	028101001797309	RPL 084 KPPN Tual utk PS Tk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
274	084	015	08	528502	KPPN TUAL	028101000049305	BPG 084 KPPN Tual	BRI	BPG	S203/WP	26 Januari 2015		
275	104	015	08	528519	KPPN SAUMLAKI	064301000746303	RPL 104 KPPN Saumlaki utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
276	104	015	08	528519	KPPN SAUMLAKI	064301000017306	BPg 104 KPPN Saumlaki	BRI	BPG	S448/WP	11 Mei 2015		
277	037	015	08	528544	KANWIL DJPBN PROV. BALI	36801002322301	RPL 037 Kanwil Prov Bali utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
278	037	015	08	528544	KANWIL DJPBN PROV. BALI	036801000135300	BPg 037 Kanwil Ditjen PBN F	BRI	BPG	S292/WP	26 Maret 2015		
279	037	015	08	528551	KPPN DENPASAR	36801002318302	RPL 037 KPPN Denpasar utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
280	037	015	08	528551	KPPN DENPASAR	036801000129309	BPg 037 Kantor Pelayanan P	BRI	BPG	S024/WP	9 Februari 2015		
281	132	015	08	528565	KPPN SINGARAJA	8801001254303	RPL 132 KPPN Singaraja utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
282	132	015	08	528565	KPPN SINGARAJA	0000008801000722303	BPG 132 KPPN Singaraja	BRI	BPG	S271/WP	30 Maret 2015		
283	038	015	08	528586	KPPN MATARAM	1610003669640	RPL 038 KPPN Mataram utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
284	038	015	08	528586	KPPN MATARAM	1610000560123	BPg 038 KPPN Mataram	BANK MA	BPG	S1154/W	29 Juni 2015		
285	071	015	08	528590	KPPN BIMA	0506234821	RPL 071 KPPN Bima utk PS T	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
286	071	015	08	528590	KPPN BIMA	0053758734	BPg 071 KPPN Bima	BNI	BPG	S307/WP	24 Februari 2015		
287	101	015	08	528608	KPPN SUMBAWA BESAR	0505801134	RPL 101 KPPN Sumbawa Bes	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
288	101	015	08	528608	KPPN SUMBAWA BESAR	50311358	BPg 101 Kantor Pelayanan P	BNI	BPG	S0310/W	24 Maret 2015		
289	039	015	08	528629	KANWIL DJPBN PROV. NUSA TEN	1810000059650	RPL 039 Kanwil Prov NTT utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
290	039	015	08	528629	KANWIL DJPBN PROV. NUSA TEN	1450098027309	BPg 039 Kanwil DJPB Prov N	BANK MA	BPG	S617/WP	25 Maret 2015		
291	039	015	08	528633	KPPN KUPANG	1810000059643	RPL 039 KPPN Kupang utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
292	039	015	08	528633	KPPN KUPANG	1450095015661	BPg 039 KPPN Kupang	BANK MA	BPG	S640/WP	30 Maret 2015		
293	040	015	08	528640	KPPN ENDE	2401001242302	RPL 040 KPPN Ende utk PS T	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
294	040	015	08	528640	KPPN ENDE	002401000165303	BPg 040 KPPN Ende	BRI	BPG	S450/WP	24 April 2015		
295	041	015	08	528654	KPPN WAINGAPU	14101001078307	RPL 041 KPPN waingapu utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
296	041	015	08	528654	KPPN WAINGAPU	14101000718302	BPg 041 KPPN Waingapu	BRI	BPG	S350/WP	23 April 2015		
297	111	015	08	528661	KPPN RUTENG	5056778648	RPL 111 KPPN Ruteng utk PS	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
298	111	015	08	528661	KPPN RUTENG	0215693343	BPg 111 KPPN Ruteng	BNI	BPG	S082/WP	29 Januari 2015		
299	063	015	08	528682	KANWIL DJPBN PROV. PAPUA	1540013994581	RPL 063 Kanwil Prov Papua u	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
300	063	015	08	528682	KANWIL DJPBN PROV. PAPUA	1540010032732	BPg 063 Kanwil Ditjen Perbe	BANK MA	BPG	S760/WP	3 Februari 2015		
301	063	015	08	528696	KPPN JAYAPURA	1540013995224	RPL 063 KPPN Jayapura utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
302	063	015	08	528696	KPPN JAYAPURA	1540010730624	BPg 063 KPPN jayapura	BANK MA	BPG	S566/WP	29 Januari 2015		
303	064	015	08	528701	KPPN BIAK	1540013991868	RPL 064 KPPN Biak utk PS Tk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
304	064	015	08	528701	KPPN BIAK	1540098121142	BPg 064 KPPN Biak	BANK MA	BPG	S237/WP	29 April 2015		
305	065	015	08	528718	KPPN MANOKWARI	1600002124192	RPL 065 KPPN Manokwari ut	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
306	065	015	08	528718	KPPN MANOKWARI	1540001032865	BPg 065 KPPN Manokwari	BANK MA	BPG	S00150/W	30 Januari 2015		
307	066	015	08	528722	KPPN SORONG	31001002081306	RPL 066 KPPN Sorong utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
308	066	015	08	528722	KPPN SORONG	031001000592301	BPg 066 KPPN Sorong	BRI	BPG	S196/WP	18 februari 2015		
309	067	015	08	528739	KPPN FAKFAK	1600002122121	RPL 067 KPPN FakFak utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
310	067	015	08	528739	KPPN FAKFAK	1540001026495	BPg 067 KPPN Fakfak	BANK MA	BPG	S68/WPB	6 Februari 2015		
311	068	015	08	528743	KPPN MERAUKE	1540013996537	RPL 068 KPPN Merauke utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		

No	Kd KPPN	BA	Eselon I	KD Satker	Nama Satuan Kerja	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	JENIS REKENING	SURAT IJIN PERSETU	TANGGAL IZIN PEMBUKAAN	Saldo	Ket
312	068	015	08	528743	KPPN MERAUKE	1540009809017	BPg 068 KPPN Merauke	BANK MANDIRI	BPG	S198/WP	9 Februari 2015		
313	085	015	08	528750	KPPN NABIRE	68701000799304	RPL 085 KPPN Nabire utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
314	085	015	08	528750	KPPN NABIRE	068701000158304	BPg 085 KPPN Nabire	BRI	BPG	S417/WP	26 Juni 2015		
315	063	015	08	528764	KPPN WAMENA	1540013994656	RPL 113 KPPN Wamena utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
316	063	015	08	528764	KPPN WAMENA	1540096911338	BPg 113 KPPN Wamena	BANK MANDIRI	BPG	S081/WP	22 Januari 2015		
317	016	015	08	528785	KPPN BENGKULU	1790000127733	RPL 016 KPPN Bengkulu utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
318	016	015	08	528785	KPPN BENGKULU	1130093040123	BPg 016 KPPN Bengkulu	BANK MANDIRI	BPG	S113/WP	28 Januari 2015		
319	121	015	08	528792	KPPN MANNA	15001001831306	RPL 121 KPPN Manna utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
320	121	015	08	528792	KPPN MANNA	015001000388300	BPg 121 KPPN Manna	BRI	BPG	S206/WP	6 maret 2015		
321	019	015	08	531293	KPPN JAKARTA IV	1243010000222300	RPL 019 KPPN Jakarta IV utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
322	019	015	08	531293	KPPN JAKARTA IV	032901000101303	BPg 019 KPPN Jakarta IV	BRI	BPG	S1125/W	24 Maret 2015	6.822.400	
323	137	015	08	539032	KPPN BATAM	506191885	RPL 137 KPPN Batam utk PS	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
324	137	015	08	539032	KPPN BATAM	1235558880	BPg 137 KPPN Batam	BNI	BPG	S0550/W	21 Mei 2015		
325	138	015	08	539049	KPPN SERUI	1540013993518	RPL 138 KPPN Serui utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
326	138	015	08	539049	KPPN SERUI	1540001020167	BPg 138 KPPN Serui	BANK MANDIRI	BPG	S209/WP	24 April 2015		
327	019	015	08	579330	KPPN JAKARTA V	1010001395555	RPL 019 KPPN Jakarta V utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		Perubahan Rek
328	019	015	08	579330	KPPN JAKARTA V	033901000046302	BPg 019 KPPN Jakarta V	BRI	BPG	S2732/W	22 Juni 2015		
329	008	015	08	613739	KANWIL DJPBN PROV. RIAU	17001002875309	RPL 008 Kanwil Prov Riau utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
330	008	015	08	613739	KANWIL DJPBN PROV. RIAU	017001000915307	BPg 008 Kanwil Ditjen Perbe	BRI	BPG	S637/WP	6 Februari 2015		
331	012	015	08	613743	KANWIL DJPBN PROV. JAMBI	2001003752307	RPL 012 Kanwil Prov Jambi utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
332	012	015	08	613743	KANWIL DJPBN PROV. JAMBI	2001000219300	BPg 012 Kanwil Ditjen Perbe	BRI	BPG	S435/WP	17 Pebruari 2015		
333	016	015	08	613750	KANWIL DJPBN PROV. BENGKULU	1790000128103	RPL 016 Kanwil Prov Bengkulu	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
334	016	015	08	613750	KANWIL DJPBN PROV. BENGKULU	0000011501001743307	BPg 016 Kanwil Ditjen Perbe	BRI	BPG	S211/WP	5 februari 2015		
335	043	015	08	613764	KANWIL DJPBN PROV. KALIMANTAN	24301002349309	RPL 043 Kanwil Kalteng utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
336	043	015	08	613764	KANWIL DJPBN PROV. KALIMANTAN	024301000007309	BPg 043 Kanwil DJPB Prov Kalimantan	BRI	BPG	S447/WP	31 Maret 2015		
337	046	015	08	613771	KANWIL DJPBN PROV. KALIMANTAN	8201003507300	RPL 046 Kanwil Prov Kaltim utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
338	046	015	08	613771	KANWIL DJPBN PROV. KALIMANTAN	008201000842303	BPg 046 Kanwil DJPB Prov Kalimantan	BRI	BPG	S2371/W	10 September 2007		
339	038	015	08	613785	KANWIL DJPBN PROV. NUSA TENGGARA	5201002083304	RPL 038 Kanwil Prov NTB utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
340	038	015	08	613785	KANWIL DJPBN PROV. NUSA TENGGARA	5201000877309	BPg 038 Kanwil DJPB Provinsi NTB	BRI	BPG	S1112/W	24 Juni 2015		
341	060	015	08	613792	KANWIL DJPBN PROV. SULAWESI	1620001604424	RPL 060 Kanwil Prov Sultra utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
342	060	015	08	613792	KANWIL DJPBN PROV. SULAWESI	1620000044903	BPg 060 Kanwil DJPBN Prov Sulawesi	BANK MANDIRI	BPG	S01155/W	30 Juni 2015		
343	051	015	08	613807	KANWIL DJPBN PROV. SULAWESI	1510007627414	RPL 051 Kanwil Prov Sulteng utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
344	051	015	08	613807	KANWIL DJPBN PROV. SULAWESI	1510005356313	BPg 051 Kanwil Ditjen Perbe	BANK MANDIRI	BPG	S701/WP	16 Maret 2015		
345	019	015	08	613811	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah	1030006842906	RPL 019 KPPN KPH utk PS TK	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
346	019	015	08	613811	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah	1190000004075	BPg 019 KPPN Khusus Pinjar	BANK MANDIRI	BPG	S1057/W	19 Maret 2015		
347	141	015	08	613832	KPPN TIMIKA	1540013997014	RPL 141 KPPN Timika utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
348	141	015	08	613832	KPPN TIMIKA	1540099055315	BPg 141 Kantor Pelayanan P	BANK MANDIRI	BPG	S023/WP	24 Februari 2015		
349	015	015	08	634256	KANWIL DJPBN PROV. BANGKA	006301001948304	RPL 015 Kanwil Prov Babel utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017	40.000	
350	015	015	08	634256	KANWIL DJPBN PROV. BANGKA	006301000006303	BPg 015 Kanwil DJPBN Prov	BRI	BPG	S1195/W	19 Juni 2015	135.706.000	
351	020	015	08	634260	KANWIL DJPBN PROV. BANTEN	8401003076307	RPL 020 Kanwil Prov Banten	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
352	020	015	08	634260	KANWIL DJPBN PROV. BANTEN	008401001044304	BPg 020 Kanwil Ditjen Perbe	BRI	BPG	S494/WP	123 Maret 2015		
353	030	015	08	634277	KANWIL DJPBN PROV. DI YOGYAKARTA	1370012905101	RPL 030 Kanwil Prov DIY utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
354	030	015	08	634277	KANWIL DJPBN PROV. DI YOGYAKARTA	1370002008445	BPg 030 Kanwil Ditjen PBN P	BANK MANDIRI	BPG	S836/WP	11 Februari 2015		
355	142	015	08	634409	KPPN PAINAN	27001001455308	RPL 142 KPPN Painan utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
356	142	015	08	634409	KPPN PAINAN	027001000012301	BPg 142 KPPN Painan	BRI	BPG	S219/WP	24 Februari 2015		
357	143	015	08	634497	KPPN KUALA TUNGKAL	017901001059304	RPL 143 KPPN Kuala Tungka	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
358	143	015	08	634497	KPPN KUALA TUNGKAL	017901000041308	BPg 143 KPPN Kuala Tangka	BRI	BPG	S63/WPB	12 februari 2015		
359	144	015	08	634530	KPPN LAHAT	4001001224304	RPL 144 KPPN Lahat utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
360	144	015	08	634530	KPPN LAHAT	1120006796788	BPg 144 KPPN lahat	BANK MANDIRI	BPG	S149/WP	13 februari 2015		
361	145	015	08	634572	KPPN LIWA	0506038292	RPL 145 KPPN Liwa PS TKPK	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
362	145	015	08	634572	KPPN LIWA	0080612703	BPg 145 KPPN Liwa	BNI	BPG	S269/WP	10 April 2015		
363	146	015	08	634608	KPPN CURUP	10801002194306	RPL 146 KPPN Curup utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
364	146	015	08	634608	KPPN CURUP	10801000253308	BPg 146 Kantor Pelayanan P	BRI	BPG	S133/WP	12 Februari 2015		

No	Kd KPPN	BA	Eselon I	KD Satker	Nama Satuan Kerja	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	JENIS REKENING	SURAT IJIN PERSETU	TANGGAL IZIN PEMBUKAAN	Saldo	Ket
365	127	015	08	634633	KPPN TANGERANG	7106153242	RPL 127 KPPN Tangerang utk	BSM	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
366	127	015	08	634633	KPPN TANGERANG	012001000994306	Bpg 127 KPPN Tangerang	BRI	BPG	S719/WP	23 April 2015		
367	147	015	08	634661	KPPN KUNINGAN	13301002017309	RPL 147 KPPN Kuningan utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
368	147	015	08	634661	KPPN KUNINGAN	13301001571300	BPg 147 KPPN Kuningan	BANK MA	BPG	S442/WP	8 April 2015		
369	148	015	08	634722	KPPN KLATEN	506370636	RPL 148 KPPN Klaten utk PS	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
370	148	015	08	634722	KPPN KLATEN	0186943907	BPg 148 KPPN Klaten	BNI	BPG	S174/WP	6 Maret 2015		
371	149	015	08	634792	KPPN WONOSARI	15301001378300	RPL 149 KPPN Wonosari utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
372	149	015	08	634792	KPPN WONOSARI	015301000243308	BPg 165 KPPN Wonosari	BANK MA	BPG	S249/WP	3 Maret 2015		
373	150	015	08	634860	KPPN BLITAR	1710002574922	RPL 150 KPPN Blitar utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
374	150	015	08	634860	KPPN BLITAR	1440010395918	BPg 150 KPPN Blitar	BANK MA	BPG	S476/WP	29 Januari 2015		
375	151	015	08	634963	KPPN TANJUNG	310011312470	RPL 151 KPPN Tanjung utk P	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
376	151	015	08	634963	KPPN TANJUNG	0310006618709	BPg 151 KPPN Tanjung	BANK MA	BPG	S249/WP	9 April 2015		
377	153	015	08	634984	KPPN TANJUNG REDEP	1480014518719	RPL 153 KPPN Tanjung Rede	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
378	153	015	08	634984	KPPN TANJUNG REDEP	1480007924296	BPg 153 Kantor Pelayanan P	BANK MA	BPG	S275/WP	7 April 2015		
379	152	015	08	634991	KPPN NUNUKAN	1480014521002	RPL 152 KPPN Nunukan utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
380	152	015	08	634991	KPPN NUNUKAN	1480007794087	BPg 152 KPPN Nunukan	BANK MA	BPG	S200/WP	25 Februari 2015		
381	154	015	08	635045	KPPN AMLAPURA	24101001332301	RPL 154 KPPN Amlapura utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
382	154	015	08	635045	KPPN AMLAPURA	024101000042301	BPg 154 KPPN Amlapura	BRI	BPG	S151/WP	27 Februari 2015		
383	155	015	08	635120	KPPN BENTENG	25701000992309	RPL 155 KPPN Benteng utk F	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
384	155	015	08	635120	KPPN BENTENG	025701000004300	BPg 155 KPPN Benteng	BRI	BPG	S298/WP	20 Mei 2015		
385	060	015	08	635155	KPPN RAHA	21701001170306	RPL 157 KPPN Raha utk PS T	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
386	060	015	08	635155	KPPN RAHA	21701000183306	BPg 157 KPPN Raha	BRI	BPG	S246/WP	27 April 2015		
387	156	015	08	635162	KPPN KOLAKA	1620011336330	RPL 156 KPPN Kolaka utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
388	156	015	08	635162	KPPN KOLAKA	1620000033633	BPg 156 KPPN Kolaka	BANK MA	BPG	S185/WP	5 Maret 2015		
389	158	015	08	635197	KPPN KOTAMOBAGU	003601001418302	RPL 158 KPPN Kotamobagu	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
390	158	015	08	635197	KPPN KOTAMOBAGU	0000003601000255303	BPg 158 KPPN Kotamobagu	BRI	BPG	S414/WP	9 April 2015		
391	050	015	08	648741	KANWIL DJPBN PROV. GORONTA	2701002351300	RPL 050 Kanwil Prov Gorontalo	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
392	050	015	08	648741	KANWIL DJPBN PROV. GORONTA	2701002161307	BPg 050 Kanwil DJPBN Goro	BRI	BPG	S1571/W	17 September 2015		
393	012	015	08	648762	KPPN BANGKO	27501002156305	RPL 159 KPPN Bangko utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
394	012	015	08	648762	KPPN BANGKO	27501000978303	BPg 159 KPPN Bangko	BRI	BPG	S58/WPB	2 Februari 2015		
395	160	015	08	648779	KPPN SEKAYU	1130011715764	RPL 160 KPPN Sekayu utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
396	160	015	08	648779	KPPN SEKAYU	1130006342145	BPg 160 KPPN Sekayu	BANK MA	BPG	S180/WP	12 Maret 2015		
397	020	015	08	648783	KPPN RANGKAS BITUNG	8001001665308	RPL 161 KPPN Rangkas Bitur	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
398	020	015	08	648783	KPPN RANGKAS BITUNG	008001000250304	BPg 161 KPPN Rangkasbitun	BRI	BPG	S179/WP	19 Maret 2015		
399	087	015	08	648790	KPPN SUMEDANG	9401001662309	RPL 087 KPPN Sumedang utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
400	087	015	08	648790	KPPN SUMEDANG	09401001034302	BPg 087 KPPN Sumedang	BRI	BPG	S252/WP	11 Maret 2015		
401	162	015	08	648805	KPPN SRAGEN	14001001435301	RPL 162 KPPN Sragen utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
402	162	015	08	648805	KPPN SRAGEN	014001000132308	BPg 162 KPPN Sragen	BRI	BPG	S191/WP	8 April 2015		
403	163	015	08	648812	KPPN PURWODADI	7601002369304	RPL 163 KPPN Purwodadi utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
404	163	015	08	648812	KPPN PURWODADI	007601000889308	BPg 163 KPPN Purwodadi	BRI	BPG	S152/WP	6 Maret 2015		
405	164	015	08	648826	KPPN BANJARNEGARA	401001276305	RPL 164 KPPN Banjarnegara	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
406	164	015	08	648826	KPPN BANJARNEGARA	000401000114306	BPg 164 KPPN Banjarnegara	BRI	BPG	S0353/W	4 Mei 2015		
407	165	015	08	648830	KPPN SIDOARJO	1410015744105	RPL 165 KPPN Sidoarjo utk	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
408	165	015	08	648830	KPPN SIDOARJO	1410009971458	BPg 165 KPPN Sidoarjo	BANK MA	BPG	S1310/W	2 Maret 2015		
409	169	015	08	648847	KPPN SELONG	1610003667552	RPL 169 KPPN Selong utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
410	169	015	08	648847	KPPN SELONG	1610000286034	BPg 169 KPPN Selong	BANK MA	BPG	S523/WP	22 Juni 2015		
411	170	015	08	648851	KPPN MAKALE	023201000850307	RPL 170 KPPN Makale utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
412	170	015	08	648851	KPPN MAKALE	023201000193307	BPg 170 KPPN Makale	BRI	BPG	S150/WP	19 Maret 2015		
413	044	015	08	648868	KPPN SAMPIT	16301001645302	RPL 044 KPPN Sampit utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
414	044	015	08	648868	KPPN SAMPIT	016301000917308	BPg 044 KPPN Sampit	BRI	BPG	S109/WP	16 februari 2015		
415	168	015	08	648872	KPPN PELAIHARI	23901001013304	RPL 168 KPPN Pelaihari utk F	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
416	168	015	08	648872	KPPN PELAIHARI	023901000010303	BPg 168 KPPN Pelaihari	BRI	BPG	S163/WP	3 Februari 2015		
417	166	015	08	648889	KPPN TUBAN	1780000908133	RPL 166 KPPN Tuban utk PS	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		



No	Kd KPPN	BA	Eselon I	KD Satker	Nama Satuan Kerja	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	JENIS REKENING	SURAT IJIN PERSETU	TANGGAL IZIN PEMBUKAAN	Saldo	Ket
418	166	015	08	648889	KPPN TUBAN	1400022662226	BPG 166 KPPN Tuban	BANK MANDIRI	BPG	S119/WP	16 februari 2015		
419	167	015	08	648893	KPPN SANGGAU	1460010357270	RPL 167 KPPN Sanggau utk P	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017	174.816	
420	167	015	08	648893	KPPN SANGGAU	1460002233000	BPg 167 KPPN Sanggau	BANK MANDIRI	BPG	S199/WP	20 April 2015		
421	171	015	08	652449	KPPN BEKASI	13901002704308	RPL 171 KPPN Bekasi utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
422	171	015	08	652449	KPPN BEKASI	013901000919305	BPg 171 Kantor Pelayanan P	BRI	BPG	S480/WP	11 Maret 2015		
423	172	015	08	652453	KPPN ATAMBUA	0505819878	RPL 172 KPPN Atambua utk	BNI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
424	172	015	08	652453	KPPN ATAMBUA	6524531727	BPg 172 KPPN Atambua	BNI	BPG	S154/WP	4 Maret 2015		
425	173	015	08	652460	KPPN MASOHI	026001001177305	RPL 173 KPPN Masohi utk PS	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
426	185	015	08	662789	KPPN TANJUNG SELOR	1480088888667	RPL 185 PS KPPN TANJUNG SELOR UN		RPL				
427	173	015	08	652460	KPPN MASOHI	026001000166301	BPg 173 KPPN Masohi	BRI	BPG	S621/WP	25 Juni 2015		
428	185	015	08	662789	KPPN TANJUNG SELOR	0000030601001095303	BPg 185 KPPN TANJUNG SELOR		BPG				
429	172	015	08	662770	KPPN LARANTUKA	24601001031303	RPL 174 KPPN Larantuka utk	BRI	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
430	185	015	08	662788	KANWIL DJPb PROV KALTARA	1480077785551	RPL 185 PS KANWIL DJPb PROV KALTA		RPL				
431	172	015	08	662770	KPPN LARANTUKA	024601000425305	BPg 174 KPPN Larantuka	BRI	BPG	S266/WP	5 Mei 2015		
432	185	015	08	662788	KANWIL DJPb PROV KALTARA	030601001096309	BPg 185 KANWIL DJPb PROV.KALTARA		BPG				
433	062	015	08	662787	KANWIL DJPBN PROV. MALUKU	1500012221899	RPL 062 Kanwil Prov Malut U	Mandiri	RPL	S560/MK	16 Januari 2017		
434	062	015	08	662787	KANWIL DJPBN PROV. MALUKU	1500006641334	BPg 062 Kanwil DJPBN Provinsi	BANK MANDIRI	BPG	S398/WP	11 Februari 2015		
435	019	015	08	527010	KANTOR PUSAT DJPBN	050701000190304	BPg 019 KP DJPBN	BRI	BPG	S2245/W	26 Mei 2015		
436	019	015	08	527010	KANTOR PUSAT DJPBN	1190005673940	RPL 019 DJPBN	BANK MANDIRI	RPL	S6226/M	24 Juli 2015		
437	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901003585302	RPL 019 BPDP SAWIT UNTUK D	BRI	RPL	S3177/W	14 Juli 2015	10.000.000	Deposito
438	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	1220007772737	RPL 019 BPDP SAWIT UNTUK	Mandiri	RPL	S3177/W	14 Juli 2015	10.033.973	Deposito
439	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	1220087882737	RPL 019 BPDP SAWIT UNTUK	Mandiri	RPL	S3177/W	14 Juli 2015	3.594.650.977	Deposito
440	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2737273727	RPL 019 BPDP SAWIT UNTUK	BNI	RPL	S3582/W	14 Agustus 2015	10.940.114	Deposito
441	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2707201837	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
442	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2707201848	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
443	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2707201859	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	574.000.000.000	Deposito
444	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2707201871	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	575.000.000.000	Deposito
445	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2707201826	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
446	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2707201860	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	250.000.000.000	Deposito
447	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2707201893	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
448	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2018270713	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
449	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2018270724	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
450	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2018090424	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	150.000.000.000	Deposito
451	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2018120905	RPL	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	300.000.000.000	Deposito
452	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035148401	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	550.000.000.000	Deposito
453	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035165403	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
454	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035157400	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
455	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035163401	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
456	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035166409	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	595.000.000.000	Deposito
457	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035164407	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
458	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035152400	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
459	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035149407	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	900.000.000.000	Deposito
460	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035151404	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	350.000.000.000	Deposito
461	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035147405	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
462	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035155408	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	500.000.000.000	Deposito
463	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035222409	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	200.000.000.000	Deposito
464	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	32901035339400	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	300.000.000.000	Deposito
465	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	3,2901E+13	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	200.000.000.000	Deposito
466	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	3,2901E+13	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	100.000.000.000	Deposito
467	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	3,2901E+13	RPL 019 BPDP Sawit Untuk D	BRI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	250.000.000.000	Deposito
468	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	0728094233	RPL Pemungutan Dana Perk	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	100.000.000.000	Deposito
469	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	0737460245	RPL Pemungutan Dana Perk	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	300.000.000.000	Deposito
470	019	015	08	409999	BPDP Kelapa Sawit	2018021029	RPL Pemungutan Dana Perk	BNI	RPL	S-956/W	14 Februari 2018	200.000.000.000	Deposito



DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2018

AKUN : 313221 Transfer Masuk

daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	(137.065.865,)
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	(174.131.388,)
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	(19.100.000,)
0.0	015.08.015117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	(250.408.000,)
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	(8.793.647.247,)
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	(254.059.000,)
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	(166.556.500,)
0.0	015.08.439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	(55.000.515,)
0.0	015.08.440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	(171.710.497.902,)
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	(174.477.865,)
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	(67.014.550,)
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	(63.279.500,)
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	(67.925.500,)
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	(176.967.365,)
0.0	015.08.451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	(99.907.500,)
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	(86.372.500,)
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	(82.398.500,)
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	(49.040.000,)
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	(97.953.960,)
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	(464.328.500,)
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	(129.718.500,)
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(1.200.990.454,)
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	(317.394.654,)
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(105.283.600,)

0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	(84.335.855,)
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	(177.952.000,)
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(62.145.000,)
0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	(49.040.000,)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(49.080.000,)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	(105.282.465,)
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	(100.531.250,)
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	(40.644.550,)
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	(102.448.500,)
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	(55.743.155,)
0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	(42.516.000,)
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	(104.339.155,)
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	(49.040.000,)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	(29.940.000,)
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	(64.615.000,)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(59.110.500,)
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	(56.301.000,)
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	(48.770.000,)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(33.859.000,)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(55.665.000,)
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	(60.192.500,)
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	(39.060.000,)
0.0	015.08.527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	(109.079.865,)
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	(178.931.515,)
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	(29.940.000,)
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	(45.297.500,)
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	(96.960.000,)
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	(102.394.700,)
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	(58.930.000,)
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	(50.384.000,)

0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	(191.681.600,)
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	(29.670.000,)
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	(119.778.500,)
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	(46.455.000,)
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	(49.700.000,)
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	(332.854.555,)
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	(119.753.620,)
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	(125.788.865,)
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	(88.819.865,)
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	(345.500.065,)
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWÉ	(218.744.365,)
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	(80.622.365,)
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	(199.594.865,)
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	(328.393.400,)
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	(115.993.115,)
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	(119.477.615,)
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	(79.721.865,)
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	(164.272.865,)
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	(97.137.365,)
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	(129.548.115,)
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	(112.336.365,)
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	(184.093.365,)
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	(149.264.865,)
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	(59.980.115,)
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(253.047.900,)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(129.245.635,)
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	(158.967.365,)
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	(119.973.365,)
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	(121.220.865,)
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	(124.080.865,)

0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	(108.457.615,)
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	(141.218.996,)
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	(95.409.365,)
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	(89.881.865,)
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	(76.885.615,)
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	(70.732.365,)
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	(105.869.865,)
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	(194.790.500,)
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	(175.534.365,)
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	(125.228.615,)
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	(112.788.520,)
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	(57.835.115,)
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	(101.094.740,)
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	(90.361.250,)
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	(56.360.000,)
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	(53.863.750,)
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	(49.040.000,)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(359.458.299,)
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	(80.054.000,)
0.0	015.08.528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	(33.600.000,)
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	(57.112.500,)
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	(59.395.655,)
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	(58.930.000,)
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	(53.882.812,)
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	(38.880.000,)
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	(38.880.000,)
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(206.362.000,)
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	(294.883.000,)
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(253.383.000,)
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	(103.471.000,)

0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	(423.775.600,)
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	(93.581.000,)
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	(187.842.000,)
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(265.816.500,)
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	(87.197.500,)
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	(82.888.200,)
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	(95.731.500,)
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	(156.099.620,)
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	(95.514.000,)
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	(97.971.500,)
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	(106.434.000,)
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(530.160.357,)
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(94.387.500,)
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	(188.692.250,)
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	(171.013.500,)
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	(148.818.500,)
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	(149.924.500,)
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	(117.398.000,)
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	(94.387.500,)
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	(66.681.755,)
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	(276.693.720,)
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	(115.367.500,)
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	(98.331.755,)
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	(149.768.500,)
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	(134.675.000,)
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	(69.052.365,)
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	(73.009.000,)
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	(29.493.774,)
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	(43.921.000,)
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	(53.825.000,)

0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	(19.460.000,)
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(29.940.000,)
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	(16.396.500,)
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	(107.101.000,)
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	(28.990.000,)
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	(202.424.500,)
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	(312.650.500,)
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	(118.673.000,)
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	(89.276.500,)
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	(136.733.510,)
0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	(139.650.000,)
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	(120.218.500,)
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	(165.126.000,)
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	(76.717.500,)
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	(107.864.000,)
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	(156.116.115,)
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	(76.196.865,)
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	(125.010.740,)
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	(126.040.095,)
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	(75.287.500,)
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(213.297.000,)
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(358.753.250,)
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(190.222.800,)
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	(290.812.800,)
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(445.751.250,)
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	(198.002.000,)
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(115.990.000,)
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(226.166.500,)
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	(234.696.500,)
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(124.201.000,)



0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	(104.561.500,)
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	(174.634.500,)
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	(68.140.000,)
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	(184.611.000,)
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	(90.561.865,)
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	(88.882.365,)
0.0	015.08.634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	(91.227.615,)
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	(31.389.375,)
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	(70.781.865,)
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	(58.135.000,)
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	(39.060.000,)
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	(121.295.400,)
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	(35.355.000,)
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	(28.990.000,)
0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	(123.521.000,)
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	(425.678.500,)
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	(25.465.000,)
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	(49.040.000,)
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	(180.058.500,)
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	(119.210.000,)
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	(75.740.000,)
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	(102.335.000,)
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	(307.296.740,)
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	(182.563.365,)
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	(94.142.139,)
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	(96.229.500,)
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	(22.323.750,)
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	(34.020.000,)
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	(29.940.000,)
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	(19.780.000,)

0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	(113.541.000,)
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	(128.306.000,)
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	(93.437.500,)
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	(179.669.500,)
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	(94.261.000,)
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	(28.990.000,)
0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	(58.840.000,)
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	(13.487.550,)
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	(36.565.000,)
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	(121.508.000,)
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	(44.394.550,)
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	(234.446.500,)
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	(4.097.883.658,)
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	(1.139.002.474,)
		<b>TOTAL</b>	<b>(213.010.931.924,)</b>

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2018

AKUN : 313211 Transfer Keluar

daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	133.063.000,
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	88.902.581,
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	95.144.500,
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	3.410.000,
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	192.045.362,
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	32.122.315.141,
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	6.765.000,
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	4.727.030,
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	26.361.000,
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	28.237.000,
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	421.905.000,
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	70.055.775,
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	2.145.000,
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	7.605.512.347,
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	21.160.000,
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	19.800.000,
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	2.917.597.540,
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	119.635.208,
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9.987.392.735,
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	28.710.000,
<b>TOTAL</b>			<b>53.894.884.219,</b>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 8 – 10, JALAN DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA 10710 KOTAK POS 21  
TELP. 021-3449230 (20 SALURAN) PSW. 6248, FAX. 385-2146, LAMAN WWW.KEMENKEU.GO.ID

**BERITA ACARA KONFIRMASI**

**Nomor BA- 10 /SJ.1.1/2019**

Pada hari Rabu tanggal duapuluh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas telah diselenggarakan konfirmasi data penerimaan pinjaman dan/atau hibah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Konfirmasi dituangkan ke dalam Berita Acara Konfirmasi dengan dilampiri Laporan Hasil Konfirmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Konfirmasi ini;
2. Sebagai bahan konfirmasi, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan nota dinas ND-12/SJ.1/2019 tentang Permintaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang didanai PHLN (LPK-PHLN) serta Konfirmasi Hibah Triwulan IV TA 2018;
3. Berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan bersama, hasilnya telah sesuai antara Bagian Keuangan, DJPB dengan Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2018 DJPB **tidak menerima pinjaman dan hanya menerima hibah** sebagaimana laporan terlampir;
4. Dalam rangka melaksanakan amanat PMK 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas PMK 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah serta PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, Bagian Keuangan DJPB akan selalu melakukan Konfirmasi Data Penerimaan Pinjaman dan/atau Hibah dengan Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pada tahun 2019 terdapat hibah langsung yang diterima oleh DJPB, maka Bagian Keuangan akan segera melaporkannya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan format yang telah ditentukan dan melakukan penatausahaan penerimaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Bag. Perencanaan  
Biro Perencanaan dan  
Keuangan,

Rachmad Arijanto

Perwakilan Bag. AKLAP  
Biro Perencanaan dan  
Keuangan,

Benny F Panjaitan

Perwakilan Bag. Keuangan  
Ditjen Perbendaharaan,

Sukadi

LAMPIRAN BERITA ACARA KONFIRMASI


Nomor : BA- 10 / S.J.1.1/ 2019

Tanggal : 20 FEBRUARI 2019

LAPORAN HASIL KONFIRMASI  
PENERIMAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH TA 2018

NO	REGISTER	NAMA PINJAMAN / HIBAH	SUMBER DANA	JENIS	PAGU DIPA 2018	REALISASI s.d. Q4		STATUS/KETERANGAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
						NILAI	%		
BERDASARKAN DATA LPK-PHLN TERDAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT									
1	2H816GHA	Public Financial Management Multi Donor Trust (PFM-MDTF) II	European Union (EU) melalui WB	HIBAH TERENCANA BARANG/JASA	USD351.000 (Rp4.703.400.000.-)	USD325.370 Rp4.359.967.880	92,69%	-	SPAN, DJPB
BERDASARKAN DATA E-REKON LK TERDAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT									
2	2ZDL9D6A	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA PERALATAN MUSIK DAN DRONE	DARI BADAN PEMBINA OLAHRAGA DAN SENI (BAPORS) KPPN SANGGAU	HIBAH LANGSUNG BARANG		39.890.000		HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KPPN SANGGAU
3	2315TERA	HIBAH LANGSUNG BARANG	YAFI TANZIL HUDA	HIBAH LANGSUNG BARANG		10.195.000		HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KPPN BATURAJA

Perwakilan Bagian Perencanaan  
Biro Perencanaan dan Keuangan,

  
Rachmad Arjanto

Perwakilan Bagian AKLAP  
Biro Perencanaan dan Keuangan,

  
Benny F Panjaitan

Perwakilan Bagian Keuangan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  
Sukadi





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 6-10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) Pes. 6248, 3812337; FAKSIMILIE (021) 3852146, LAMAN www.kemenkeu.go.id

**Berita Acara Rekonsiliasi**

Pada tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan antara dua pihak:

1. Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Dengan

2. Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode penatausahaan tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dengan melakukan proses pencocokan data terhadap 31 kasus kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. 15 kasus kerugian negara dengan saldo sebesar Rp2.210.213.915,00 dicatat sebagai piutang dalam Laporan Keuangan;
- b. 5 kasus kerugian Negara (Sdr. Mira Rosida, Sdr. Muhamad Arieda Humardani, Sdr. Tata Sumirat, Sdr. Azim Novriansa, dan Sdr. Fadlan Hamid Alfebi) yang telah terdapat angsuran/pelunasan pada tahun 2016 s.d. 2017 namun belum dicatat pada Laporan Perkembangan Kerugian Negara (belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan).
- c. 11 kasus kerugian negara dengan rincian yaitu 9 kasus Banding kepada Presiden dan 2 kasus (Sdr. Bento Barus dan Sdr. Yuni Asih) yang sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan namun belum diperoleh dokumen pengakuan piutang (SKTM/SKPGR) dengan jumlah saldo sebesar Rp264.280.362,00 tercatat dalam Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara namun tidak tercatat dalam Laporan Keuangan;

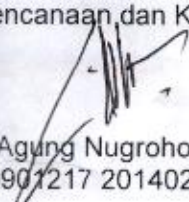
Dari hasil rekonsiliasi data kerugian negara **diketahui terdapat perbedaan pencatatan sebesar Rp264.280.362,00** hal ini terjadi karena terdapat perbedaan prinsip dalam hal pencatatan. Biro Perencanaan dan Keuangan mencatat kasus pada Laporan Perkembangan Kerugian Negara apabila telah terdapat laporan kerugian negara kepada Menteri Keuangan. Sedangkan untuk pencatatan piutang TGR/TP pada Laporan Keuangan dilakukan dalam hal kasus kerugian negara telah terdapat dokumen pengakuan piutang (SKTM/SKPGR) sehingga untuk kasus yang penanggung jawab kerugian negara mengajukan banding kepada Presiden belum dapat dicatatkan pada Laporan Keuangan.

Kedua belah pihak sepakat bahwa saldo kerugian negara yang dicatat dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2018 adalah sebesar sebesar **Rp2.210.213.915,00** yang terdiri dari (**Bagian Lancar sebesar Rp58.999.200,00 dan TP/TGR sebesar Rp2.151.214.715,00**). Sedangkan 11 kasus kerugian negara pada huruf c di atas. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

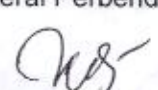
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 18 Februari 2019

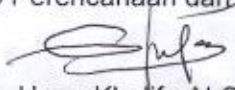
Perwakilan  
Bagian Perbendaharaan  
Biro Perencanaan dan Keuangan

  
Agung Nugroho  
NIP 19901217 201402 1 002

Perwakilan  
Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat  
Jenderal Perbendaharaan

  
Sukadi  
NIP 19720603 199402 1 002

Perwakilan  
Bagian Akuntansi dan Pelaporan  
Biro Perencanaan dan Keuangan

  
Umar Kholifa Al Ghifari  
NIP 19880126 200912 1 002



Direktorat Jenderal Perbendaharaan

No.	Unit/Penanggung Jawab	TP/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d. Desember 2015	Akumulasi Realisasi s.d. Desember 2015	Saldo Kerugian Negara s.d. Desember 2015	Bagian Lancar s.d. Desember 2015	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (jangka panjang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
1	KANTOR PUSAT DJPB Nyoman Udayana S NIP 060027074 Dilaporkan: 23-04-2001 Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN nomor S-67/MK 1/2009 tanggal 12-02-2009	TGR	1.500.000.000,00	0,00	123.298.711,00	1.376.701.289,00	0,00	0,00	1.376.701.289,00	0,00	1.376.701.289,00	Macet
2	KPN PALU R. Wiyatno & Yusuf Pada NIP - Dilaporkan: 06-12-1991	TGR	102.178.892,00	0,00	0,00	102.178.892,00	0,00	0,00	102.178.892,00	0,00	102.178.892,00	Macet
3	KPKN UJUNG PANDANG Rd. Soejatna NIP 060024152 Dilaporkan: 15-08-1996	TP	201.000.000,00	0,00	19.598.447,00	181.401.553,00	0,00	0,00	181.401.553,00	0,00	181.401.553,00	Macet
4	KANWIL DJPB TERNATE Etisyofia (Ahli Waris Yulardi, S.E.) NIP - Dilaporkan: 12-12-2006 Dilimpahkan pengurusan piutang macetnya ke DJKN No. S-66/MK 1/2009 tgl. 12-02-2008	TGR	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	Macet
5	KKN WAINGAPU Phillipus Butopoli NIP 060028893 Dilaporkan: 08-12-1981 Dilimpahkan pengurusan piutang macetnya ke DJKN No. S-456/SJ/2003 tgl 25-06-2003	TP	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	Macet
6	KKN AMBON Wakidjo Dikon NIP 060095535 Dilaporkan:- Dilimpahkan pengurusan piutang macetnya ke DJKN No. S-456/SJ/2003 tgl 25-06-2003 Rekomendasi penghapusan secara bersyarat oleh BPK	TP	28.176.150,00	0,00	13.543.375,00	14.632.775,00	0,00	0,00	14.632.775,00	0,00	14.632.775,00	Macet
7	KANWIL DJPB PROVINSI DKI JAKARTA Hasmiati, S.Sos. NIP 060078933 Dilaporkan: 22-03-2010 Dilimpahkan pengurusan piutangnya ke DJKN No. S-514/MK 1/2011 tgl 27-07-2011	TGR	679.007.572,00	6.363.960,00	323.207.268,00	355.800.408,00	0,00	0,00	355.800.408,00	0,00	355.800.408,00	Macet
8	KPPN CIREBON Ujang Sugiono Yusuf NIP 19561107 197507 1 001 Dilaporkan: 20-04-2011 SKPQR Nomor 796/KMK 1/2012 tgl. 18-07-2012	TGR	177.000.000,00	12.000.000,00	88.000.000,00	89.000.000,00	12.000.000,00	60.000,00	77.000.000,00	0,00	385.000,00	Lancar
9	KPPN Bandar Lampung Shahfira Ailif Asmia NIP 19920709 201411 2 001 Diketahui: 12-05-2016 Dilaporkan: 08-08-2016 SKTM tanggal 21-08-2016	TGR	62.540.000,00	32.000.000,00	50.840.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Lancar

Data Realisasi Pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Pembendaharaan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan  
 Periode pencatatan sampai dengan 31 Desember 2018  
 Versi Bagian Pembendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan

Direktorat Jenderal Pembendaharaan

No.	Unit/Penanggung Jawab	TR/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d. Desember 2018	Akumulasi Realisasi s.d. Desember 2018	Sekeloa Kerugian Negara s.d. Desember 2018	Bagian Lancar s.d. Desember 2019	Penyisihan Piutang Tidak Terbayar (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Terbayar (angka perajang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
10	KPPN Kotabumi Mutasi Piutang ke Kantor Pusat Sumarso NIP 19630610 198503 1 001 Diketahui : 27-01-2012 Dilaporkan : 24-01-2014 SKTM tanggal 22-11-2016	TGR	14.500.000,00	8.700.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lancar
11	Kantor Pusat DJPB Dina Lesti NIP 19920126 201411 2 001 Diketahui : - Dilaporkan : -	TGR	55.680.000,00	0,00	20.880.800,00	34.999.200,00	34.999.200,00	174.990,00	0,00	-	0,00	Lancar (Kasus belum dilaporkan)
12	Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur S Agel NIP 19900321 201210 1 004 Diketahui : 17-11-2017 Dilaporkan : 01-03-2018 SKTM tanggal 20-02-2018	TGR	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS
13	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Zulfikar Araqani NIP 19830504 200412 1 003 Diketahui : - Dilaporkan : - SKTM tanggal 01-11-2017	TGR	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	LUNAS (Kasus belum dilaporkan)
14	KPPN Merauke Mufrizal Akmal NIP 19910907 201411 1 001 Diketahui : - Dilaporkan : -	TGR	83.220.000,00	83.220.000,00	83.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS (Kasus belum dilaporkan)
15	KPPN Singkawang Any Rosilawati NIP 19850127 198503 2 002 Diketahui : 15-04-2018 Dilaporkan : 23-09-2018	TGR	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	LUNAS (Kasus belum dilaporkan)
Jumlah			2.956.602.514,00	151.943.660,00	746.388.599,00	2.210.213.915,00	58.999.200,00	294.996,00	2.151.214.715,00	0,00	2.074.699.715,00	

Keterangan:

- Pengakuan piutang didasarkan pada dokumen pengakuan piutang yaitu SKTM dan SKPGR

\*SKPGR : Surat Keputusan Pembebasan Ganti Rugi

\*SKTM : Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak



Data Kasus Kerugian Negara Yang Belum Diakui Sebagai Piutang

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

No.	Unit/Pananggung Jawab	TP/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d. Desember 2018	Akumulasi Realisasi s.d. Desember 2018	Saldo Kerugian Negara s.d. Desember 2018	Bagian Lancar s.d. Desember 2019	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (angka panjang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
1	KPN/KKN Ujung Pandang Soemadi NIP. 060026176 Mantan Kepala KPN	TGR	30.855.485,43	0,00	751.500,00	30.103.985,43	-	-	-	-	-	Penggelapan uang pensiun SKTGR No.743/KMK.01/1983 tgl. 25-10-1983 - Ybs. banding ke Presiden - Belum mendapatkan putusan
2	B. Urang NIP. 060006495 Mantan Kasli Pensiun	TGR	22.254.578,40	0,00	0,00	22.254.578,40	-	-	-	-	-	SKTGR No.741/KMK.01/1983 tgl. 25-10-1983 - Ybs. banding ke Presiden - Belum mendapatkan putusan
3	B. Kalelembang NIP. 060002979 Mantan Kasli pembayaran II	TP	1.399.895,60	0,00	0,00	1.399.895,60	-	-	-	-	-	SKTGR No.742/KMK.01/1983 tgl. 25-10-1983 - Ybs. banding ke Presiden - Belum mendapatkan putusan
4	Abdul Djelil Hamid NIP. 060011608 Mantan Kasli pembayaran II Diketahui : 10-11-1980 Dilaporkan : 24-02-1982	TGR	27.724.417,80	0,00	0,00	27.724.417,80	-	-	-	-	-	SKTGR No.739/KMK.01/1983 tgl. 25-10-1983 - Ybs. banding ke Presiden - Belum mendapatkan putusan
5	KPN/KKN Pelopo R. Soerjajwinata, SH NIP. 060005947 Mantan Kepala KKN Pelopo	TP	8.013.282,75	0,00	0,00	8.013.282,75	-	-	-	-	-	Penggelapan uang/pemisuan data pensiun SKTGR No.744/KMK.01/1983 tgl. 25-10-1983 - Ybs. banding ke Presiden - Belum mendapatkan putusan
6	Markus Merapi, BA NIP. 060011699 Mantan Kasli pembayaran II	TP	53.836.442,88	0,00	0,00	53.836.442,88	-	-	-	-	-	SKTGR No.745/KMK.01/1983 tgl. 25-10-1983 - Ybs. banding ke Presiden - Belum mendapatkan putusan
7	MR Mangontan NIP. 060012676 Mantan Kasli pembayaran II	TGR	3.493.695,40	0,00	0,00	3.493.695,40	-	-	-	-	-	SKTGR No.746/KMK.01/1983 tgl. 25-10-1983 - Ybs. banding ke Presiden - Belum mendapatkan putusan
8	Arie Amatdihardjo NIP. 060024897 Mantan Kasubsi pembayaran II	TGR	54.017.748,01	0,00	0,00	54.017.748,01	-	-	-	-	-	SKTGR No.747/KMK.01/1983 tgl. 25-10-1983 - Ybs. banding ke Presiden - Belum mendapatkan putusan
9	Djamil Pesamboan NIP. 060028520 Mantan Kasubsi pembayaran II Diketahui : 10-11-1980 Dilaporkan : 24-02-1982	TGR	29.886.317,70	0,00	0,00	29.886.317,70	-	-	-	-	-	SKTGR No.748/KMK.01/1983 tgl. 25-10-1983 - Ybs. banding ke Presiden - Belum mendapatkan putusan
10	KPPN Gorontalo Bento Barus NIP. 19830614 200412 1 001 Diketahui : 06-10-2012 Dilaporkan : 12-01-2015	TGR	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	-	-	-	-	-	Ikatan dinas program DIII - SKTM belum diperoleh - agar segera dilakukan pengusulan SPGR
11	KPPN Tarakan Yuni Asih NIP. 19901209 201210 2 001 Diketahui : 18-02-2015 Dilaporkan : 11-02-2016	TGR	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	-	-	-	-	-	Ikatan dinas program DIII - SKTM belum diperoleh - agar segera dilakukan pengusulan SPGR
Jumlah			265.031.882	0	751.500	264.280.382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2018

AKUN : 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	0,
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0,
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	0,
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,
0.0	015.08.439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	0,
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0,
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	0,
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	0,
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	0,
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	0,
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	0,
0.0	015.08.451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	0,
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	0,
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	0,
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	0,
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	0,
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	0,
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	0,
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0,
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	0,
0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	0,
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0,

0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0,
0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	0,
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	0,
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	0,
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	0,
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	0,
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	0,
0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	0,
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	0,
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	0,
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	0,
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	0,
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	0,
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	0,
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	0,
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	0,
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	0,
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	0,
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	0,
0.0	015.08.527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	0,
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	0,
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	0,
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	0,
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	0,
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	0,
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0,
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0,
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0,

0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	0,
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	0,
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	0,
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	0,
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWÉ	0,
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	0,
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	0,
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	0,
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	0,
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	0,
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	0,
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0,
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	0,
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	0,
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	0,
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0,
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	0,
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	0,
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	0,
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	0,
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	0,
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0,
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	387.875,
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	0,
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	0,
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	0,
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	56.720.000,

0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	0,
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	0,
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	0,
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	0,
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	0,
0.0	015.08.528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	0,
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	0,
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	0,
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	0,
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	0,
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	0,
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	0,
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0,
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	0,
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	0,
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	0,
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0,
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	0,
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	0,
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	0,
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	4.662.200,
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	0,
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	0,
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	0,

0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	0,
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	0,
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	0,
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	0,
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0,
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	0,
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	0,
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	0,
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	0,
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	0,
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	0,
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	0,
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	0,
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	0,
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	0,
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	0,
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0,
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	0,
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	0,
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0,
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	0,
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	0,
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0,
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	0,
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	0,
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	0,
0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	0,
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	0,

0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0,
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	0,
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0,
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	0,
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	0,
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	6.822.400,
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	0,
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	4.074.000,
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0,
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	0,
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0,
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0,
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	135.706.000,
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0,
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0,
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	0,
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	0,
0.0	015.08.634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	0,
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	0,
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	0,
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	0,
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	0,
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	0,
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	0,
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0,



0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	0,
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	0,
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0,
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	0,
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	0,
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	0,
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0,
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	0,
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	0,
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0,
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	0,
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	0,
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	0,
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0,
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	0,
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	0,
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	0,
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	0,
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	0,
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	0,
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	0,
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	0,
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	0,
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	0,
		<b>TOTAL</b>	208.372.475,

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2018

AKUN : 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)

daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	65.541.667,
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	4.185.356.472,
0.0	015.08.440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	5.702.004.000,
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	291.750.000,
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	2.500.000,
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0,
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	38.500.000,
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0,
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	91.800.000,
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	29.166.667,
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	25.666.667,
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	31.517.350,
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	0,
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	306.665.000,
<b>TOTAL</b>			<b>10.770.467.823,</b>

**DAFTAR SALDO AKRUAL  
TINGKAT ESELON I  
S.D 31 DESEMBER 2018**

AKUN : 115212 Piutang Lainnya

*daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17*

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	382,668,000
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0
<b>TOTAL</b>			<b>382,668,000</b>

**DAFTAR SALDO AKRUAL**

**TINGKAT ESELON I**

**S.D 31 DESEMBER 2018**

AKUN : 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

*daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17*

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	38,538,428
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	0
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	1,454,000
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	148,000
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	150,000
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	155,400
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	23,002,785
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	0
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	770,000
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	10,915,846
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0
<b>TOTAL</b>			<b>75,134,459</b>

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2018**

AKUN : 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya

*daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17*

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(1,913,340)
<b>TOTAL</b>			(1,913,340)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**S.D 31 DESEMBER 2018**

AKUN : 116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB

*daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17*

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(192,692)
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	(7,270)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(740)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(750)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(777)
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	(115,014)
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	0
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(3,850)
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	(10,915,846)
<b>TOTAL</b>			(11,236,939)

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2018

AKUN : 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	31.150.973.696,
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	0,
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	0,
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	48.125.000,
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	0,
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0,
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	0,
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	0,
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	0,
0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	0,
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	0,
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	0,
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	0,
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0,
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	0,
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	0,
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	0,
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	0,
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0,
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	0,

0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	0,
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	0,
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	0,
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	0,
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	0,
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0,
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	0,
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	0,
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	0,
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	0,
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	0,
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	33.150.000,
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	0,
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	0,
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	0,
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	0,
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0,
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	31.931.346,
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0,
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	0,
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0,
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0,
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0,
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	0,



0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	0,
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0,
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	0,
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0,
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	0,
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0,
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	0,
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	0,
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0,
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0,
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	0,
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	0,
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	0,
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0,
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0,
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	0,
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	0,
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0,
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	0,
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	0,
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,

**TOTAL**

31.264.180.042,

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2018

AKUN : 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	0,
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	0,
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	0,
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	0,
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	0,
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	0,
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0,
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0,
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	0,
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	0,
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	0,
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	0,
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	0,
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	0,
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	0,
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	0,
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	0,
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	0,
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	0,
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0,
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	0,

0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	0,
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0,
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	0,
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	0,
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	0,
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	0,
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0,
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0,
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	0,
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	0,
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	0,
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	(5.755.000,)
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	0,
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	0,
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	0,
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	0,
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	0,
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0,
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0,
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	0,
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	(8.778.000,)
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	0,
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	0,
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0,
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	0,
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0,
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	0,

0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	0,
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	0,
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0,
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0,
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	0,
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	0,
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0,
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(1.368.000,)
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0,
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	0,
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0,
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0,
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	0,
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0,
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	0,
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0,
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0,
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0,
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	0,
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	0,
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	0,
		<b>TOTAL</b>	<b>(15.901.000,)</b>

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2018

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	0,
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0,
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	0,
0.0	015.08.015117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	0,
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	(460.000,)
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	(2.939.507,)
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	(20.395.253.820,)
0.0	015.08.439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	0,
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0,
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	(4.807.495,)
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	(15.745.292,)
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	0,
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	(483.900,)
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	(1.576.699,)
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	(3.718.402,)
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	(12.532.406,)
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	(76.000,)
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	0,
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	(163.000,)
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	0,
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0,
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	0,

0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	0,
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0,
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(25.733.508,)
0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	(1.250.134,)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(13.717.904,)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	(20.079.822,)
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	(128.000,)
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	(12.573.562,)
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	(14.310.718,)
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	(12.791.228,)
0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	(899.100,)
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	(10.652.307,)
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	(32.092.745,)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	0,
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	(19.398.001,)
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	(1.024.160,)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(17.588.056,)
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	(635.000,)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	0,
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(300.800,)
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	0,
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	(1.629.700,)
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	0,
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	0,
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	(17.795.753,)
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	(15.074.587,)
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	(214.098,)
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	(1.856.400,)
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	(86.500,)

0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0,
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	(11.411.762,)
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	(420.320,)
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0,
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0,
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	0,
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	0,
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	(1.066.450,)
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	0,
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	0,
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	0,
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	(6.682.429,)
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	(2.255.765,)
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	(1.035.068,)
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	(21.000,)
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	(9.933.272,)
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	(11.938.363,)
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	(15.349.686,)
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	0,
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	(12.448.496,)
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	0,
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	(135.000,)
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	0,
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(1.995.700,)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(2.575.000,)
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	(9.657.131,)
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	(10.712.719,)
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	(1.364.200,)
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0,
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	0,

0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	0,
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	(20.116.302,)
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	(7.466.086,)
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	(9.443.619,)
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	(4.628.893,)
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	(1.738.471,)
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	(11.753.705,)
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	(11.164.223,)
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	0,
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	(485.900,)
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	0,
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	(479.150,)
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	0,
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	0,
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	0,
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	0,
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0,
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	0,
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	(317.800,)
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	(6.572.116,)
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0,
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	(1.995.013,)
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(2.172.360,)
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	(16.912.052,)
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	(7.763.166,)
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	(7.313.155,)



0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	(8.071.536,)
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	(8.865.938,)
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	(9.217.649,)
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(44.000,)
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	(130.500,)
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	(107.000,)
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	0,
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	(38.500,)
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	0,
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	0,
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	(12.000,)
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	(4.893.900,)
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	(15.810.664,)
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	0,
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	0,
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	0,
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	(784.696,)
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	0,
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	(20.713.104,)
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	(11.998.971,)
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	(11.361.894,)
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	0,
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	(1.331.048,)
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	0,
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0,
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	0,
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	0,
0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	(3.147.304,)

0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	(2.976.000,)
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0,
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	(254.420,)
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0,
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	(15.607.915,)
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	(8.137.329,)
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	0,
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	0,
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	(38.400,)
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	0,
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0,
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(19.137.325,)
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	(18.450.000,)
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	(24.403.065,)
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(22.341.203,)
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	(19.212.013,)
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0,
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	0,
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	0,
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	(22.181.716,)
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	(160.500,)
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	(6.437.138,)
0.0	015.08.634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	(12.804.526,)
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	(13.500,)
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	(7.252.207,)
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	(14.172.960,)
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	(7.251.195,)
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	0,
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	(9.386.593,)

0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	(11.097.498,)
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	(7.219.765,)
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0,
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	(1.348.500,)
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	(87.600,)
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	(756.052,)
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0,
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	(180.000,)
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	(8.397.300,)
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	(11.842.428,)
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	(10.511.950,)
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	(11.011.037,)
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	(375.150,)
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	(253.800,)
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	(442.300,)
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0,
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	(9.646.246,)
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	0,
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	0,
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	0,
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	(11.000.000,)
0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	0,
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	0,
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	0,
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	(9.689.535,)
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	(14.557.787,)
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	(1.961.500,)
		<b>TOTAL</b>	<b>(21.284.038.133,)</b>

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2018

AKUN : 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	0,
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0,
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	0,
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0,
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	0,
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	0,
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	0,
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	0,
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	0,
0.0	015.08.451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	0,
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	0,
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	0,
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	0,
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	0,
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	0,
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	0,
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0,
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	0,
0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	0,
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0,

0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0,
0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	0,
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	0,
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	0,
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	0,
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	0,
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	0,
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	0,
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	0,
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	0,
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	0,
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	0,
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	0,
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	0,
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	0,
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	0,
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	0,
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	0,
0.0	015.08.527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	0,
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	0,
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	0,
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	0,
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	0,
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	0,
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0,
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0,
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0,
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	0,

0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	0,
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	0,
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	0,
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	0,
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	0,
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	0,
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	0,
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	0,
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0,
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	0,
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	0,
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	0,
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0,
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	0,
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	0,
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	0,
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	0,
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	0,
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0,
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	(387.875,)
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	0,
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	0,
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	(56.720.000,)
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	0,
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	0,
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	0,
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0,

0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	0,
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	0,
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	0,
0.0	015.08.528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	0,
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	0,
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	0,
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	0,
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	0,
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	0,
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0,
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	0,
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	0,
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	0,
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0,
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	0,
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	0,
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	0,
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	(4.662.200,)
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	0,
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	0,
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	0,
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	0,
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	0,
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	0,
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	0,

0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0,
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	0,
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	0,
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	0,
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	0,
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	0,
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	0,
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	0,
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	0,
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	0,
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	0,
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	0,
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0,
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	0,
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	0,
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0,
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	0,
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0,
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	0,
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	0,
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	0,
0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	0,
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	0,
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0,
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	0,
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	0,
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	0,
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	(6.822.400,)
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	0,



0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(4.074.000,)
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0,
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	0,
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0,
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0,
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	(135.706.000,)
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0,
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0,
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	0,
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	0,
0.0	015.08.634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	0,
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	0,
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	0,
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	0,
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	0,
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	0,
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	0,
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0,
0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	0,
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	0,
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0,
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	0,
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	0,
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	0,
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	0,

0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	0,
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	0,
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	0,
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	0,
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0,
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	0,
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	0,
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	0,
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	0,
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	0,
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	0,
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	0,
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	0,
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	0,
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	0,

**TOTAL**

(208.372.475,)

**DAFTAR SALDO AKRUAL**

**TINGKAT ESELON I**

**S.D 31 DESEMBER 2018**

AKUN : 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

*daftar\_saldo\_akrual\_es1 --rekon17*

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(315.506.000,)
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(17.360.000,)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(2.617.000,)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	(281.934.000,)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	(9.280.000,)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(7.350.750,)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(3.726.300,)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(56.924.500,)
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	(5.878.636,)
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	(1.160.000,)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(11.580.000,)
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0,
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(1.226.083,)
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	0,
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(43.724.700,)
<b>TOTAL</b>			<b>(758.267.969,)</b>

**DAFTAR SATUAN KERJA**  
**LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
1	439165	-	KP	KSAP
2	439171	-	KP	SPAN
3	527010	-	KP	KP DJPBN
4	409999	-	KP	BPDJ Kelapa Sawit
5	440781	-	KP	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
6	527556	001	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI ACEH
7	527560	001	KD	KPPN BANDA ACEH
8	527577	001	KD	KPPN MEULABOH
9	527581	001	KD	KPPN LANGSA
10	527598	001	KD	KPPN TAPAK TUAN
11	527603	001	KD	KPPN LHOK SEUMAWA
12	527610	001	KD	KPPN KUTACANE
13	527624	001	KD	KPPN TAKENGON
14	451562	002	KD	KPPN MEDAN II
15	527645	002	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SUMATERA UTARA
16	527652	002	KD	KPPN MEDAN I
17	527666	002	KD	KPPN PEMATANG SIANTAR
18	527670	002	KD	KPPN PADANG SIDEMPUAN
19	527687	002	KD	KPPN GUNUNG SITOLI
20	527691	002	KD	KPPN TANJUNG BALAI ASAHAN
21	527709	002	KD	KPPN RANTAU PRAPAT
22	527713	002	KD	KPPN SIBOLGA
23	527734	002	KD	KPPN SIDIKALANG
24	527741	002	KD	KPPN TEBING TINGGI
25	527755	002	KD	KPPN BALIGE
26	527776	003	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SUMATERA BARAT
27	527780	003	KD	KPPN PADANG
28	527797	003	KD	KPPN BUKITTINGGI
29	527802	003	KD	KPPN SIJUNJUNG
30	527819	003	KD	KPPN SOLOK
31	527823	003	KD	KPPN LUBUK SIKAPING
32	634409	003	KD	KPPN PAINAN
33	527844	004	KD	KPPN PEKANBARU
34	527865	004	KD	KPPN RENGAT
35	527872	004	KD	KPPN DUMAI
36	613739	004	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI RIAU
37	527890	005	KD	KPPN JAMBI
38	527908	005	KD	KPPN SUNGAI PENUH
39	527912	005	KD	KPPN MUARA BUNGO
40	613743	005	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI JAMBI
41	634497	005	KD	KPPN KUALA TUNGKAL
42	648762	005	KD	KPPN BANGKO
43	527933	006	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
44	527940	006	KD	KPPN PALEMBANG
45	527961	006	KD	KPPN LUBUK LINGGAU
46	527975	006	KD	KPPN BATURAJA
47	634530	006	KD	KPPN LAHAT
48	648779	006	KD	KPPN SEKAYU
49	528001	007	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI LAMPUNG
50	528015	007	KD	KPPN BANDAR LAMPUNG
51	528022	007	KD	KPPN KOTABUMI
52	528036	007	KD	KPPN METRO LAMPUNG
53	634572	007	KD	KPPN LIWA
54	445371	008	KD	KPPN MUKO MUKO
55	528785	008	KD	KPPN BENGKULU
56	528792	008	KD	KPPN MANNA

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
57	613750	008	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI BENGKULU
58	634608	008	KD	KPPN CURUP
59	527954	009	KD	KPPN PANGKAL PINANG
60	527982	009	KD	KPPN TANJUNG PANDAN
61	634256	009	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI BANGKA BELITUNG
62	527162	010	KD	KPPN SERANG
63	634260	010	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI BANTEN
64	634633	010	KD	KPPN TANGERANG
65	648783	010	KD	KPPN RANGKASBITUNG
66	527027	011	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI DKI JAKARTA
67	527031	011	KD	KPPN JAKARTA I
68	527048	011	KD	KPPN JAKARTA II
69	527052	011	KD	KPPN JAKARTA III
70	531293	011	KD	KPPN JAKARTA IV
71	579330	011	KD	KPPN JAKARTA V
72	015114	011	KD	KPPN JAKARTA VI
73	015115	011	KD	KPPN JAKARTA VII
74	015116	011	KD	KPPN KHUSUS PENERIMAAN
75	015117	011	KD	KPPN KHUSUS INVESTASI
76	613811	011	KD	KPPN JAKARTA KHUSUS PINJAMAN dan HIBAH
77	451531	012	KD	KPPN BANDUNG II
78	527094	012	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI JAWA BARAT
79	527102	012	KD	KPPN BANDUNG I
80	527120	012	KD	KPPN CIREBON
81	527137	012	KD	KPPN BOGOR
82	527141	012	KD	KPPN TASIKMALAYA
83	527158	012	KD	KPPN PURWAKARTA
84	527183	012	KD	KPPN KARAWANG
85	527205	012	KD	KPPN GARUT
86	527230	012	KD	KPPN SUKABUMI
87	634661	012	KD	KPPN KUNINGAN
88	648790	012	KD	KPPN SUMEDANG
89	652449	012	KD	KPPN BEKASI
90	451547	013	KD	KPPN SEMARANG II
91	527268	013	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI JAWA TENGAH
92	527272	013	KD	KPPN SEMARANG I
93	527289	013	KD	KPPN SURAKARTA
94	527293	013	KD	KPPN PURWOREJO
95	527301	013	KD	KPPN PURWOKERTO
96	527315	013	KD	KPPN PEKALONGAN
97	527322	013	KD	KPPN PATI
98	527336	013	KD	KPPN KUDUS
99	527340	013	KD	KPPN MAGELANG
100	527357	013	KD	KPPN TEGAL
101	527361	013	KD	KPPN CILACAP
102	634722	013	KD	KPPN KLATEN
103	648805	013	KD	KPPN SRAGEN
104	648812	013	KD	KPPN PURWODADI
105	648826	013	KD	KPPN BANJARNEGARA
106	497587	014	KD	KPPN WATES
107	527399	014	KD	KPPN YOGYAKARTA
108	634277	014	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI DI YOGYAKARTA
109	634792	014	KD	KPPN WONOSARI
110	451553	015	KD	KPPN SURABAYA II
111	527411	015	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI JAWA TIMUR
112	527425	015	KD	KPPN SURABAYA I
113	527432	015	KD	KPPN MALANG
114	527446	015	KD	KPPN KEDIRI
115	527450	015	KD	KPPN MADIUN
116	527467	015	KD	KPPN BONDOWOSO

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
117	527471	015	KD	KPPN PAMEKASAN
118	527488	015	KD	KPPN BOJONEGORO
119	527492	015	KD	KPPN BANYUWANGI
120	527500	015	KD	KPPN MOJOKERTO
121	527514	015	KD	KPPN PACITAN
122	527521	015	KD	KPPN JEMBER
123	634860	015	KD	KPPN BLITAR
124	648830	015	KD	KPPN SIDOARJO
125	648889	015	KD	KPPN TUBAN
126	528057	016	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
127	528061	016	KD	KPPN PONTIANAK
128	528078	016	KD	KPPN SINTANG
129	528082	016	KD	KPPN KETAPANG
130	528099	016	KD	KPPN SINGKAWANG
131	528104	016	KD	KPPN PUTUSSIBAU
132	648893	016	KD	KPPN SANGGAU
133	528125	017	KD	KPPN PALANGKARAYA
134	528146	017	KD	KPPN BUNTOK
135	528150	017	KD	KPPN PANGKALAN BUN
136	613764	017	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
137	648868	017	KD	KPPN SAMPIT
138	528171	018	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
139	528188	018	KD	KPPN BANJARMASIN
140	528192	018	KD	KPPN KOTABARU
141	528200	018	KD	KPPN BARABAI
142	634963	018	KD	KPPN TANJUNG
143	648872	018	KD	KPPN PELEIHARI
144	528221	019	KD	KPPN SAMARINDA
145	528242	019	KD	KPPN BALIKPAPAN
146	613771	019	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
147	634984	019	KD	KPPN TANJUNG REDEP
148	528544	020	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI BALI
149	528551	020	KD	KPPN DENPASAR
150	528565	020	KD	KPPN SINGARAJA
151	635045	020	KD	KPPN AMLAPURA
152	528586	021	KD	KPPN MATARAM
153	528590	021	KD	KPPN BIMA
154	528608	021	KD	KPPN SUMBAWA BESAR
155	613785	021	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
156	648847	021	KD	KPPN SELONG
157	528629	022	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
158	528633	022	KD	KPPN KUPANG
159	528640	022	KD	KPPN ENDE
160	528654	022	KD	KPPN WANGGAPU
161	528661	022	KD	KPPN RUTENG
162	652453	022	KD	KPPN ATAMBUA
163	662770	022	KD	KPPN LARANTUKA
164	451578	023	KD	KPPN MAKASSAR II
165	497593	023	KD	KPPN SINJAI
166	528366	023	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI SELATAN
167	528370	023	KD	KPPN MAKASAR I
168	528387	023	KD	KPPN PARE PARE
169	528391	023	KD	KPPN BANTA ENG
170	528409	023	KD	KPPN PALOPO
171	528420	023	KD	KPPN WATAMPONE
172	635120	023	KD	KPPN BENTENG
173	648851	023	KD	KPPN MAKALE
174	528310	024	KD	KPPN PALU
175	528324	024	KD	KPPN LUWUK
176	528331	024	KD	KPPN POSO

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
177	528345	024	KD	KPPN TOLI TOLI
178	613807	024	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI TENGAH
179	528441	025	KD	KPPN KENDARI
180	528455	025	KD	KPPN BAU BAU
181	613792	025	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
182	635155	025	KD	KPPN RAHA
183	635162	025	KD	KPPN KOLAKA
184	497622	026	KD	KPPN MARISA
185	528281	026	KD	KPPN GORONTALO
186	648741	026	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI GORONTALO
187	497607	027	KD	KPPN BITUNG
188	528260	027	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI UTARA
189	528277	027	KD	KPPN MANADO
190	528298	027	KD	KPPN TAHUNA
191	635197	027	KD	KPPN KOTAMUBAGU
192	452878	028	KD	KPPN TOBELO
193	528497	028	KD	KPPN TERNATE
194	662787	028	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI MALUKU UTARA
195	528476	029	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI MALUKU
196	528480	029	KD	KPPN AMBON
197	528502	029	KD	KPPN TUAL
198	528519	029	KD	KPPN SAUMLAKI
199	652460	029	KD	KPPN MASOHI
200	528682	030	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI PAPUA
201	528696	030	KD	KPPN JAYAPURA
202	528701	030	KD	KPPN BIAK
203	528743	030	KD	KPPN MERAUKE
204	528750	030	KD	KPPN NABIRE
205	528764	030	KD	KPPN WAMENA
206	539049	030	KD	KPPN SERUI
207	613832	030	KD	KPPN TIMIKA
208	539032	031	KD	KPPN BATAM
209	325237	031	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KEPUALAUAN RIAU
210	527851	031	KD	KPPN TANJUNG PINANG
211	340249	032	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI BARAT
212	451604	032	KD	KPPN MAMUJU
213	528413	032	KD	KPPN MAJENE
214	330171	033	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
215	528718	033	KD	KPPN MANOKWARI
216	528722	033	KD	KPPN SORONG
217	528739	033	KD	KPPN FAK FAK
218	662788	034	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
219	528235	034	KD	KPPN TARAKAN
220	634991	034	KD	KPPN NUNUKAN
221	662789	034	KD	KPPN TANJUNG SELOR

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	55
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
F. Pengungkapan Penting Lainnya	62
VI. Lampiran Laporan Keuangan UAPPA-E1	
✓ LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	68
✓ LRA Belanja dan Pengembalian Belanja	69
✓ Neraca Percobaan	70
✓ Tindak Lanjut atas Temuan BPK	71
✓ Daftar Rekening Pemerintah	72
✓ Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	73
✓ Daftar Satuan Kerja Lingkup DJPb	74





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200 3812436 FAKSIMILE 3846402, SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2019  
Direktur Jenderal,

  
*Marwanto Harjowiryo*  
Marwanto Harjowiryo

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Periode 31 Desember 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp15.563.997.940.851,00** atau mencapai **134,70%** dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp11.554.836.676.450,00

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp7.984.355.304.620,00** atau mencapai **62,95%** dari alokasi anggaran sebesar Rp12.682.854.534.000,00

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar **Rp36.560.942.830.331,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp21.255.070.701.640,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.113.523.881.406,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp76.615.000,00; Investasi Jangka Panjang (neto) sebesar Rp1.352.498.396.761,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.839.773.235.524,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp4.023.006.331.269,00** dan **Rp32.537.936.499.062,00**

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp15.571.011.804.817,00** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp7.010.798.831.632,00**

sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp8.560.212.973.185,00 Jumlah surplus/defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp793.937.344,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar **Rp8.561.006.910.529,00**

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar **Rp22.195.161.238.061,00** ditambah surplus-LO sebesar Rp8.561.006.910.529,00 kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas defisit Rp34.676.913.260,00 ditambah transaksi antar entitas senilai Rp1.747.091.437.212,00 sehingga Ekuitas mengalami kenaikan senilai Rp10.342.775.397.487,00 dan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai **Rp32.537.936.499.062,00**

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018		% thd Angg 2018	31 DESEMBER 2017		% thd Angg 2017
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
<b>PENDAPATAN</b>							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.554.836.676.450	15.563.997.940.851	134,70	10.672.661.117.000	14.802.660.586.184	138,70
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>11.554.836.676.450</b>	<b>15.563.997.940.851</b>	<b>134,70</b>	<b>10.672.661.117.000</b>	<b>14.802.660.586.184</b>	<b>138,70</b>
<b>BELANJA</b>							
<b>Belanja Operasi</b>	B.2.						
Belanja Pegawai	B.3	547.063.610.000	539.713.131.026	98,66	565.466.524.000	554.852.312.957	98,12
Belanja Barang	B.4	11.734.710.739.000	7.046.237.325.619	60,05	12.524.908.033.000	11.757.333.138.468	93,87
Belanja Modal	B.5	401.080.185.000	398.404.847.975	99,33	111.009.011.000	107.695.115.105	97,01
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>12.682.854.534.000</b>	<b>7.984.355.304.620</b>	<b>62,95</b>	<b>13.201.383.568.000</b>	<b>12.419.880.566.530</b>	<b>94,08</b>

## II. NERACA

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK/TURUN	%
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.054.796	61.459.000	(60.404.204)	-98,28%
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	916.861.713	3.592.705.373	(2.675.843.660)	-74,48%
Kas Pada Badan Layanan Umum	C.3	21.167.898.964.152	3.186.919.095.961	17.980.979.868.191	564,21%
Investasi Jangka Pendek-BLU	C.4	-	8.643.092.784.654	(8.643.092.784.654)	-100,00%
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.5	10.770.467.823	5.219.179.936	5.551.287.887	106,36%
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.6	2.857.163.927	2.603.872.771	253.291.156	9,73%
Pendapatan yang masih harus diterima	C.7	39.922.005.718	17.398.545.400	22.523.460.318	129,46%
Piutang PNPB	C.8	457.802.459	145.294.823	312.507.636	215,09%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	C.9	(13.150.279)	(11.587.741)	(1.562.538)	13,48%
Bagian Lancar TP/TGR	C.10	58.999.200	99.699.200	(40.700.000)	-40,82%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.11	(294.996)	(498.496)	203.500	-40,82%
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.12	145.825.271	-	145.825.271	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.13	(729.125)	-	(729.125)	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.14	75.594.841	-	75.594.841	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.15	(377.974)	-	(377.974)	-
Persediaan	C.16	31.980.514.114	30.761.553.144	1.218.960.970	3,96%
Jumlah Aset Lancar		21.255.070.701.640	11.889.882.104.025	9.365.188.597.615	78,77%
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	C.17	1.352.498.396.761	-	1.352.498.396.761	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.352.498.396.761	-	1.352.498.396.761	0,00%
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.18	2.151.214.715	2.169.578.375	(18.363.660)	-0,85%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.19	(2.074.599.715)	(2.081.023.375)	6.423.660	-0,31%
Jumlah Piutang Jangka Panjang		76.615.000	88.555.000	(11.940.000)	-13,48%
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	C.20	9.245.211.622.150	9.250.442.370.270	(5.230.748.120)	-0,06%
Peralatan dan Mesin	C.21	1.355.084.962.397	1.165.077.847.255	190.007.115.142	16,31%
Gedung dan Bangunan	C.22	1.678.476.219.861	1.615.223.326.414	63.252.893.447	3,92%
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.23	16.236.440.328	16.516.438.451	(279.998.123)	-1,70%
Aset Tetap Lainnya	C.24	11.826.309.371	9.950.383.521	1.875.925.850	18,85%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.25	31.264.180.042	26.850.109.561	4.414.070.481	16,44%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.26	(1.224.575.852.743)	(1.064.005.682.714)	(160.570.170.029)	15,09%
Jumlah Aset Tetap		11.113.523.881.406	11.020.054.792.758	93.469.088.648	0,85%
<b>ASET LAINNYA</b>					
Aset Tak Berwujud	C.27	517.367.869.108	410.408.339.858	106.959.529.250	26,06%
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.28	2.647.501.603.239	-	2.647.501.603.239	-
Aset Lain-Lain	C.29	102.681.897.360	117.803.438.922	(15.121.541.562)	-12,84%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.30	(427.778.134.183)	(348.826.256.538)	(78.951.877.645)	22,63%
Jumlah Aset Lainnya		2.839.773.235.524	179.385.522.242	2.660.387.713.282	1483,06%
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>36.560.942.830.331</b>	<b>23.089.410.974.025</b>	<b>13.471.531.856.306</b>	<b>58,35%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.31	22.216.800.846	892.989.429.436	(870.772.628.590)	-97,51%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.32	30.207.658	31.165.804	(958.146)	-3,07%
Pendapatan Diterima di Muka	C.33	758.267.969	1.163.337.551	(405.069.582)	-34,82%
Uang Muka dari KPPN	C.34	1.054.796	61.459.000	(60.404.204)	-98,28%
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.35	-	4.344.173	(4.344.173)	-100,00%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		23.006.331.269	894.249.735.964	(871.243.404.695)	-97,43%
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang jangka panjang BLU kepada BUN	C.36	4.000.000.000.000	-	4.000.000.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		4.000.000.000.000	-	4.000.000.000.000	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>4.023.006.331.269</b>	<b>894.249.735.964</b>	<b>3.128.756.595.305</b>	<b>349,88%</b>
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas	C.37	32.537.936.499.062	22.195.161.238.061	10.342.775.261.001	46,60%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>32.537.936.499.062</b>	<b>22.195.161.238.061</b>	<b>10.342.775.261.001</b>	<b>46,60%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>36.560.942.830.331</b>	<b>23.089.410.974.025</b>	<b>13.471.531.856.306</b>	<b>58,35%</b>

## III. LAPORAN OPERASIONAL

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	15.571.011.804.817	14.788.601.753.715	782.410.051.102	5,29%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>15.571.011.804.817</b>	<b>14.788.601.753.715</b>	<b>782.410.051.102</b>	<b>5,29%</b>
<b>BEBAN</b>					
Beban Pegawai	D.2	586.920.363.333	589.173.561.675	(2.253.198.342)	-0,38%
Beban Persediaan	D.3	27.832.742.232	29.453.151.138	(1.620.408.906)	-5,50%
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.783.267.067.556	11.616.280.495.236	(5.833.013.427.680)	-50,21%
Beban Pemeliharaan	D.5	149.437.265.754	149.237.285.449	199.980.305	0,13%
Beban Perjalanan Dinas	D.6	189.451.883.938	166.044.939.483	23.406.944.455	14,10%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	273.893.466.342	250.059.962.269	23.833.504.073	9,53%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(3.957.523)	(9.019.698)	5.062.175	-56,12%
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>7.010.798.831.632</b>	<b>12.800.240.375.552</b>	<b>(5.789.441.543.920)</b>	<b>-45,23%</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>8.560.212.973.185</b>	<b>1.988.361.378.163</b>	<b>6.571.851.595.022</b>	<b>330,52%</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(2.390.935.049)	(2.512.329.778)	121.394.729	-4,83%
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.184.872.393	(4.558.834.350)	7.743.706.743	-169,86%
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.9	<b>793.937.344</b>	<b>(7.071.164.128)</b>	<b>7.865.101.472</b>	<b>-111,23%</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>8.561.006.910.529</b>	<b>1.981.290.214.035</b>	<b>6.579.716.696.494</b>	<b>332,09%</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
Pendapatan PNBP		-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-	-	-
Beban Persediaan		-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>8.561.006.910.529</b>	<b>1.981.290.214.035</b>	<b>6.579.716.696.494</b>	<b>332,09%</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK/TURUN	%
EKUITAS AWAL	E.1	22.195.161.238.061	8.836.719.944.082	13.358.441.293.979	151,17%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	8.561.006.910.529	1.981.290.214.035	6.579.716.696.494	30,11%
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		34.676.913.260	7.670.813.810.661	(7.636.136.897.401)	-99,55%
PENYESUAIAN NILAIASET	E.3	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	13.512.500	7.060.925	6.451.575	91,37%
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	-	7.663.161.660.492	(7.663.161.660.492)	0,00%
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.6	(352.414.822)	11.774.515.384	(12.126.930.206)	-102,99%
LAIN-LAIN	E.7	35.015.815.582	(4.129.426.140)	39.145.241.722	-947,96%
				-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	1.747.091.437.212	3.706.337.269.283	(1.959.245.832.071)	-189,17%
EKUITAS AKHIR	E.9	32.537.936.499.062	22.195.161.238.061	10.342.775.261.001	46,60%